

Penyuluhan pertanian diartikan sebagai proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka tahu, mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses pasar, teknologi pertanian, dan permodalan untuk meningkatkan produksi usaha tani, efisiensi, dan efektifitas usaha serta pendapatan keluarganya. Penyuluhan pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat mengisyaratkan bahwa petani adalah masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan potensi tersebut petani diharapkan mampu mengubah pola berpikirnya ke arah yang lebih baik. Hal ini berarti penyuluhan pertanian dapat dikatakan sebagai bentuk pendidikan kepada petani dan keluarganya. Prinsip pendidikan kepada petani dilakukan melalui pendidikan orang dewasa yang mengedepankan humanisasi, demokrasi, dan pemberdayaan. Prinsip pendidikan orang dewasa ini mengisyaratkan bahwa penyuluhan dan petani merupakan unsur pertama dan terakhir dalam melaksanakan pembangunan pertanian (*extension first and extension last, farmers first and farmers last*).

ideas
PUBLISHING

Jalan Gelatik No.24 Kota Gorontalo
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Telp./faks. 0435-830476

PENYULUHAN dan PEMBERDAYAAN PETANI INDONESIA

ISBN 978-602-1396-91-9



9 786021 396919

MOHAMAD IKBAL BAHUA

ideas
PUBLISHING

PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI INDONESIA

MOHAMAD IKBAL BAHUA

ideas
PUBLISHING



PENYULUHAN dan PEMBERDAYAAN PETANI INDONESIA

PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI INDONESIA

Mohamad Ikbah Bahua



IP.176.02.2015

**PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI INDONESIA**

MohamadIkbalBahua

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh **Ideas Publishing**, Maret 2015

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
Telp/Faks. 0435830476
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota Ikapi, Februari 2014

ISBN :978-602-1396-91-9

Penata Letak, Ilustrasi, dan Sampul
Tim Kreatif Ideas Publishing

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan masyarakat akan lebih bermakna jika dilakukan melalui pendekatan penyuluhan pertanian dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Hahekat pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya, mampu, mandiri dan tangguh sesuai dengan kemampuan sumber daya social dan sumber daya ekonomi sebagai salah satu usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran buku Penyuluhan dan Pemberdayaan untuk Petani Indonesia merupakan salah satu informasi ilmu pengetahuan dalam melakukan penyuluhan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan, dan kemandirian petani Indonesia. Untuk itu penyuluhan pertanian dan pemberdayaan masyarakat perlu di analisis berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, baik secara teori maupun praktis.

Buku Penyuluhan dan Pemberdayaan untuk Petani Indonesia ini menjelaskan berbagai makna pemberdayaan masyarakat yang di wujudkan melalui penyuluhan pertanian yang ditunjang oleh berbagai hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ulasan dari berbagai konsep teori yang sudah terbangun sebelumnya untuk mengokohkan penyuluhan pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat.

Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi kalangan birokrat, mahasiswa, akademisi, LSM, dan masyarakat umum yang mempunyai motivasi dan kemampuan serta daya cipta dalam membangun pertanian Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

Gorontalo, April 2015

Penulis

Dr. Mohamad Ikbah Bahua, S.P., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
BAB 2	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Pengertian dan Makna Pemberdayaan Masyarakat	5
B. Bentuk dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	7
C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	10
BAB 3	
KOMPONEN-KOMPONEN PENYUSUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Komponen Kekuasaan	15
B. Komponen Kognitif, Psikologis, Ekonomi, dan Politik	16
BAB 4	
SEJARAH DAN PENGERTIAN PENYULUHAN PERTANIAN SERTA IMPLIKASI KEBIJAKSANAANNYA	
A. Sejarah Perkembangan Penyuluhan Pertanian	2
B. Pengertian Penyuluhan Pertanian, Metode, dan Teknik Penyuluhan Pertanian Serta Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian	28
C. Implikasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Indonesia	44
BAB 5	
PERAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
A. Peran Penyuluhan Pertanian	53
B. Penyuluhan sebagai bentuk Pemberdayaan Masyarakat	57

BAB 6

KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian Kinerja Penyuluh Pertanian.....	61
B. Penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian	72
C. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja.....	75
D. Motivasi Penyuluh Pertanian.....	77

BAB 7

PERUBAHAN PARADIGMA PENYULUHAN PERTANIAN DARI PENDEKATAN PENAWARAN KE PENDEKATAN PERMINTAAN

A. Definisi Baru Penyuluhan.....	87
B. Paradigma Dorongan Penawaran pada Penyuluhan	88
C. Paradigma Dorongan Permintaan pada Penyuluhan	90

BAB 8

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

A. Pengertian Partisipasi	99
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	103
C. Petani dan Penyuluh Pertanian dalam konteks Partisipasi Masyarakat	106
D. Peranan Penyuluh Pertanian dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat	108

BAB 9

PENUTUP	117
----------------------	------------

Daftar Pustaka	119
-----------------------------	------------

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memandirikan masyarakat sesuai dengan kemampuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk mengakses sumber daya lokal sebaik mungkin. Proses pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Pemberdayaan masyarakat muncul pertama kali pada saat aktivis gerakan *black panther* memobilisasi politik di USA pada tahun 1960 dan pada pertengahan tahun 80-an kaum wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Kini konsep pemberdayaan telah masuk pada berbagai disiplin ilmu baik pada tataran teori maupun praktek dan telah menjadi kata plastis yang digunakan dalam berbagai konteks, sehingga kehilangan makna yang sebenarnya. Paragraf baru

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*”. Istilah pemberdayaan di Indonesia mulai populer pada tahun 1998 dan terus berkembang pada era reformasi. Pemberdayaan masyarakat di Indonesia umumnya ditujukan kepada masyarakat desa yang minim akan potensi sumber daya manusia namun kaya akan potensi sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat desa tersebut dimulai pada era orde baru dengan segenap program pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Implementasi dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada zaman orde baru dijabarkan melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu menunjang pembangunan desa tertinggal dengan memanfaatkan sumber daya pertanian sebagai basis pemenuhan pangan nasional.

Untuk menunjang hal tersebut pemerintah di zaman orde baru membuat barikade pertahanan pemberdayaan masyarakat desa dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat perkotaan pada zaman orde baru diimplementasikan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dengan membangun berbagai infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat menunjang pengembangan sumber daya manusia di pedesaan. Proses ini

menuntut masyarakat untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang serta pengembangan pembangunan masyarakat. Selain itu masyarakat dapat menemukan kembali solusi yang tepat dalam mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya internal masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya pemberdayaan mengisyaratkan bahwa, masyarakat perlu menganalisis tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berhubungan erat dengan pelaksanaan keberlanjutan pembangunan masyarakat, karena pemberdayaan merupakan prasyarat utama untuk memobilisasi masyarakat menuju suatu keberlanjutan pembangunan masyarakat yang sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, teknologi, budaya, dan ekologi yang dinamis.

Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari individu atau kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan pada kehidupan sosialnya. Banyak individu yang memiliki pemikiran untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, tetapi mereka banyak yang tidak mengetahui bagaimana untuk mengimplementasikannya. Pemberdayaan implementasi merupakan proses pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, sehingga akan tumbuh kapasitas mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Usaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat harusnya dimulai dari individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya hasil kerja dari sekelompok orang ini dapat dikembangkan, sehingga akan mempengaruhi pekerjaan lainnya dan akhirnya akan mengubah keadaan seluruh masyarakat.

Strategi pemberdayaan menekankan langkah nyata pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu proses pembangunan yang bertitik tolak dari, oleh, dan untuk rakyat yang berjalan dalam tatanan proses perubahan struktur masyarakat. Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat ditujukan agar setiap warga negara Indonesia yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati.

Sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, kebijakan pembangunan penyuluhan pertanian meletakkan pelaku utama (petani) dan pelaku usaha sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berupaya untuk memberikan kekuatan kepada petani dalam mengelola usaha tani sesuai dengan kemampuannya.

Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan yang dapat memberikan informasi dan pembelajaran kepada petani sesuai dengan permasalahan

sosial yang dihadapi petani melalui media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perilaku petani. Kebijakan pembangunan penyuluhan pertanian merupakan aras utama dalam penajaman arah baru pembangunan nasional, seiring dengan agenda reformasi pembangunan pertanian, yaitu pembangunan yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Penyuluhan pertanian diartikan sebagai proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka tahu, mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses pasar, teknologi pertanian, dan permodalan untuk meningkatkan produksi usaha tani, efisiensi, dan efektifitas usaha serta pendapatan keluarganya.

Penyuluhan pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat mengisyaratkan bahwa petani adalah masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan potensi tersebut petani diharapkan mampu mengubah pola berpikirnya ke arah yang lebih baik. Hal ini berarti penyuluhan pertanian dapat dikatakan sebagai bentuk pendidikan kepada petani dan keluarganya. Prinsip pendidikan kepada petani dilakukan melalui pendidikan orang dewasa yang mengedepankan humanisasi, demokrasi, dan pemberdayaan. Prinsip pendidikan orang dewasa ini mengisyaratkan bahwa penyuluhan dan petani merupakan unsur pertama dan terakhir dalam melaksanakan pembangunan pertanian (*extension first and extension last, farmers first and farmers last*).

Proses pembelajaran pada sistem pendidikan orang dewasa mengindikasikan bahwa petani merupakan subyek dari proses pembelajaran yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuan petani, sehingga penyuluh pertanian hanya akan berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam membantu petani melakukan identifikasi dan analisis situasi wilayah, merumuskan rencana aksi, melaksanakan program aksi dan mengakhirinya dengan mengevaluasi pelaksanaan program penyuluhan secara bersama-sama. Oleh karena itu penyuluh pertanian perlu merencanakan program penyuluhan bersama petani sesuai dengan potensi lokal yang ditunjang oleh regulasi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

BAB 2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian dan Makna Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan mulai dipopulerkan kembali oleh kaum wanita pada tahun 1980-an, setelah sempat dorman pada dekade tahun 1970-an. Upaya kaum wanita untuk mempopulerkan kembali pemberdayaan masyarakat termotivasi oleh pengembangan kapasitas diri melalui kesetaraan gender yang berfungsi untuk meningkatkan kemandirian kaum wanita dalam mengisi pembangunan masyarakat (Vathsala, 2005).

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma baru pembangunan masyarakat yang terfokus pada semua aspek manusia dan lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual, material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Berbagai aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek keamanan, dan aspek lingkungan.

Makna pemberdayaan menurut kamus Oxford kata *empower* sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua citra pemberdayaan, yaitu: (1) yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*), dan (2) kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai "*self-empowerment*" atau pemberdayaan sendiri. Konsep pemberdayaan menjadi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*kapabilitas*), yaitu: sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan (Empowermentillustrated.com, 2005).

Secara konseptual pokok utama pemberdayaan masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan itu seringkali dihubungkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial menekankan bahwa kekuasaan atau kekuatan pola pikir yang dinamis berkaitan erat dengan pengaruh dan kontrol dari seorang pemimpin yang mempunyai niat baik untuk membangun masyarakat secara nyata, konsisten, dan berkelanjutan.

Kekuasaan tercipta melalui relasi sosial. Oleh karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan ini, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna kesejahteraan, jika ditinjau dari: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun, dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas, artinya kekuasaan tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran yang mencakup lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi dari kedua belah pihak yang terlibat, didapat dari (*win win solution*) yang menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup lebih sejahtera bagi semua masyarakat yang terlibat.

Pada tahap ini pemberdayaan masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individu atau kelompok mengubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Basis politik dan hukum yang transparan, serta memberikan ruang gerak bagi demokratisasi dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan implementasi kegiatan.
- 2) Peningkatan pertumbuhan, pertambahan nilai dan pemerataan administrasi publik yang *accountability* dan responsif terhadap penggunaannya.
- 3) Menggerakkan desentralisasi dan pengembangan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada “kelompok miskin” untuk melakukan kontrol terhadap semua bentuk layanan yang dilaksanakan. Desentralisasi itu sendiri harus mampu bekerjasama dengan mekanisme lain dalam hal ini sistem pemerintahan untuk menggerakkan partisipasi serta pemantauan lembaga pemerintah oleh setiap warga negara.
- 4) Menggerakkan kesetaraan pengarus utamaan gender, baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kelembagaan politik.
- 5) Memerangi hambatan sosial (*social barrier*), terutama yang menyangkut bias-bias etnis, rasial, dan gender dalam penegakan hukum.
- 6) Mendukung modal sosial yang dimiliki kelompok miskin, terutama dukungan terciptanya jejaring agar mereka keluar dari kemiskinannya. Dalam hubungan ini, lembaga pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin terhadap organisasi perantara, pasar global, dan lembaga-lembaga publik.

B. Bentuk dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat (*strengthening community*) sangat beragam, yang hanya berwujud jika ada kemauan mengubah struktur masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk mengentaskan masyarakat dari lembah kemiskinan secara hakiki pekerjaan tersebut sama sulitnya dengan usaha memberdayakan mereka. Tugas itu bukanlah pekerjaan mudah yang bersifat *instant* (segera dapat dilihat hasilnya), melainkan harus butuh waktu, perencanaan yang holistik, tenaga dan biaya serta kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan keluarganya.

Perencanaan yang holistik dalam pengentasan kemiskinan diutamakan ke arah struktur sosial masyarakat melalui proses partisipasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala aspek yang direncanakan untuk meningkatkan keberdayaan mereka dan terbebas dari kemiskinan. Pengalaman menunjukkan, bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan seringkali menghadapi kendala-kendala yang sangat besar, antara lain

- 1) Usaha-usaha untuk menghambat usaha-usaha untuk membela orang-kecil atau orang miskin, yaitu: (a) lemahnya komitmen dan konsistensi(khususnya) aparat pemerintah untuk memihak dan membela orang miskin, (b) rendahnya kepedulian untuk memperhatikan orang miskin, dan (c) Ketidakmampuan memahami kehidupan orang miskin, terutama yang terkait dengan persepsi dan asumsi-asumsi tentang karakteristik orang miskin.
- 2) Kendala yang ada di lingkungan orang-miskin, yaitu: (a) kendala fisik alamiah, yang menyangkut kondisi sumber daya alam tempat orang miskin tinggal, seperti: kesuburan lahan, rawan bencana-alam, dan lain-lain, (b) kendala struktural yang bersumber terutama pada struktur sosial dalam masyarakatnya dan kendala-kultural yang seolah-olah menyerah terhadap nasib, dan (c) kendala sistemik dari kemiskinan, yaitu berlangsungnya suatu pola-pola pengontrolan tertentu terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, yang disadari atau tidak, justru tidak selalu menguntungkan pihak-pihak yang telah berada pada posisi diuntungkan, seperti: kebijakan swasembada pangan (beras), kebijakan pangan murah, prioritas pembangunan perkotaan, pemberdayaan masyarakat perkotaan,

pembangunan infra struktur perkotaan dan pedesaan dan lain-lain. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bermakna bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian dalam mengatasi masalah yang mereka dihadapi. Upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.

Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau seluruh strata atau lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pempampuan diri mereka.

Penekanan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ditekankan pada tiga tahapan proses pelaksanaan, yaitu:

- 1) Proses pemberdayaan masyarakat yang berupaya memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu dalam masyarakat menjadi lebih berdaya.
- 2) Proses memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses musyawarah dan mufakat.
- 3) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi sesuai kemampuannya melalui seni dan budaya serta olah raga yang didasarkan pada proses pendidikan yang demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat dapat mengacu pada berbagai kegiatan, diantaranya meningkatkan kesadaran adanya kekuatan sosial yang menekan atau mendorong orang lain pada aksi-aksi sosial untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Jenis pemberdayaan dari segi penguatan dapat dilihat pada dua level, yaitu: individu dan komunitas. Pada level individual, isu-isu yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat adalah hubungan patron-klien, gender, akses ke pemerintahan (negara), dan sumber-sumber kepemilikan properti. Sementara pada level komunitas, isu-isu utama yang biasa di angkat adalah: mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*),

pemberdayaan atau penguatan kerangka institusional dan akses hubungan dengan badan-badan pemerintah.

Pembangunan sosial pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Bagi seorang pelaku perubahan, hal yang dapat dilakukan terhadap klien mereka (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok atau komunitas) adalah upaya untuk memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha sosial untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya.

Budiman (1995) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakanyang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya yang sangat berhubungan dengan tiga tahapan dalam pemberdayaan, yaitu:

1) Tahapan Politik

Pemberdayaan secara perlahan melekat sebagai mekanisme bantuan diri untuk manusia lain-*mechanism of self-help for people*. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan diganti dengan ketergantungan pada diri sendiri secara nasional, dalam sistem ekonomi, pendidikan, kebudayaan, efisiensi dan efektivitas, sumber daya dan persaingan.

2) Tahapan Organisasi

Tahapan organisasi merupakan salah satu konsep pemberdayaan yang mengedepankan potensi sumber daya organisasi dengan berbagai sistem dan metode dinamika kelompok yang dinamis. Konsep modern yang mendorong organisasi, seperti *total quality management, habitual improvement, performance management, self-directed team work, internal customers, competence managemen etc.* Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan tergantung pada nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi.

3) Tahapan Sumber daya Manusia Individual

Pada tingkat atau tahapan individual, perubahan dari sumberdaya manusia yang sebelumnya kurang percaya diri selalu penurut dan patuh serta dikendalikan oleh kekuasaan, ketrampilan, status dan bayangan pribadi, meningkat kepada hal-hal dan imbalan yang lebih besar. Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap sumberdaya manusia, baik yang

memerlukan waktu singkat, maupun waktu yang lama, menjadikan perubahan hidup dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan yang semula dianggap tidak mungkin.

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (*income generating*).

Hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, kekuasaan dan keberanian, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mandiri demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi, sosial, fisik dan mental secara berkelanjutan. Mandiri bukan berarti menolak bantuan pihak luar, tetapi kemandirian merupakan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

- (a) Keadaan sumber daya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan.
- (b) Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (c) Sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai.
- (d) Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun.

Sebagai upaya mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, banyak upaya yang dapat dilakukan. Tetapi untuk mewujudkan ide menjadi aksi mutlak diperlukan adanya legitimasi, baik dari jajaran birokrasi maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ide aksi tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai model pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek dan pelaku dari suatu pembangunan masyarakat yang dapat menopang kehidupan masyarakat itu sendiri.

Model pemberdayaan masyarakat yang diciptakan melalui ide aksi sosial memerlukan suatu motivasi dan kemandirian serta berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber dana serta regulasi yang efektif dan efisien serta berpihak pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai ketidakkonsistenan dan ketidakpastian kebijakan yang lain (*inconsistency and uncertainty policy*), baik karena perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan, tekanan ekonomi, maupun perubahan kondisi sosial-politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya terbatas pada

peningkatan pendapatan masyarakat (*income generating community*). Tetapi juga diperlukan advokasi hukum dan kebijakan, bahkan pendidikan politik yang santun dan berwibawa untuk penguatan daya tawar politik yang rasional dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada masyarakat untuk lebih baik menentukan hidup dan kehidupannya berdasarkan potensi yang mereka miliki serta sumber beri spasi antar kata supaya konsistendaya alam yang ada di beri spasi antar kata karena menunjukkan tempat.sekitar mereka.

Pada aspek penyuluhan, pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada penyebaran inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan tambahkan tanda koma(,) dan mengubah perilaku masyarakat ke beri spasi antar kata arah yang lebih baik. Untuk mendapatkan legitimasi penyebaran inovasi teknologi oleh masyarakat, seorang penyuluh perlu mengetahui bahkan dapat mendemonstrasikan inovasi teknologi tersebut, baik melalui demonstrasi proses, aksi maupun demonstrasi hasilnya.

Inovasi teknologi baru ini akan diterima secara sosial oleh masyarakat, jika secara ekonomi inovasi itu akan menguntungkan usaha mereka, dan secara teknologi lokal inovasi tersebut dapat dilaksanakan oleh mereka, bahkan secara budaya inovasi teknologi tersebut dapat meningkatkan persatuan, persaudaraantambahkan tanda (,) dan keharmonisan hidup dimasyarakat setempat.

Melalui penyuluhan pertanian, masyarakat tani dan utamakan oleh penyuluh, terutama yang berhubungan dengan perencanaan program penyuluhan yang bersentuhan langsung dengan masalah yang dialami oleh petani sebagai pelaku utama pertanian. Penyuluh dalam memberdayakan masyarakat tani lebih mengedepankan sistem bekerja bersama petani melalui usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol, mengimplementasikantambahkan tanda koma (,) dan mengevaluasi semua program penyuluhan dengan masalah.

Program pembangunan pertanian harus memenuhi berbagai aspek pertanian, yaitu; agroekosistem, agribisnistambahkan tanda koma (,) dan agroekologi yang ada di beri spasi antar kata menjadi di lingkunganlingkungan petani (kearifan lokal) yang dapat menentukan keberhasilan program tersebut. Program pembangunan pertanian akan lebih mudah dipahami dan diadopsi oleh petani, jika para penyuluh mengetahui secara lebih mendalam dan terukur seberapa besar pentingnya program tersebut petani. Hal ini dapat dilakukan oleh penyuluh dengan melibatkan petani pada semua tahapan proses perencanaan program penyuluhan pertanian.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan masyarakat adalah: (a) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, (b) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan, (c) fasilitasi penguatan dan pemantapan kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan, (d) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat, (e) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan, dan (f) pemantauan unit pengaduan masyarakat.

Tugas penyuluhan tidak lagi terbatas untuk mengubah perilaku masyarakat bawah, tetapi juga untuk meningkatkan interaksi antar stakeholder lainnya agar mereka mampu mengoptimalkan aksesibilitasnya dengan informasi dan membentuk jaringan terutama dalam bidang usaha yang sama untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran ini maka yang perlu dilakukan oleh penyuluh adalah bagaimana mengelola kapasitas yang sudah dimiliki petani, tetapi belum dikembangkan untuk menjadi suatu kekuatan, menjadi energi yang besar, sehingga petani mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi serta mampu mengontrol hidupnya sendiri.

Proses pengembangan kapasitas petani dikenal dengan pemberdayaan. Proses pengembangan kapasitas ini dimulai dari lingkup individu yang kemudian diharapkan menyebar menjadi lingkup yang lebih luas yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam aktivitas pemberdayaan, masyarakat diberikan peluang atau kesempatan dan dukungan serta sumberdaya agar secara mandiri mampu mengontrol dirinya sendiri.

Agar keseluruhan tahapan tersebut yang merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai, maka sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan baik penyuluh maupun lembaga penyuluhan perlu melakukan persiapan dengan merancang suatu program penyuluhan yang tepat sasaran, tepat waktu dan taat asas. Perlu juga diperhatikan bahwa perubahan perilaku tidak muncul begitu saja, namun bergantung pada kapasitas atau power (daya) yang dimiliki oleh sasaran suluh. Oleh karena itu, para penyuluh perlu memahami dan menyadari bahwa pada hakekatnya setiap orang atau sasaran suluh mempunyai kapasitas, namun pada umumnya kapasitas tersebut belum diberdayakan dan dikembangkan.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat perlu ditempuh dengan:

- 1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

- 2) Upaya membangun sumber daya/potensi yang ada, dengan mendorong , memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat diperlukan langkah-langkah penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya memanfaatkan peluang. Selain itu pemberdayaan juga mengandung arti Melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah tidak menjadi lebih lemah. Oleh karena itu perlu strategi agar masyarakat lapisan bawah lebih berdaya, sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjelasan berbagai konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu individu menolong diri mereka sendiri, agar mereka mampu mandiri dan belajar memimpin diri sendiri berdasarkan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang tujuannya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

BAB 3

KOMPONEN-KOMPONEN PENYUSUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan. Artinya masyarakat berada dalam posisi yang lebih baik dari sebelumnya, lebih mapan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri berdasarkan standar kebutuhan masyarakat yang mapan dan mandiri. Masyarakat yang telah berdaya mempunyai kesempatan untuk maju dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya, sehingga mereka dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Unsur pemberdayaan masyarakat meliputi: aksesibilitas informasi teknologi, keterlibatan/partisipasi pelaku utama dalam pembangunan, kapasitas organisasi berupa kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat serta mobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu indikator dari komponen keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam memperbaiki kehidupannya.

A. Komponen Kekuasaan

1. *Power over*: kekuasaan untuk mengatur seseorang atau sesuatu. Respon pada kekuasaan ini bisa berupa kepatuhan, penolakan atau manipulasi.
2. *Power to*: kekuasaan yang bersifat generatif atau produktif yang menciptakan peluang dan aksi tanpa dominasi.
3. *Power with*: kekuasaan yang menimbulkan suatu perasaan bahwa keseluruhan itu lebih besar dari jumlah seluruh individu yang ada dan aksi kelompok lebih efektif.
4. *Power from within*: suatu perasaan adanya kekuatan dalam setiap orang. Pengakuan pada penerimaan dan penghargaan pada diri sendiri memungkinkan penerimaan orang lain sebagai sesama.

Hampir seluruh definisi pemberdayaan mencakup dimensi *power over*, misalnya akses pada pembuatan keputusan. Sebaliknya, *power with* menunjukkan kekuasaan kolektif. Sedangkan, maksud *power within* ialah individu ataupun para petani binaan haruslah diperkuat. Dalam hubungan ini, pemberdayaan ialah suatu proses dimana stakeholders dapat berubah dari

tidak berdaya (kami tidak mampu) menjadi percaya diri secara kolektif (kami mampu).

B. Komponen kognitif, psikologis, ekonomi, dan politik

1. Aspek kognitif pada pemberdayaan menunjukkan kemampuan *stakeholders* untuk memahami situasi subordinasi dalam masyarakat pada tingkat mikro maupun makro, dan kemampuan membuat keputusan untuk mengubah kebudayaan dan norma yang menghambat perkembangan mereka.
2. Aspek psikologis menunjukkan keberdayaan atau kemampuan *stakeholders* untuk mengembangkan sikap bahwa mereka mampu memperbaiki situasi dan akan berhasil.
3. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa *stakeholders* harus memiliki aktivitas yang produktif agar memiliki penghasilan dan otonomi keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
4. Aspek politik menunjukkan kapasitas *stakeholders* untuk menganalisis situasi sosial-politik dan kemampuan mereka mengorganisasi dan memobilisasi rekan-rekannya untuk melakukan perubahan sosial. Menurut Hadi (2010), upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu:
 - (a) komponen menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang (*enabling*). Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena masyarakat mempunyai potensi kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.
 - (b) komponen untuk memperkuat potensi masyarakat (*empowering*). Langkah nyata yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adalah menyediakan berbagai masukan (input) untuk memperkuat potensi sosial ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
 - (c) komponen memberdayakan yang mengandung arti melindungi. Pada proses ini harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan harus menekankan adanya simbiosis mutualisme antara yang lemah dan yang berdaya, sehingga keseimbangan kebutuhan akan tercapai di dalam masyarakat.

Komponen pemberdayaan masyarakat merupakan hasil dari proses interaksi tingkat komponen ideologis dan praktis. Pada tingkat komponen ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praktis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi.

Komponen konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian dari pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pengertian pembangunan masyarakat (*Community development*) adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik. *Community development* memiliki komponen untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah sosialnya. Komponen-komponen tersebut merupakan proses untuk mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif dalam melayani kepentingan masyarakat (Averroes Community, 2009).

Hatta dan Bahua (2010) menjelaskan bahwa, pendekatan pembangunan model pemberdayaan lebih kepada mazhab pembangunan modernisme yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat, bahkan mazhab pembangunan modernisme menggandeng kepentingan kapitalisme global yang mendistorsi kehidupan sosial ekonomi dan politik lokal, sehingga perlu dibuat suatu model pembangunan dari dalam komunitas yang dapat membangun keberdayaan masyarakat.

Argumentasi tersebut perlu diletakkan dengan kerangka kerja yang lebih luas, dengan melihat tujuan pembangunan sebagai penerimaan budaya dan politik serta hak-hak azasi manusia secara universal. Kekuasaan (*power*) harus dilihat sebagai sebuah sumber pertanggungjawaban sosial dan pelayanan. Pergerakan pemberdayaan tidak dapat berhenti setelah mereka mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, tetapi harus respek terhadap pencapaian semua hak-hak di dalam masyarakat (*society*).

Praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan (*income generating*). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya masyarakat setempat

untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan. Mandiri di sini bukan berarti menolak bantuan "pihak-luar" tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- 1) Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan.
- 2) Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai.
- 4) Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun-temurun.

Obyek atau target sasaran pemberdayaan dapat diarahkan pada manusia (*human*) dan wilayah/kawasan tertentu. Pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada manusia dimaksudkan untuk menaikkan martabatnya sebagai makhluk ber spasi antar katasosial yang berbudaya dan meningkatkan derajat kesehatannya agar mereka dapat hidup lebih produktif. Secara universal, pemberdayaan diberikan kepada semua masyarakat. Keuntungan dari pendekatan ini mudah untuk diterapkan, namun kejelekan pendekatan ini adalah adanya disparitas atau kesenjangan pemahaman yang cukup tinggi.

Pendekatan ideal, menekankan bahwa pola pemberdayaan sesuai dengan klasifikasi strata masyarakat. syarat yang harus dipenuhi dari sebuah pendekatan adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria materi pemberdayaan. Kondisi yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai suatu pembangunan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas dapat diciptakan melalui beberapa aspek sebagai berikut.

- 1) Kemandirian masyarakat lokal, otonomi dalam pembuatan keputusan pada tingkat desa, dan partisipasi langsung yang demokratis dalam proses pemerintahan melalui perwakilan.
- 2) Adanya ruang bagi ekspresi budaya dan kesejahteraan spiritual *experiential social learning*.
- 3) Akses pada lahan dan sumber daya lain, pendidikan untuk perubahan, perumahan, dan fasilitas kesehatan.
- 4) Akses pada pengetahuan dan ketrampilan (internal maupun external) untuk menjaga stok modal alami dan lingkungan secara berkesinambungan.
- 5) Akses pada pelatihan ketrampilan, teknik-teknik pemecahan masalah, teknologi tepat guna, dan informasi.

- 6) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan oleh semua orang, terutama wanita dan pemuda.

Keenam kondisi tersebut di atas, dapat dicapai melalui berbagai unsur pemberdayaan masyarakat, yaitu

- (a) Pemberian motivasi (*motivating*). Masyarakat membutuhkan motivasi yang kuat untuk peningkatan kapasitasnya dalam mengelola kehidupan dan kesejahteraannya melalui usaha ekonomi dan sosial yang mereka kembangkan. Motivasi tersebut dapat berasal motivasi internal maupun motivasi eksternal di masyarakat.
- (b) Pemberian penguatan (*empowering*). Masyarakat membutuhkan penguatan pendidikan, manajemen, teknis, dan permodalan untuk mengembangkan usaha ekonomi dan sosial mereka sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya.
- (c) Pemberian perlindungan (*protecting*). Masyarakat membutuhkan adanya perlindungan yang konprehensif dari berbagai unsur pelaksanaan pembangunan, baik itu pemerintah, LSM maupun pihak swasta sebagai usaha pemberian advokasi kepada masyarakat melalui berbagai regulasi dan politik yang berkeadilan dan bermartabat.

Menurut Darwanto (2007), unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya.

Keempat unsur ini saling berhubungan dalam menunjang pelaksanaan dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak lepas dari peran teknologi informasi, masyarakat, pelaku (GO/NGO), dan kredibilitas organisasi. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi suatu konsep model bagi pengembangan proses pemberdayaan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu pengambilan kebijakan dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari penekanan berbagai unsur-unsur tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inklusi dan Partisipasi

Inklusi fokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi fokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan.

Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, sarana dan prasarana, tenaga ahli, dan lain-lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut. Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidaksepakatan.

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan, yaitu: (1) partisipasi secara langsung, (2) partisipasi dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), (3) partisipasi secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka), (4) partisipasi berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan), dan (5) partisipasi berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

2. Akses pada Informasi

Akses pada informasi adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan, penawaran pasar, dan lain-lain. Masyarakat pedesaan yang terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya, dan jarak fisik. Masyarakat yang informed, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, seperti; memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah serta pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi. Titik

prioritas yang menjadi perhatian untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya melalui pengorganisasian dalam memperkuat kapasitas individual dan kelompok masyarakat, seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain.

Kebutuhan untuk berorganisasi secara baik bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara ekonomi, sosial maupun politik yang berkembang melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara berkelompok, penataan kapasitas kelompok melalui organisasi tani, pengembangan logistik, dan ekonomi serta akses pasar yang dihasilkan oleh warga petani. Hal ini dapat menciptakan suatu kondisi keberdayaan masyarakat melalui usaha manajemen organisasi lokal yang bermartabat dan berkelanjutan sesuai kapasitas sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

4. Profesionalitas Pelaku Pemberdayaan

Profesionalitas pelaku pemberdaya merupakan kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdayaan berusaha untuk mampu meningkatkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan melalui tindakannya yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, , harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah serta pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain.

Komponen penyusun pemberdayaan berdasarkan program pembangunan masyarakat antara lain

- a. pengetahuan masyarakat terhadap program yang akan dijalankan.
- b. keterampilan masyarakat dalam mengelola program dari perencanaan sampai dengan evaluasi program.
- c. kemauan atau sikap masyarakat dalam menerima dan mengimplementasikan program pemberdayaan sesuai dengan masalah sosial yang mereka hadapi. Komponen pemberdayaan tersebut merupakan bagaian dari perubahan perilaku terutama yang berhubungan

dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan spesifik masalah sosial yang mereka hadapi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komponen-komponen penyusun pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:

1. Aspek kekuasaan (*power*), bagian ini menjelaskan adanya pemberdayaan yang berdimensi kekuasaan atau memberi kuasa berdasarkan karakteristik pemimpin dan *stakeholder*.
2. Aspek kognitif, psikologis, ekonomi, dan politik, bagian ini menekankan aspek pengetahuan, sikap, kemampuan ekonomi masyarakat, dan menganalisis situasi sosial politik berdasarkan potensi lingkungan dan kemajuan teknologi.
3. Aspek perubahan perilaku, aspek ini menyangkut perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam partisipasi untuk melaksanakan pembangunan.

BAB 4

SEJARAH DAN PENGERTIAN PENYULUHAN PERTANIAN SERTA IMPLIKASI KEBIJAKSANAANNYA

A. Sejarah Perkembangan Penyuluhan Pertanian

Berawal pada tahun 1867-1868, James Stuart dari Trinity College untuk pertama kalinya memberikan ceramah atau pengarahan kepada para wanita dan pekerja pria di Inggris Utara, sejak itu Stuart dianggap sebagai Bapak Penyuluhan. Kemudian pada tahun 1871 Stuart mengusulkan pada Universitas Cambridge agar penyuluhan masuk ke beri spasi antar katadalam mata kuliahubah menjadi tanda baca titik secara resmi pada tahun 1873 Universitas Cambridge menerapkan sistem penyuluhanhilangkan tanda baca komayang diikuti oleh Universitas London dan Universitas Oxford. Menjelang tahun 1880 kegiatan yang mulanya dilakukan di beri spasi antar barisarea kampus telah melebar keluar kampus. Sejak abad ke-20 istilah penyuluhan pertanian mulai digunakan di Amerika Serikat.

Istilah penyuluhan digunakan dalam bahasa yang berbeda di beberapa negara. Penyuluhan dalam bahasa Belanda digunakan *Voorlichting* yang berarti penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Istilah penyuluhan di Malaysia yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris menggunakan kata perkembangan artinya dengan penyuluhan, maka akan terjadi perkembangan produksi usatanai.

Penyuluhan dalam Bahasa Inggris dan Jerman masing-masing menggunakan istilah pemberian saran atau apakah ini bahasa Jerman? yang berarti memberikan petunjuk. Jerman menggunakan istilah *Aufklarung* yang berarti pencerahan. Dalam bahasa Austria digunakan istilah *Forderung* yang berarti menggiring seseorang ke beri spasi antar kataarah yang diinginkan. Bahasa Perancis menggunakan istilah *Vulgarization* yang menekankan pentingnya penyederhanaan pesan bagi orang awam atau terbelakang. Bahasa Spanyol menggunakan istilah penyuluhan sebagai *Capacitacion* yang dapat diartikan sebagai pelatihan. Istilah penyuluhan pada awal kegiatannya dikenal sebagai *Agricultural Extension*.

Istilah penyuluhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "suluh" yang berarti memberi terang di tengah kegelapan. Dengan demikian,

penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan atau pencerahan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas. Melalui penerangan ini para penyuluh selain menerangi dirinya dengan ilmu pengetahuan, juga mampu menerangi petani dan keluarganya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat mengubah nasib mereka ke beri spasi antar kataarah yang lebih baik.

Proses penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar memberi penerangan, tetapi penerangan itu harus terus dilakukan sampai segala sesuatu yang diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dilakukan, dan dilaksanakan, sehingga masyarakat benar-benar dapat meninggalkan kebiasaan lamanya dan menggantinya dengan kebiasaan baru dan lebih modern.

Sejarah perkembangan penyuluhan memberikan pengetahuan tentang latar belakang kegiatan penyuluhan dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Ilmu penyuluhan berkembang, karena adanya peningkatan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Sejarah perkembangan penyuluhan memberikan gambaran betapa pentingnya masyarakat bagi seorang penyuluh, karena mereka akan merasa diterima di beri spasi antar katakalangan masyarakat dengan segala kemampuannya dalam memahami masalah dan mencarikan jalan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi binaannya. Masyarakat yang terbelenggu oleh penjajahan, kemiskinantambahkan tanda baca koma sebelum kata dan dan keterbelakangan berkeinginan untuk mengatasi masalah sosialnya dengan cara melakukan perubahan sosial sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka.

Masalah sosial yang melanda masyarakat dunia setelah perang dunia ke-2 lebih terarah pada masalah peningkatan harkat dan martabat hidup dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran dan kebutuhan akan rasa amantambahkan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat. Sebelum kata berusaha tambahkan kata “Mereka” untuk mengawali kalimat baru.berusaha sesuai dengan sumber beri spasi antar katadaya yang mereka miliki. Sejarah perkembangan penyuluhan pertanian pada beberapa negara memiliki latar belakang dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya di Amerika Serikat sejarah perkembangan penyuluhan pertanian berawal dari masalah sosial masyarakatnya yang butuh informasi pendidikan pertanian, kebutuhan menyampaikan informasitambahkan tanda baca koma dan mendorong penerapan informasi melalui kegiatan jasa penyuluhan.

Di Inggris, sejarah perkembangan penyuluhan pertanian berawal dari kebutuhan masyarakat akan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dengan metode lebih sistematis dan makin mendapat pengakuan

dari masyarakat, karena adanya tekanan perang yang membutuhkan produksi bahan pangan dari dalam negeri.

Di Negara Thailand, perkembangan penyuluhan pertanian diawali dari pembentukan satu departemen penyuluhan pertanian di tingkat pusat yang sebelumnya bersifat sektoral. Penerapan sistem latihan dan kunjungan makin meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan pertanian di Thailand.

Perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia dapat dikelompokkan dalam masa sebelum kemerdekaan (tahun 1817-1941), masa kemerdekaan (1945-1966), masa orde baru (1966-1998), dan masa reformasi atau otonomi daerah (1998-sekarang). Pembangunan Kebun Raya di Bogor pada tahun 1917 dengan tujuan mengenalkan jenis-jenis tanaman baru, menandai awal pembangunan pertanian di Indonesia. Menurut Slamet (2011 halaman berapa?), sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia dijelaskan sebagai berikut: tanda baca titik dua ganti dengan tanda baca titik sebagai tanda mengakhiri kalimat.

1. Perkembangan Penyuluhan Pertanian Indonesia Masa Kemerdekaan (1945-1966)

Pada masa kemerdekaan Indonesia pendekatan dalam memperbaiki pertanian rakyat perlu ditambahkan penjelasan tentang pendekatan apa yang diubah ketika jaman penjajah diubah dari ketika jaman penjajahan, tetapi sistem komando tetap dari hilangkan pusat. Kebijakan ini kurang menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Pada tahun 1963/1964 beberapa dosen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dibantu oleh sekelompok mahasiswa tingkat akhir melaksanakan uji coba Panca Usaha beri spasi antar katatani lengkap bekerjasama dengan kelompok tani yang menggarap lahan usaha beri spasi antar katatannya seluas 104 Ha. Hatambahkan tanda baca titik setelah Ha. di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Kegiatan uji coba ini mendapat dukungan dari Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) serta dinas terkait.

Pada tahun 1964/1965 sebanyak 408 mahasiswa dari 10 perguruan tinggi negeri mengadakan Kuliah Kerja Nyata di 15 propinsi yang terbagi atas 204 unit dengan luas sawah 11.066 Ha. Setiap dua orang mahasiswa menangani satu unit areal sawah seluas 50 Ha. dan hidup selama enam bulan bersama keluarga petani untuk membimbing dalam menerapkan Panca Usaha Tani lengkap. Melalui program ini, Produksinya ternyata meningkat rata-rata dua kali lipat dibandingkan dengan produksi di lahan sekitarnya ganti dengan tanda baca titik pada era ini sistem Bimbingan Massal (BIMAS) mulai digalakkan, sampai akhirnya pada tahun

1965/1966 program BIMAS menjadi program massal untuk meningkatkan produksi pertanian.

2. Perkembangan Penyuluhan Pertanian Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)

Awal tahun 1969 saat akan dimulainya pembangunan lima tahun (Pelita I) mulailah disusun pola pengembangan pertanian yang dikenal dengan istilah “*Improvement and Strengthening of Agricultural Extension*” (memperbaiki dan memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian). Pola ini merupakan usaha untuk memperbaiki dan memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Usaha kualitatif antara lain diperluasnya program penyuluhan pertanian untuk pemberdayaan wanita tani dan pemuda tani, serta dikembangkannya berbagai metode penyuluhan seperti *hilangkan titik dua demplot, denfarm, demarea, dan demunit*, siaran pedesaan, bahan cetakan dan bahan audio visual, serta pelatihan penyuluh pertanian. Sedangkan usaha kuantitatif penyuluhan pertanian antara lain direkrutnya pegawai baru, pengadaan peralatan kerja dan transport, penambahan dan perbaikan Balai Penyuluh Pertanian dan Pembentukan Balai Informasi Penyuluhan sampai ke beri spasi antar katatingkat kecamatan dan desa.

Pada masa orde baru mulai dirintis adanya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang terdiri dari berbagai generasi muda yang mempunyai motivasi untuk membangun pedesaan dan pertanian. Selain itu dibentuk pula Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) dalam rangka mendukung program Bimas. Melalui pembentukan PPL dan PPS ini, maka pada tanggal 18–25 September 1971 diadakan Pertemuan Petani Nasional (PENAS) yang pertama di Cihea Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Pada masa orde baru, penyuluhan pertanian mulai mendapat pengakuan dari masyarakat sejalan dengan keberhasilan swasembada beras nasional. Periode keemasan penyuluhan pertanian ini berlangsung sampai lengsernya pemerintahan orde baru oleh suatu bentuk perubahan melalui gerakan reformasi pada tahun 1998. pada titik inilah keberadaan lembaga penyuluhan pertanian menjadi objek yang harus memperjuangkan hak-hak petani dengan ketersediaan anggaran yang terbatas tetapi mempunyai tugas yang sangat besar yaitu meningkatkan swasembada beras.

3. Perkembangan Penyuluhan Pertanian Masa Reformasi/Otonomi Daerah

Pada masa reformasi atau penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengatur dan mengurus peningkatan dan pengembangan kualitas SDM sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.

Dengan adanya peluang mengembangkan potensi wilayah, peran penyuluh pertanian makin dibutuhkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan peluang yang ada. Penyuluh harus mampu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat tani serta mampu menerapkan pendekatan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan demikian kemampuan kualitas penyuluh perlu ditingkatkan pada berbagai bidang, baik melalui pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dan kinerja penyuluh, sehingga dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi usaha beri spasi antar katatannya.

Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa agraris, pada era reformasi banyak dihadapkan pada masalah sosial seperti hilangnya tanda baca titik dua kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, gizi buruk, dan lain-lain yang dapat menghambat pembangunan bangsa. Masalah sosial ini diperparah lagi oleh adanya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi dan terarah dalam merencanakan pembangunan bangsa dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi rakyat.

Pada era otonomi daerah diperlukan implementasi dan evaluasi kinerja penyuluh merupakan suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada penyedia dana publik dan pembuat kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Kedua pengambil kebijakan utama tersebut harus selalu diyakinkan bahwa penyuluh telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Kinerja penyuluh yang baik perlu untuk meyakinkan pembuat kebijakan dan anggaran pembangunan agar tetap mengalokasikan dana yang cukup untuk membiayai penyuluhan pertanian dalam menunjang pembangunan daerah.

Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan di era otonomi daerah perlu berusaha mengembangkan program penyuluhan yang sesuai dengan potensi daerah dan permintaan pasar dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Kinerja penyuluh pertanian yang baik berdampak pada perbaikan kinerja petani dalam meningkatkan produksi usaha beri spasi antar katatani. Kinerja penyuluh ini terarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani dalam melaksanakan usaha beri spasi antar katatani berdasarkan kompetensi, motivasi, kemandirian beri tanda baca koma (,) dan karakteristik dari penyuluh pertanian.

Kinerja penyuluh pertanian dapat diwujudkan melalui usahahilangkan tanda baca titik dua ganti dengan kata sebagai berikut dan akhiri dengan tanda baca titik.

- 1) Peningkatan karakteristik penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan.

- 2) Peningkatan motivasi penyuluh melalui motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk berafiliasi, dan motivasi untuk kekuasaan.
- 3) Peningkatan kompetensi penyuluh, baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial enter
- 4) (4) peningkatan kemandirian penyuluh, baik kemandirian intelektual, kemandirian emosional, kemandirian sosial, dan kemandirian ekonomi.

Manfaat yang diperoleh dari adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian ini, antara lain tanda baca titik diganti dengan kata sebagai berikut dan diakhiri dengan tanda titik.

- 1) Tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani.
- 2) Tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing penyuluh.
- 3) Terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan petani.
- 4) Terwujudnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan.
- 5) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah.

B. Pengertian Penyuluhan Pertanian, Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian Serta Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian

1. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Secara harfiah penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Obor (suluh) dalam konsep penyuluhan tersebut tetap terus menyala untuk menerangi berbagai permasalahan masyarakat yang harus diselesaikan sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber beri spasi antar katadaya manusianya.

Penyuluhan merupakan proses:

- (a) membantu petani untuk menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan atau perencanaan ke depan;
- (b) membantu menyadarkan petani terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut;
- (c) meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani;

- (d) membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya, sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan;
- (e) membantu petani memutuskan pilihan yang tepat menurut pendapat mereka secara optimal.
- (f) meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya;
- (g) membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Falsafah penyuluhan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan falsafah pendidikan pada umumnya, karena penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya. Falsafah pendidikan mencakup "idealisme", "pragmatisme", dan "realisme" begitu juga dengan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada petani dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani serta membentuk masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita pembangunan nasional penyuluhan pertanian telah membentuk sebuah idealisme. Dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, petani belajar sambil berbuat (*learning by doing*) atau melaksanakan materi penyuluhan. Dengan demikian mencerminkan aliran pragmatisme dalam diri petani. Pada saat materi penyuluhan disampaikan banyak petani yang kurang percaya, akan tetapi setelah melihat hasilnya yang kenyataannya memberikan keuntungan, petani akan sadar dan percaya kemudian mencobanya, hal ini mencerminkan realisme.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan di luar sekolah (*non formal*), bagi petani dan keluarganya agar berubah perilakunya untuk bertani lebih baik (*better farming*), berusaha beri spasi antar katatani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan bermasyarakat lebih baik (*better community*)serta menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*).

Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber beri spasi antar katadaya yang ada diberi spasi antar katalingkungannya untuk kesejahteraannya yang lebih baik secara berkelanjutan.

Penyuluh berfungsi sebagai mata rantai penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Penyuluh merupakan agen pembaruan dari badan, dinas atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan di masyarakat ke arah kemajuan yang lebih baik dengan jalan menyebar luaskan inovasi yang mereka produksi dan miliki serta telah disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ada empat fungsi penyuluhan pertanian yaitu:

- 1) Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhannya di beri spasi antar katabidang pertanian khususnya ilmu pengetahuan.
- 2) Penyuluhan pertanian merupakan jembatan antara praktek atau kegiatan yang dijalankan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dan senantiasa dibutuhkan oleh petani.
- 3) Penyampai, pengusahaan, dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat dilaksanakan oleh petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional.
- 4) Kegiatan pendidikan non formal yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah pertanian yang berkembang.

Kunci pentingnya penyuluhan di dalam proses pembangunan dijangkan beri spasi antar katadasari oleh kenyataan bahwa pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, baik lemah dalam permodalan, pengetahuan, dan keterampilannya, serta lemah pada peralatan dan teknologi pertanian yang diterapkan. Di samping itu, mereka juga seringkali lemah dalam hal semangat dan motivasinya untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluh pertanian merupakan unsur yang sangat penting dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat tani, sehingga mereka mau meninggalkan kebiasaan lamanya dan menggantinya dengan kebiasaan baru untuk mencapai hidup yang sejahtera dan lebih modern.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan beri koma (,) dan sumber beri spasi antar katadaya lainnya. Penyuluhan pertanian berupaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi dan efektifitas usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran petani dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Unsur-unsur penyuluhan pertanian meliputi hilangkan titik dua ganti dengan hal-hal berikut ini.

- 1) Penyuluh pertanian, adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan dan pengarahan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, sikap dan perilakunya terhadap perkembangan teknologi.
- 2) Sasaran penyuluhan pertanian, adalah *audiens* yang akan diberikan materi penyuluhan.
- 3) Metode penyuluhan pertanian, adalah cara-cara yang digunakan pada saat dilakukan penyuluhan, yang bersifat mendidik, membimbing, dan menerapkan sehingga dapat mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku petani agar dapat menolong dirinya sendiri (*self help*).
- 4) Media penyuluhan pertanian, adalah saluran yang menghubungkan penyuluh dengan materi penyuluhannya dengan petani yang sedang mengikuti penyuluhan.
- 5) Materi penyuluhan pertanian, berupa ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang disampaikan pada saat dilakukan penyuluhan.
- 6) Waktu penyuluhan pertanian, merupakan waktu yang dipilih seorang penyuluh untuk beri spasi antar katamelakukan pendekatan-pendekatan kepada petani.
- 7) Tempat penyuluhan pertanian. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh petani untuk melangsungkan kegiatan penyuluhan.

Pentingnya penyuluhan pertanian diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan petani untuk mengembangkan dirinya dalam menjalankan usaha beri spasi antar katatani dengan baik agar lebih mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Kegiatan penyuluhan pertanian dikembangkan sebagai dasar menggerakkan kesadaran dan partisipasi petani dalam proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan yang mereka cita-citakan.

Seorang petani dalam mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan atau inovasi baru, akan mengalami suatu proses untuk mengambil suatu keputusan yang berlangsung secara bertahap melalui serangkaian pengalaman mental psikologis sebagai berikut.

- 1) Tahap sadar, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.
- 2) Tahap minta, yaitu tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh keinginan untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.
- 3) Tahap menilai, yaitu penilaian terhadap baik/buruk atau manfaat inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap.

- 4) Tahap mencoba, yaitu tahap dimana sasaran mulai mencoba dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya, sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas.
- 5) Tahap menerapkan, yaitu sasaran dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan/diamati sendiri.
- 6) Tahap konfirmasi, yaitu sasaran dengan segala kemampuannya melakukan konfirmasi tentang inovasi yang ada. Konfirmasi tersebut dapat berupa menolak atau menerima inovasi. Petani menerima inovasi yang diberikan melalui penyuluhan pertanian dengan jalan mengimplementasikan inovasi pada usahaberi spasi antar katataninya, disisi lain petani menolak semua inovasi, jika inovasi tersebut tidak sesuai dengan potensi sumber beri spasi antar katadaya yang mereka miliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka seorang penyuluh harus menempatkan dirinya sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam membelajarkan petani sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Untuk itu penyuluh yang akan diterima petani memiliki kriteria antara lain: (1) layak untuk dipercaya, (2) tahu dan mengerti akan situasi petani, sehingga dapat menunjukkan permasalahan yang dihadapi sekaligus menunjukkan alternatif pemecahannya, (3) selalu ada jika dibutuhkan, dalam arti penyuluh pasti punya waktu untuk petani dan keluarganya, dan (4) penyuluh pada suatu wilayah kerja tidak sering diganti dan selalu pindah.

Selain kriteria tersebut, maka seorang penyuluh dalam melakukan penyuluhan yang bersifat partisipatif, mandiri, dan demokratis harus memiliki kemampuan: (1) kemampuan berkomunikasi dua arah, (2) sikap penyuluh: menghayati profesinya, menyukai masyarakat sasaran, yakin bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji, dan ampuh mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, (3) kemampuan penyuluh tentang: isi, fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi; segala sesuatu yang masyarakat suka atau tidak suka, (4) kemampuan untuk mengetahui karakteristik sosial budaya wilayah dan sasarannya (bahasa, agama, kebiasaan, budaya, dan lain-lain), (5) kemampuan memahami, menghargai kemampuan, dan pendapat petani berdasarkan tingkat pengetahuannya, (6) kemampuan memimpin dan mengembangkan program penyuluhan sesuai spesifik lokasi, (7) kemampuan mengevaluasi program penyuluhan sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan, kemampuan penyuluh mengakses pasar serta melakukan transaksi pemasaran yang dapat menguntungkan petani.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian adalah:

- 1) Apa yang harus dilakukan, apa yang akan kita lakukan pada kegiatan penyuluhan terhadap petani misalnya, menyebarkan informasi pertanian yang bermanfaat.
- 2) Di mana penyuluhan pertanian dilakukan, kegiatan penyuluhan semestinya dilakukan ditempat keluarga tani itu berada, misalnya tempat penjualan saprodi, rumah PPL, masjid, gereja, balai desa, tempat perkumpulan keluarga tani (PKK, kelompok tani, dan lain-lain).
- 3) Bilamana kegiatan penyuluhan dilakukan, waktu yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan harus sesuai dengan keperluan dan kondisi sasaran.
- 4) Oleh siapa kegiatan penyuluhan dilakukan, penyuluhan dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian yang profesional baik PNS, swadaya, atau sukarelawan.
- 5) Bagaimana kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan, agar kegiatan penyuluhan memperoleh hasil yang maksimal maka harus memenuhi syarat sesuai keadaan sasaran, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat mengenai sasaran dan waktunya, amanat harus diterima dan dimengerti, dan murah biayanya.

Penyuluh pertanian yang progresif dan efektif harus didukung dan bekerjasama secara erat dengan Lembaga Penelitian Pertanian (termasuk penelitian sosial ekonomi dan penyuluhan pertanian) sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian secara terus menerus. Penyuluhan pertanian tidak hanya menyangkut proses produksi, tetapi yang diperlukan oleh pertanian modern adalah penyuluhan yang mencakup semua aspek pada sistem agribisnis (produksi, pascapanen, pengolahan, pemasaran, harga, dan lain-lain).

Perlu disadari bahwa pembangunan pertanian yang berkelanjutan memerlukan dukungan hasil-hasil penelitian teknologi, sosial, dan ekonomi pertanian yang kuat. Tanpa itu pembangunan pertanian akan mengalami stagnasi. Selain itu pembangunan pertanian membutuhkan pula peran dari lembaga perguruan tinggi dalam melakukan kerjasama untuk pengembangan, pengabdian masyarakat dan desiminasi ilmu pengetahuan pertanian, baik secara teori maupun praktek yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup petani dan keluarganya.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non formal bagi petani dan keluarganya dalam sistem pendidikan orang dewasa yang diwujudkan melalui model pengembangan program penyuluhan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi sumber daya alam lokal di sekitar petani dengan tingkat permasalahan yang mereka hadapi. Untuk tujuan mengubah perilaku petani agar mau meninggalkan kebiasaannya dan

menggantinya dengan kebiasaan baru agar mereka dapat bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan bermasyarakat lebih baik (*better community*), menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*) serta memasarkan produksi pertanian dengan baik dan berkesinambungan (*better sustainability product marketing*).

2. Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian

Metode penyuluhan pertanian adalah cara-cara penyampaian materi dan program penyuluhan pertanian melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada petani beserta keluarganya. Metode penyuluhan pertanian dapat efektif dan efisien, jika media dan cara penyampaiannya oleh penyuluh dapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan keluarganya. Metode dan media penyuluhan sedapat mungkin disesuaikan dengan budaya dan adat yang ada di wilayah tugas penyuluh pertanian. Hal ini sangat penting diperhatikan, karena keragaman budaya ikut menentukan keberhasilan program penyuluhan di tingkat petani. Pada prinsipnya media dan metoda penyuluhan dapat digolongkan sesuai dengan macam-macam pendekatannya seperti diuraikan berikut ini.

Dari Segi Komunikasi

Metode penyuluhan dari segi komunikasi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut.

- 1) Metode komunikasi secara langsung (*direct communication/face to face communication*). Metode ini sering disebut metode tatap muka. Dalam hal ini penyuluh pertanian langsung berhadapan muka dengan petani. Misalnya, obrolan atau diskusi di tempat usaha tani, di rumah, di balai desa, dalam kursus tani (SLPTT/SLPHT), dalam penyelenggaraan suatu demonstrasi, dan lain-lain.
- 2) Metode komunikasi secara tidak langsung (*indirect communication*). Dalam hal ini penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan petani, tetapi dalam menyampaikan pesannya penyuluh pertanian melalui perantara (media). Misalnya, melalui siaran pedesaan (televisi dan radio), melalui surat menyurat (pos dan *email*).

Dari Segi Pendekatan Kepada Sasaran (petani)

Metode pendekatan kepada sasaran lebih ditekankan pada jumlah dan penggolongan sasaran di wilayah binaan penyuluhan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Metode Pendekatan Perorangan

Metode ini menghendaki para penyuluh pertanian dapat berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan petani secara perorangan. Misalnya: kunjungan penyuluh ke rumah petani, ataupun petani berkunjung ke rumah penyuluh atau ke kantor, surat menyurat secara perorangan (pos atau *email*), demonstrasi plot, belajar perorangan, belajar praktek, dan berhubungan melalui telpon.

2) Metode Pendekatan Kelompok

Metode ini menekankan para penyuluh berhubungan dengan kelompok sasaran, misalnya melalui pertemuan di rumah, di saung tani, di balai desa, di kantor dan lain-lain atau melalui perlombaan (lomba asah terampil, lomba kelempen capir), melalui demonstrasi cara/hasil, melalui kursus tani berupa SLPTT/SLPHT, melalui musyawarah/diskusi kelompok tani/temu karya, melalui karya wisata, dan melalui hari lapangan petani (*farm field day*). Pendekatan kelompok merupakan upaya penyuluh untuk mendekati dan berinteraksi dengan individu dalam kelompok yang bertujuan untuk mempermudah proses penyuluhan secara partisipatif.

3) Metode Pendekatan Massal

Metode ini menghendaki para penyuluh dalam menyampaikan pesannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada petani dengan jumlah banyak secara sekaligus. Misalnya, rapat (pertemuan umum), siaran pedesaan melalui radio/TV, pemutaran film/slide, penyebaran bahan tulisan seperti brosur, leaflet, folder, booklet dan sebagainya, serta pemasangan poster, spanduk, dan pertunjukan kesenian.

Dari Segi Golongan Indra Penerima

- 1) Metode penyuluhan pertanian dilakukan dengan jalan memperlihatkan berbagai objek. Dalam hal ini pesan oleh penyuluh disampaikan melalui indera penglihatan. Misalnya: pesan yang tertulis, pesan yang bergambar, pesan yang terproyeksi: seperti film/slide tanpa penjelasan vocal/bisu.
- 2) Metode penyuluhan pertanian yang disampaikan melalui pendengaran. Dalam hal ini pesan dari penyuluh diterima oleh petani melalui indera pendengaran. Misalnya, siaran pedesaan melalui radio/TV, hubungan telpon, pidato, ceramah, dan rapat.
- 3) Metode yang disampaikan melalui beberapa macam alat indera secara kombinasi. Dalam hal ini pesan diterima oleh petani bisa melalui pendengaran, penglihatan, perabaab, penciuman, ataupun pengecapan secara sekaligus. Misalnya, demonstrasi, peragaan dengan penjelasan, dan lain-lain.

Di samping sebagai fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan pertanian berperan juga sebagai penyebarluasan informasi yang membutuhkan proses komunikasi penyuluhan. Henuk dan Levis (2005) seperti dikutip Pertiwi dan Saleh (2010) menyebutkan bahwa komunikasi penyuluhan berkaitan dengan bagaimana melakukan komunikasi dengan petani-petani kecil dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, agar pesan yang disampaikan melalui komunikasi penyuluhan dapat diterima dengan baik, diserap dan selanjutnya diterapkan dalam usaha tani mereka, sehingga petani itu menjadi tahu, mau dan mampu meningkatkan kesejahteraannya dan mereka dapat hidup sejahtera sesuai dengan potensi sumber daya alam di sekitarnya.

Metode dan teknik penyuluhan pertanian secara kualitas dan kuantitas setiap saat dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini dapat terjadi, karena pola perkembangan pengetahuan masyarakat (petani) pada komunikasi dan informasi pertanian terus meningkat searah dengan peningkatan informasi teknologi, baik itu melalui media elektronik (radio, TV, dan internet) maupun media cetak (koran, majalah dan brosur serta leaflet). Sejarah menjelaskan bahwa peran penyuluhan pembangunan setelah revolusi hijau, tidak menghasilkan kesejahteraan bagi petani kecil, sehingga struktur komunikasi yang dikembangkan cenderung diganti dari model-model yang mengikuti struktur komunikasi “guru-murid”/top down, berkembang ke arah pola komunikasi *dyadic* dan menjadi struktur komunikasi “petani sebagai partner.” Artinya, kegiatan komunikasi penyuluhan berkembang menjadi “saling belajar” dan karena itu fungsi penyuluh lebih difokuskan pada fasilitator.

Penelitian Sumardjo (1999) di Jawa Barat seperti dikutip Saleh (2008), mengungkapkan bahwa pelaksanaan penyuluhan pembangunan dengan pendekatan *relational* dan *convergence* lebih menempatkan martabat petani secara lebih layak. Dengan pendekatan ini keberadaan petani dengan aspek kepentingan dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai, sehingga lebih mendorong terjadinya partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa penyuluhan dengan pendekatan model dialogis dan dengan model komunikasi konvergen lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian petani dibanding dengan model penyuluhan yang sentralistik/top down dengan model komunikasi yang linier.

3. Perencanaan Program Penyuluhan

A. Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat

diterima secara umum. Perencanaan program penyuluhan bertujuan untuk memudahkan penyuluh pertanian dalam melakukan penyuluhan dalam memberdayakan petani. Berikut ini adalah beberapa pengertian atau batasan perencanaan tersebut .

- 1) Perencanaan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya perencanaan terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992: halaman berapa).
- 2) Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sa.id dan Intan, 2001: halaman berapa).
- 3) Perencanaan sebagai salah satu alat analisis kebijakan (*planning as policy analysis*) yaitu, tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004: halaman berapa?).

Perencanaan, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah hipotesis yang dibuat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu didasarkan atas data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya.

Menurut Mosher (1987), seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada memulai yang baru. Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980) dalam Khairuddin (1992), antara lain sebagai berikut.

- 1) Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) perencanaan jangka pendek, (b) perencanaan jangka menengah, dan (c) perencanaan jangka panjang.
- 2) Dari segi luas lingkungannya, perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar

keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c) perencanaan lokal, misalnya perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).

- 3) Dari segi bidang kerja yang dicakup, perencanaan dapat dibedakan menjadi perencanaan industrialisasi, perencanaan agraria (pertanahan), perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan pertanian, perencanaan pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
- 4) Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan dapat dibedakan menjadi (a) perencanaan haluan (*policy planning*), (b) perencanaan program (*program planning*) dan (c) perencanaan langkah (*operational planning*).

B. Program Penyuluhan

Tujuan penyuluhan sebaiknya disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh petani dalam usaha taninya dan telah disusun dalam bentuk program penyuluhan yang disesuaikan dengan materi penyuluhan dan disampaikan secara efektif dan efisien melalui media penyuluhan. Seorang penyuluh pertanian dalam melakukan penyuluhan hendaknya didasarkan pada program penyuluhan yang telah disusun bersama dengan petani.

Slamet (2001) menjelaskan bahwa, program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Program penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan. Keterpaduan mengandung maksud bahwa program penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan program pertanian penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan kesinergian yaitu bahwa program penyuluhan pertanian pada setiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian semua program penyuluhan pertanian selaras dan tidak bertentangan antara program penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem

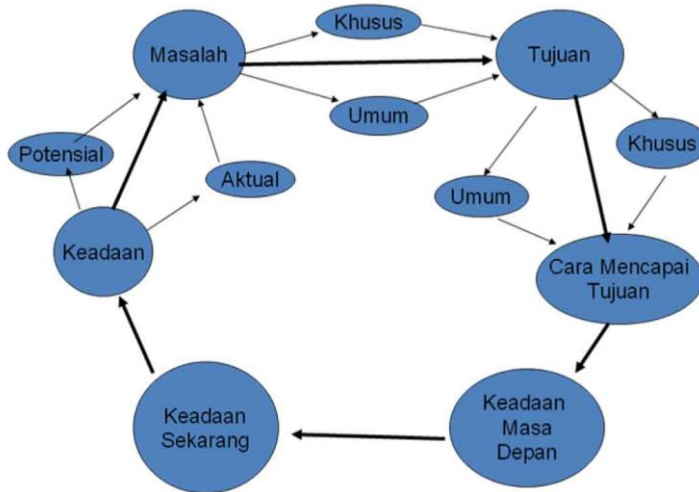
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) Pasal 23 ayat 1 mengamanatkan bahwa program penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Ayat 2 mengamanatkan bahwa program penyuluhan pertanian terdiri atas program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan propinsi, dan program penyuluhan nasional. Agar program penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan, penyusunan program penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), maka program penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita (*local wisdom*) yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansi terkait.

Program penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut: (1) belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan; (2) naskah program penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (3) keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas/instansi, baik di propinsi maupun kabupaten/kota; (4) program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait; dan (5) penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas (kurang partisipatif).

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 Pasal 26 pada ayat 3 mengamanatkan bahwa penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Metode penyuluhan partisipatif didasarkan pada masalah dan kebutuhan petani dengan mengikutsertakan petani dalam merumuskan program penyuluhan sesuai potensi sumber daya lokal di sekitar petani. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan dilakukan secara partisipatif dan bertanggung gugat antara penyuluh, petani dan pemerintah pada semua

tingkatan guna mendukung program pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Penyusunan program penyuluhan pertanian dapat dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Slamet, 2003)

Penyusunan program penyuluhan, perikanan, dan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik, jika semua unsur-unsurnya telah disusun dan ditulis secara lengkap, sistematis, dan teratur. Tujuan dituliskannya penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai arah, pedoman, dan tujuan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- 2) Membangun kesediaan dan kesiapan para penyuluh perikanan pelaku utama dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- 3) Mengatur pendayagunaan tenaga, peralatan, sarana dan prasarana, anggaran/dana, serta sumber-sumber potensi sumber daya alam yang ada.
- 4) Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif.
- 5) Menjadi acuan dasar bagi para penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk menyusun rencana kerja penyuluhan.

Unsur-unsur yang penting dalam penyusunan program penyuluhan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 25 tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1) **Keadaan**

Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktifitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku serta tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usahadi wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional). Pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Potensi usaha menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agro ekosistem setempat, sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- b) Produktifitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha persatuan unit usaha saat ini (faktual maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- c) Lingkungan usaha yang menggambarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha (agroinput, pascapanen, pengolahan distribusi, dan pemasaran) serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
- d) Perilaku yaitu kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi usaha (teknologi usaha hulu, usaha , dan teknologi usaha hilir).
- e) Kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha menggambarkan keperluan akan perlindungan, kepastian, kepuasan yang dapat menjamin terwujudnya keberhasilan melaksanakan kegiatan usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2) Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga, dan lingkungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuannya itu: SMART: *Specific* (khas); *Measurable* (dapat diukur); *Actionary* (dapat dikerjakan/dilakukan); *Realistic* (Realistis); dan *Time Frame* (memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: *Audience* (khalayak sasaran); *Behavior* (perubahan perilaku yang dikehendaki); *Condition* (kondisi yang akan dicapai); dan *Degree* (derajat kondisi yang akan dicapai).

3) Permasalahan

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
- b) Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk benih/bibit atau modal.

Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan atau hirarki sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut,

- a) Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha.
- b) Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktifitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektifitas, dan efisiensi pelaku usaha.
- c) Apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi, dan inovasi untuk pemecahan masalah. Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (*impac point*) dan teknik pemeringkatan masalah lainnya.

4) Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) pelaku utama dan pelaku usaha.
- b) Ketersedian teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian;
- c) Tingkat kemampuan (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) penyuluh pertanian).

- d) Situasi lingkungan fisik sosial dan budaya yang ada.
- e) Alokasi pembiayaan yang tersedia.

Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur SIADIBIBA (5W + 1H), yaitu sebagai berikut.

Siapa yang akan melaksanakan?

Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?

Berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas)?

Berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dan lain-lain)?

Bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?

Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab pelaksanaan, dan pihak terkait. Format penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya program penyuluhan itu disusun sebagai arah pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pada bab pendahuluan ini diharapkan penyuluh dan pelaku utama serta pemerintah memahami pentingnya program penyuluhan dalam menguraikan dan memecahkan masalah yang dihadapi selama pelaksanaan usaha tani. Lebih ditekankan penjelasan kondisi permasalahan lokal yang sering dialami pelaku utama dan pelaku usaha.

Bab II Penetapan Keadaan Wilayah

Pada Bab ini dijelaskan mengenai deskripsi wilayah, atau gambaran keadaan umum wilayah kerja dan data potensial/aktual wilayah kerja, kebijakan pemerintah dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Misalnya, perbankan, koperasi, pasar, dan yang lebih penting adalah anggaran penyuluhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Bab III Perumusan Masalah

Bab perumusan masalah ini menguraikan berbagai masalah umum dan khusus yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha, baik masalah sumber daya alam, sumber daya manusia yang telah diidentifikasi dari aspek budaya, sosial, ekonomi maupun teknis. Masalah yang dirumuskan harus bersifat spesifik sesuai dengan permasalahan yang hadapi petani dan keluarganya.

Bab IV Penetapan Tujuan

Pada bab ini dirumuskan tujuan umum dan tujuan khusus dari hasil perumusan masalah umum dan masalah khusus yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Tujuan hendaknya lebih mencerminkan potensi anggaran yang akan membiayai pelaksanaan tujuan penyuluhan, sehingga tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun secara bersama pada perencanaan program penyuluhan di setiap tingkatan. Oleh karena itu penetapan tujuan dalam penyusunan program penyuluhan perlu memperhatikan indikator pencapaian tujuan, sasaran yang akan dituju, indikator kinerja dari yang melaksanakan tujuan program penyuluhan tersebut.

Bab V Penetapan Cara Mencapai Tujuan

Pada bab ini diuraikan upaya pemecahan masalah umum dan masalah khusus yang dijelaskan melalui rencana kegiatan dan rencana aksi dalam bentuk tabel perencanaan kegiatan. Tabel kegiatan ini dapat dirumuskan secara bersama antara penyuluh dengan petani.

Bab VI Penutup

Pada bab penutup diuraikan berbagai kendala, tantangan, peluang, dan kekuatan dalam penyusunan program penyuluhan serta dapat menyimpulkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program penyuluhan sesuai dengan potensi lokal.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program penyuluhan adalah suatu pedoman untuk memberikan arah, petunjuk, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab antara pelaku utama/pelaku usaha, penyuluh, dan pemerintah yang disusun secara tertulis, lengkap, dan sistematis yang berisi tentang keadaan wilayah, permasalahan pelaku utama dan pelaku usaha, tujuan yang akan dicapai, dan cara mencapai tujuan dalam rangka pemecahan masalah pelaku utama dan pelaku usaha.

C. Implikasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Indonesia

Visi dan misi penyuluhan pertanian perlu direformulasi dengan lebih jelas, yang menempatkan petani dan usaha tani sebagai sentral dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanistik dan demokratis, yaitu

melihat petani sebagai manusia yang berpotensi, yang dihargai untuk dikembangkan kemampuannya menuju kemandiriannya.

Visi dan misi kelembagaan penyuluhan perlu direorientasi untuk mengembalikan tujuan penyuluhan itu dalam memberdayakan petani sebagai pelaku utama, sehingga mereka lebih mampu dan lebih termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya secara mandiri dan tidak tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan golongan tertentu atau pihak lain dalam mengembangkan usahataniannya.

Slamet (2001) menjelaskan implikasi kebijaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia, berdasarkan periode perkembangan pelaksanaan penyuluhan sebagai berikut.

1) Periode Sebelum Tahun 1986

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terkoordinir oleh seorang kepala BPP dengan pendekatan latihan dan kunjungan (Laku) sebagai penggerak inovasi. PPL yang jumlahnya relatif memadai dan berada pada rata-rata usia yang masih energik, telah menjadi motivator terwujudnya swasembada beras. Pola penyuluh menangani multi komoditi (polivalen) nampaknya pada masa itu dinilai masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu yang memang belum terbiasa dengan spesifikasi dalam profesi.

Dibandingkan dengan periode tahun sesudah 1986, periode ini dapat dinilai merupakan periode yang paling efektif bagi kegiatan penyuluhan dengan pola pendekatan pembangunan pertanian yang sentralistis (*top down*), dalam realisasinya lebih mengutamakan kepentingan pencapaian tujuan pemerintah pusat, yaitu tercapainya swasembada pangan nasional. Periode ini ditandai dengan publikasi tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Namun swasembada beras nasional tersebut tidak bertahan lama. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator nyata sebagai kelemahan pendekatan yang sentralistik, yang tidak mengutamakan pendekatan petani dengan pengelolaan usaha taninya sebagai sentral dalam pembangunan pertanian. Petani hanya ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai swasembada pangan nasional. Terbukti ketika swasembada tersebut telah tercapai, ketahanan pangan rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan masih dibayangi ancaman rawan pangan, karena tidak terkendalinya harga sarana input (sarana produksi) dan harga produksi pertanian, serta melemahnya keswadayaan petani.

Pengorganisasian penyuluhan pertanian pada masa ini, dibandingkan dengan masa sesudahnya dapat dinilai telah menempatkan penyuluhan menjadi kondusif sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Telah terjadi perubahan yang nyata pada perilaku petani, dari tidak menerapkan teknologi maju pertanian seperti pupuk dan obat-obatan menjadi terbiasa

menerapkan, bahkan sampai pada tingkat bila tidak menerapkan teknologi tersebut ada rasa bersalah dalam dirinya.

Pendekatan penyuluhan pada masa itu masih kurang kondusif bagi terwujudnya kemandirian petani, karena inovasi yang diterapkan oleh petani cenderung dianjurkan oleh penyuluh, sehingga menghasilkan petani yang tergantung pada aparat dalam pengelolaan usaha taninya. Dalam kondisi seperti ini, kinerja penyuluh dan komponen-komponen penyuluhan lainnya (terutama kesinambungan inovasi) menjadi sangat menentukan kinerja pertanian.

2) Periode Tahun 1986-1991

Tahun 1986-1991 pengorganisasian penyuluhan dan peran penyuluh diubah tidak polivalen lagi. Penyuluh yang semula berada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dibagi lagi tugasnya sesuai dengan bidang tugas monovalen. Penyuluh selanjutnya menjadi bagian dari dinas-dinas subsektoral, yakni Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan. Selanjutnya jumlah penyuluh yang menangani bidang pertanian makin berkurang, tetapi dihadapkan pada wilayah tugas yang makin luas.

Penyuluh yang semula mempunyai wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) sekitar satu sampai dua desa, bertambah menjadi tiga sampai empat desa per PPL. Sedangkan penyuluh yang bekerja pada dinas subsektoral, mempunyai wilayah kerja yang sangat luas, yang semula satu-dua desa, pada masa ini menjadi satu kecamatan, sehingga terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan penyuluhan yang efektif. Beberapa kelemahan yang muncul kemudian adalah sebagai berikut.

- a) Kelompok binaan penyuluh menjadi semakin terbatas, yang semula sekitar 16 wilkel karena jangkauan geografis dan sosiologisnya makin luas menjadi menurun sekitar tinggal 5-8 kelompok saja yang dapat "dibina" secara relatif intensif oleh PPL.
- b) Kesinambungan inovasi melalui LAKU (latihan dan kunjungan) juga menjadi kurang intensif. Adanya keragaman komoditi akan membutuhkan intensitas dan keragaman materi penyuluhan (inovasi) yang makin tinggi pula.
- c) Petani belum siap menghadapi spesifikasi dalam keprofesian penyuluh seperti itu, yang dipahami petani selama ini adalah PPL itu melayani penyuluhan secara polivalen.
- d) Kegiatan penyuluh lebih banyak terbebani oleh proyek yang bersifat fisik dan target penyelesaian suatu proyek. Kenyataannya hal ini sulit untuk dilaksanakan dengan konsep penyuluhan yang menerapkan falsafah dasar penyuluhan.

3) Periode Tahun 1991-1996

Pada era ini ditandai dengan penyerahan urusan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri dan Mentan Nomor 539/Kpts/LP.120/7/1991 dan nomor 65 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah. Banyak pengamat dan penyuluh berpendapat bahwa pada masa ini terjadi stagnasi atau kemunduran penyelenggaraan penyuluhan pertanian, bahkan sebagian mengatakan sebagai kehancuran penyuluhan pertanian masa ini ditandai dengan dinamika penyuluhan pertanian menurun drastis, lemah, lesu, dan kurang bergairah.

Para penyuluh pertanian mengeluh kehilangan keamanan yang sebelumnya dimiliki dengan penuh kebanggaan atas prestasi dan keberhasilan mencapai swasembada beras. Mereka merasa tercampak karena terpecah-pecah dan terkotak-kotak secara subsektoral. Berubahnya fungsi BPP, berubahnya sistem kerja para penyuluh telah merenggut eksistensi diri, status dan pijakan sosial para penyuluh di masyarakat.

Adanya perbedaan kemampuan dan pemilikan sumber daya pada masing-masing dinas yang bersifat otonom menyebabkan terjadinya bias yang melemahkan kesatuan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Administrasi kepegawaian dikelola secara terpisah oleh masing-masing subsektor, yang menyebabkan perbedaan perlakuan sesama penyuluh dalam karirnya. Penerapan desentralisasi ini masih belum diikuti dengan adanya klarifikasi rincian jenis pembinaan teknis yang jelas. Padahal dalam pelaksanaan desentralisasi ini tugas Deptan sebenarnya adalah memantau dan membina secara teknis kepada daerah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan antara konsep LAKU dengan penerapannya di lapangan karena faktor ketersediaan dana; terjadi penurunan kinerja penyuluh pertanian baik secara kualitas maupun kuantitas; terjadi kerancuan operasional kerja penyuluhan pertanian sehingga ketidakserasian hubungan penyuluh antar sub sektor, yang menyebabkan degradasi penyuluhan pertanian menjadi seolah lumpuh, tidak efektif, dan tidak fleksibel.

4) Periode Setelah Tahun 1996

Diterbitkannya SKB Mendagri dan Mentan nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301/Kpts/LP.120 /4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dirasakan oleh para penyuluh sebagai angin segar, yang memberikan harapan bagi penyuluh untuk kembali berjaya, leluasa berkiprah dalam penyuluhan yang terintegrasi antar sub sektor. Keberadaan BIPP menumbuhkan harapan penyuluh untuk menempatkan penyuluh pada

jati dirinya kembali. Namun, penerapan SKB tersebut masih banyak menghadapi kendala, terutama masih tersisanya kepentingan-kepentingan subsektoral sejalan dengan belum jelasnya pedoman hubungan kerja antar lembaga pendukung pembangunan pertanian di tingkat daerah.

Pada masa era desentralisasi atau otonomi daerah budaya menunggu petunjuk dari atas masih kuat melekat pada aparatur pemerintah. Masih banyak aparat yang belum memahami makna desentralisasi sebagai suatu kondisi yang memerlukan sikap pro-aktif, yaitu kurang memahami bahwa asas desentralisasi pada dasarnya memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan, berpikir dan berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat hukum yang diterima oleh masyarakat. Kendala lainnya adalah terjadinya tarik-menarik kedudukan penyuluh antara dinas subsektoral pertanian dengan BIPP. Dinas subsektoral yang telah merasakan manfaat keberadaan penyuluh dalam mendukung secara langsung dan penuh atas proyek-proyek pertanian, serta telah dijadikan andalan di lapangan ternyata merasakan sangat kehilangan dan masih ingin mempertahankan keberadaan penyuluh dalam lingkungan dinas tersebut.

Pengenalan masalah dan evaluasi kegiatan dinas-dinas di lapangan menjadi sangat melemah karena kelangkaan tenaga yang mampu menggantikan peran tenaga penyuluh di dinas tersebut. Keberadaan BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) sebagai tali pengikat dan wadah para penyuluh masih terkendala oleh status kepegawaian yang mendua, terutama dalam penggajian dan status kepegawaiannya yang masih berada di instansi dinas subsektor tersebut.

Keberadaan seksi penyuluhan di masing-masing dinas subsektoral paling merasakan dampaknya, apakah keberadaan seksi ini masih perlu dipertahankan ataukah dihapuskan saja? Menjadi pertanyaan yang belum terjawab di lapangan. Kalau pada periode sebelumnya terjadi ketidakserasian antar penyuluh karena terkotak-kotak secara subsektoral, yang terjadi pada masa ini belum adanya keserasian antara kegiatan dinas dengan kegiatan penyuluhan di bawah koordinasi BIPP.

Sebenarnya hal di atas terjadi karena belum jelasnya mekanisme kerja antara penyuluh dengan dinas. Hal ini menyangkut masalah kelembagaan penyuluhan di daerah yang memerlukan kejelasan norma hubungan kerja dan ketegasan tentang rentang kendali koordinasi yang sinergis antara BIPP, Sekdal Bimas Tingkat I, dan dinas-dinas subsektoral di Daerah Tingkat II. Formulasi tentang visi dan misi penyuluhan pertanian untuk meningkatkan peran penyuluh untuk kepentingan petani, yaitu menempatkan petani dan usaha tani sebagai sentral melalui pendekatan yang lebih humanistik dan demokratis dengan melihat petani sebagai manusia

yang berpotensi dan perlu dihargai sesuai dengan potensi dirinya untuk dikembangkan kemampuannya menuju kemandirian secara berkelanjutan.

Reorientasi visi dan misi kelembagaan penyuluhan perlu diperbaiki kembali, yaitu meningkatkan kinerja organisasi penyuluhan dalam mengembangkan dan memberdayakan petani, sehingga petani lebih mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya secara mandiri dan tidak tersubordinasi oleh kepentingan pihak lain dalam mengembangkan usaha taninya.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, terarah, efektif, dan efisien serta produktif yang memerlukan reorientasi, yaitu: (1) dari pendekatan instansi ke pengembangan kualitas kinerja individu penyuluh; (2) dari pendekatan *top down* ke *bottom up*; (3) dari hirarki kerja vertikal ke horizontal; (4) dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis; dan (5) dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan. Hal ini membutuhkan peran penyuluh sebagai pemegang tombak pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan mandiri.

5) Periode Otonomi Daerah (Era Reformasi 1998)

Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan kebijakan ini berdampak pada pembangunan. Kini pembangunan daerah bertumpu pada kemampuan sendiri untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak, restribusi dan lain-lain. Di banyak daerah, pertanian masih menjadi *prime mover* untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam kelembagaan penyuluhan pertanian, sehingga masing-masing kabupaten mempunyai versi dan kebijakan yang berbeda, dalam hal ini menangani para penyuluh pertanian dan kelembagaannya.

Di era otonomi daerah adalah momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dengan berlakunya peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka semua urusan penyelenggaraan penyuluhan pertanian diserahkan kepada pemerintah daerah otonom. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan ketenagaan, program, menejemen, kerjasama dan anggaran. Penggunaan wewenang ini oleh pemerintah daerah di lapangan ternyata banyak variasi dan ragamnya.

Terjadinya perubahan dan keragaman kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan gambaran respon pemerintah kabupaten/kota dalam menerjemahkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, khususnya yang diatur dalam PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Perintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Penafsiran yang berbeda terhadap peraturan tersebut melahirkan kebijakan berbeda-beda di setiap kabupaten/kota.

Kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten/kota terhadap kelembagaan penyuluhan di era otonomi daerah saat ini ada yang berdiri sendiri bahkan dimekarkan kewenangannya dan ada yang menggabungkan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian ke dalam Dinas Lingkup Pertanian dalam berbagai bentuk, seperti: Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, UPTD, Subdin, dan lain-lain. Dengan adanya variasi kelembagaan ini, maka bentuk kelembagaan penyuluhan dan peran penyuluh juga mengalami sedikit perubahan, namun masih dalam kerangka menunjang kegiatan penyuluhan pertanian yang merupakan sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani dan nelayan beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian, agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian,

Di era otonomi daerah penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban melakukan penyuluhan pertanian dengan baik agar mampu memenuhi hak azasi bagian terbesar penduduk Indonesia yang hidup sebagai petani. Melalui penyuluhan pertanian masyarakat tani, dapat ditingkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya serta integritas moralnya untuk meningkatkan kesejahteraannya dan derajatnya diantara masyarakat-masyarakat lainnya. Pembangunan pertanian di daerah membutuhkan penyuluh untuk mendidik petani agar mengadopsi teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Dengan cara ini penyuluh pertanian membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penyuluh pertanian perlu mengembangkan program penyuluhan yang sesuai dengan potensi daerah dan permintaan pasar untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat.

Pada masa desentralisasi penyuluh pertanian sedapat mungkin menjadikan petani sebagai subjek dan mitra dalam merencanakan dan mengimplementasikan program penyuluhan di wilayah kerjanya. Petani merupakan subyek dari pelaksanaan program pembangunan pertanian, karena petani adalah pelaksana dari semua aspek pengelolaan pertanian sedangkan penyuluh dapat bersifat sebagai fasilitator, motivator dan

dinamisator pelaksanaan penyuluhan. Pada aspek mitra, petani dan penyuluh pertanian perlu mengembangkan sistem penyuluhan partisipatif, yang secara bersama-sama membangun pertanian berdasarkan permasalahan di tingkat petani dengan menentukan tujuan dan alternatif pemecahan masalah berdasarkan potensi wilayah dan kemampuan petani.

Kementerian Pertanian RI (2011) menjelaskan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian di era reformasi dan otonomi daerah didasarkan pada hal-hal berikut ini.

1) Prinsip Otonomi dan Desentralisasi

Memberikan kewenangan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk menetapkan sendiri penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan kondisi daerah kabupaten/kota, dan membawa kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian didasarkan atas kebutuhan spesifik lokalita serta dalam penyelenggaraannya menjadi kewenangan daerah otonom.

2) Prinsip kemitrasejajaran

Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan atas kesetaraan kedudukan antara penyuluh pertanian dengan petani, penyuluh pertanian dengan pelaku agribisnis lainnya, dan petani dengan pelaku agribisnis lainnya.

3) Prinsip demokrasi

Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan sikap saling menghargai dan mengakomodasi berbagai pendapat dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian.

4) Prinsip keterbukaan

Memberikan landasan bahwa dalam penyuluhan pertanian semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna tumbuhnya rasa saling percaya dan kepedulian yang besar.

5) Prinsip keswadayaan

Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian diselenggarakan atas dasar kemampuan menggali potensi diri sendiri, baik dalam bentuk tenaga, dana maupun material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

6) Prinsip akuntabilitas

Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus dapat dipertanggung jawabkan kepada petani, pelaku agribisnis lainnya, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

7) Prinsip integrasi

Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan

lainnya, yang secara sinergi diselenggarakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.

8) Prinsip keberpihakan

Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan serta aspirasi petani.

BAB 5

PERAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Peran Penyuluhan Pertanian

Efektifitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditentukan oleh integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara seluruh sistem dalam penyelenggara penyuluhan. Keberhasilan penyuluhan pertanian pada era tahun 1984 dibandingkan dengan perjalanannya pada kurun waktu tahun 1984–2006 menjadi bahan untuk mengkaji kembali perlunya seluruh elemen dalam sistem penyuluhan berjalan sinergis mulai dari pusat sampai pelaksana di lapangan (petani). Keterlibatan aktif petani secara utuh sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan membangun kemampuan petani dalam menghadapi dan menacari alternatif pemecahan masalah, tantangan dan kendala dalam berusaha tani.

Sektor pertanian hingga kini masih memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, baik pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Peran strategis sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi antara lain: penyedia pangan bagi penduduk Indonesia, penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia bahan baku industri, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan dan perbaikan SDM pertanian melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian (Deptan, 2004).

Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluh pertanian dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat dengan instansi terkait. Pada pelaksanaan program Bimas penyuluhan pertanian yang dilaksanakan terkesan dilakukan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa, dan biasa. Petani dipaksa melakukan teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya.

Pada era dicanangkannya revitalisasi penyuluhan pertanian, pendekatan dari atas tidak relevan lagi, petani dan keluarganya diharapkan mengelola usaha taninya dengan penuh kesadaran, melakukan pilihan-

pilihan yang tepat dari alternatif yang ada melalui bantuan penyuluh pertanian dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, petani yakin akan mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa dalam satu sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi pada intinya tujuan mulia penyuluhan pertanian sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia tidak dapat tercapai apabila hanya dilakukan sepihak karena prinsip penyuluhan pertanian adalah bekerja bersama sasaran (klien) bukan bekerja untuk sasaran.

Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan harus sesuai dengan program penyuluhan pertanian untuk memberikan arahan, pedoman, dan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan. Kegiatan penyuluhan pertanian akan dihadapkan pada kemampuan untuk mengolah tantangan, peluang, masalah dan kendala pada proses desiminasi teknologi yang disampaikan. Kesatuan arah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang terintergarasi dengan baik antara penyuluh pertanian, pelaku usaha dan lembaga pendukung penyuluhan akan mampu memberikan perbaikan-perbaikan mendasar ekonomi petani menuju terciptanya kesejahteraan keluarga petani.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dikatakan berhasil jika melibatkan masyarakat dalam: (1) proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, (2) keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, (3) keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan, (4) bertanggung jawab dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan pertanian untuk kepentingan bersama, dan (5) ikut serta dalam memelihara lingkungan pertanian sebagai aset untuk masa depan. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pertanian, yaitu memposisikan masyarakat sebagai salah satu penentu dalam perencanaan, pelaksanaan dan sebagai penerima manfaat program pembangunan. Pada beberapa dekade terakhir, di berbagai negara termasuk di Indonesia mulai menerapkan model Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam implementasi perencanaan pembangunan pertanian (termasuk penyuluhan). Paradigma pembangunan yang partisipatif ini nampaknya memiliki perbedaan ideologi jika dibandingkan dengan paradigma yang sebelumnya sangat populer yaitu rekayasa sosial (social engineering).

Peran penyuluh dalam membangun pertanian modern, antara lain: (1) sebagai peneliti, yaitu mencari input teknologi pertanian yang dapat digunakan petani untuk mengembangkan usahatannya, (2) sebagai pendidik, yaitu meningkatkan pengetahuan atau memberi informasi kepada petani, sehingga menimbulkan semangat dan kegairahan petani untuk mengelola usahatannya secara efektif dan efisien, dan (3) mengembangkan sikap keterbukaan dan bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Hariadi (2006) menyatakan bahwa, penyuluh harus berperan menggugah minat masyarakat untuk lebih giat belajar dengan menggunakan berbagai metoda belajar, media penyuluhan dan teknik penyuluh. Pengetahuan dan keterampilan tersebut harus dapat diterapkan penyuluh agar masyarakat berminat untuk mengadopsi teknologi baru pada penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan sebagai bentuk keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat, sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

University of Arkansas Division of Agriculture (2006), menguraikan tahapan penyuluhan pertanian secara partisipatif dalam memberdayakan masyarakat tani, meliputi: (1) penyuluh perlu menentukan kebutuhan program dengan memantau teknologi dan masalah yang berkembang, (2) mengembangkan dan menyampaikan tujuan program penelitian berbasis pendidikan, (3) menetapkan tujuan dan sasaran program penyuluhan, (4) melakukan konfirmasi dengan masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan, (5) mengidentifikasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran dan (6) melaksanakan evaluasi rencana program penyuluhan dengan melibatkan relawan pada setiap pelaksanaan evaluasi program penyuluhan.

Peran penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat sasaran adalah mengembangkan kebutuhan untuk perubahan berencana, menggerakkan dan memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam merencanakan perubahan sesuai tahapan pembangunan pertanian. Pemberdayaan dapat menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh dalam menolong warga masyarakat, antara lain: (1) penyuluh mampu mengorganisasikan masyarakat desa dan mengelola kelompok tani, (2) penyuluh mampu mengembangkan sumberdaya manusia dan memberi makna baru pada pengembangan kecakapan teknis dan kecakapan manajemen dan (3) penyuluh mampu memecahkan masalah dan mendidik petani dengan jalan memadukan pengetahuan asli mereka dan pengetahuan modern.

Menurut Bryan dan Glenn (2004), terdapat tiga peran utama penyuluh yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) peleburan diri atau bersatu dengan masyarakat sasaran, (2) menggerakkan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan berencana dan (3) memantapkan hubungan sosial dengan masyarakat sasaran.

Sumber daya Manusia (SDM) yang perlu dibangun di antaranya adalah SDM masyarakat pertanian (petani-nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian), agar kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat pertanian dapat meningkat, karena mereka yang langsung melaksanakan segala kegiatan usaha pertanian di lahan usahanya. Hal ini hanya dapat dibangun melalui proses belajar dan mengajar dengan mengembangkan sistem pendidikan non formal di luar sekolah secara efektif dan efisien di antaranya adalah melalui penyuluhan pertanian.

Melalui penyuluhan pertanian, masyarakat pertanian dapat dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian dengan sapta usahatani, penanaman nilai-nilai atau prinsip agribisnis, mengkreasi sumber daya manusia dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah mengubah sikap dan perilaku masyarakat pertanian agar mereka tahu dan mau menerapkan informasi anjuran yang dibawa dan disampaikan oleh penyuluh pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, yang antara lain memerlukan reorientasi sebagai berikut.

- 1) Dari pendekatan instansi ke pengembangan kualitas kinerja individu penyuluh.
- 2) Dari pendekatan *top down* ke *bottom up*.
- 3) Dari hierarki kerja vertikal ke horizontal.
- 4) Dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis.
- 5) Dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan.

Peningkatan wawasan atau keahlian penyuluh perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga kondusif bagi pengembangan potensi diri secara *self development*, yaitu menumbuhkembangkan sikap kemandirian penyuluh dalam mengembangkan dirinya sebagai penyuluh yang semakin profesional. Hal ini menuntut keberpihakan pembangunan pertanian kepada petani perlu menjadi komitmen semua pihak, terutama dalam penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan pertanian tidak hanya sebatas *transfer of technology* tetapi sudah saatnya beralih pada *farmer participation* dan porsi terbesar setiap kebijaksanaan pertanian adalah membangun kemampuan petani (peningkatan kemampuan *leadership*, kualitas hidup dan pemberdayaan petani).

B. Penyuluhan sebagai bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Sejarah mengungkapkan bahwa peran penyuluhan pertanian, setelah revolusi hijau, tidak menghasilkan kesejahteraan bagi petani kecil. Sehingga struktur komunikasi yang dikembangkan cenderung diganti dari model-model yang mengikuti struktur komunikasi “guru-murid”/top down, berkembang ke arah pola komunikasi dyadic dan menjadi struktur komunikasi “petani sebagai *partner*”. Artinya, kegiatan komunikasi penyuluhan berkembang menjadi “saling belajar” dan karena itu fungsi penyuluh lebih difokuskan pada fasilitator untuk memperbaiki petani dan usahataniannya melalui usaha belajar berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi.

Peran penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat hendaknya jangan dijadikan sebagai objek pembangunan saja, melainkan harus dilibatkan sebagai subjek atau mitra pembangunan yang perlu mengalami suatu proses belajar dan mengetahui adanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan kesempatan itu, serta mau bertindak memanfaatkan kesempatan memperbaiki kehidupannya.

Penyuluhan pada beberapa kegiatan pembangunan masyarakat (*community development*) dan penyuluhan *capacity building* (penguatan kapasitas) berubah fungsi sesuai dengan perkembangan SDM-klien/petani. Peran penyuluh dalam hal ini menjadi konsultan yang sarannya meningkatkan kelembagaan masyarakat petani maupun kapasitas SDM-klien.

Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten, sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan lingkungan lebih sehat. Oleh karena itu petani diharapkan aktif mencari, mendapatkan, meminta pendampingan atau layanan akan informasi yang dibutuhkan serta aktif mendatangi penyuluh atau mengontak sumber informasi penyuluhan, sehingga dapat dikatakan, model komunikasi bukan lagi berupa penyuluhan “tetesan minyak” berpola “guru-murid”/top down atau mengandalkan penyuluhan sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan) yang berpola dyadic memadukan kepentingan top down dan bottom up dengan pendekatan komunikasi interpersonal maupun kelompok.

Penyuluhan lebih diarahkan pada peningkatan *capacity building* atau membangun kemampuan masyarakat, guna mendukung pengembangan

masyarakat berkelanjutan. Penyuluhan pertanian dituntut agar mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani, nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk: (1) membantu menganalisis masalah sosial yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan; (2) membantu mereka menemukan masalah; (3) membantu mereka memperoleh pengetahuan dan informasi guna memecahkan masalah; (4) membantu mereka mengambil keputusan, dan (5) membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya.

Pada masa yang akan datang pembangunan nasional diarahkan menuju pada era industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan sistem agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini akan bisa diwujudkan dengan lebih dahulu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama masyarakat pertanian dalam hal ini penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk itu pendidikan petani perlu dilakukan dalam bentuk penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.

Kesinambungan dan ketangguhan petani dalam pembangunan pertanian bukan saja diukur dari kemampuan petani dalam mengelola usahanya sendiri, tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola sumber daya alam secara rasional, efektif dan efisien, berpengetahuan, terampil, cakap dalam membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia, khususnya perubahan pembangunan pertanian. Disinilah pentingnya penyuluhan pertanian untuk membangun dan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Upaya untuk mencapai hal tersebut diperlukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berpedoman pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluh yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan pembiayaan yang memadai pada penyelenggaraan penyuluhan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2006 yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan penyuluhan ini diselenggarakan melalui perencanaan program penyuluhan yang disusun secara partisipatif antara penyuluh dengan petani berdasarkan kegiatan-kegiatan pertanian di wilayah tugas penyuluh pertanian. Proses transfer inovasi teknologi pertanian tersebut dilakukan melalui komunikasi yang efektif dan efisien berdasarkan motivasi penyuluh, kompetensi penyuluh, manajemen kelembagaan penyuluh, dan dukungan dana pada setiap pelaksanaan penyuluhan.

Pelaksanaan penyuluhan akan berhasil dengan baik, jika penyuluh mampu melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan program penyuluhan. Hal ini bermanfaat untuk keberhasilan dan keberlangsungan penyelenggaraan program penyuluhan. Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan program penyuluhan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kondisi lingkungan pertanian dan kondisi lingkungan bisnis pertanian yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengupayakan transfer inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat sasaran dalam bentuk pendidikan non formal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan petani. Peran penyuluhan pertanian didasarkan pada tugas pokok dan fungsi penyuluh dalam mengimplementasikan program penyuluhan yang disusun secara bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Petani dan penyuluh akan bersinergi secara berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya lokal sebagai usaha meningkatkan produksi usaha tani. Pencapaian peran penyuluhan secara sistematis akan berdampak pada perubahan pola pikir petani dalam mengelola usaha tani sesuai dengan kemampuan petani dan potensi sumber daya lokal.

BAB 6

KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian Kinerja Penyuluh Pertanian

Kinerja penyuluh pertanian merupakan salah satu bentuk kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian yang dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi usaha tani berdasarkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani. Kinerja penyuluh pertanian terkait erat dengan peran dari penyuluh dalam mengimplementasikan program-program penyuluhan yang dapat mengubah perilaku petani, agar petani menjadi tahu, mau, dan mampu meninggalkan kebiasaan lamanya dan mengantinya dengan kebiasaan yang baru berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.

Kinerja (*performance*) adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Yuchtman dan Seashore (1967) mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan suatu organisasi yang memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses sumber-sumber daya yang terbatas.

Menurut Gruneberg (1979), kinerja merupakan perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai respons pada pekerjaan yang diberikan kepadanya yang dilihat atas dasar hasil kerja, derajat kerja, dan kualitas kerja. Cardy et al. (1995) menjelaskan bahwa kinerja dipandang sebagai bagian dari fungsi sistem kerja dari karakteristik seorang pekerja (karyawan), karena karakteristik pekerja diasumsikan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja, hal ini didasari pada perbedaan-perbedaan individu dalam melaksanakan pekerjaan sehingga memengaruhi kinerja.

North Carolina Cooperative Extension (2006) menjelaskan bahwa, kinerja penyuluh dapat dilihat dari kemampuan penyuluh mendesain program penyuluhan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: (1) memahami komponen-komponen dasar program pendidikan non formal dan mengembangkan program penyuluhan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, agroekosistem dan potensi sumber daya lokal, (2) mampu mempublikasikan teknologi terapan dan mengkomunikasikan informasi terbaru melalui penyusunan materi penyuluhan yang spesifik lokasi dan (3) mampu menjalin hubungan

kerjasama dengan masyarakat dalam membangun jaringan usaha, jaringan pemasaran yang dinamis dan berkelanjutan.

Kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan masyarakat merupakan hasil kerja penyuluh berdasarkan status kerja, kondisi kerja, kebijakan organisasi, dan motivasi penyuluh dalam mengimplementasikan program penyuluhan yang dilaksanakan melalui kerjasama antara petani dan penyuluh sesuai dengan permasalahan dan keinginan petani, kemampuan agroekosistem serta potensi sumber daya lokal.

Kinerja penyuluh pertanian dalam pemberdayaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: karakteristik penyuluh, kompetensi penyuluh, motivasi penyuluh, dan kemandirian penyuluh dalam merencanakan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi program penyuluhan sesuai dengan kepentingan petani dan usaha taninya.

Karakteristik penyuluh pertanian yang terdiri dari: umur, jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan lingkungan sosial budaya merupakan salah satu unsur pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang dapat menentukan kemampuan penyuluh meningkatkan kualitas kinerja yang baik untuk membantu petani dalam mengelola usahatani berdasarkan perilaku petani.

Menurut Deborah et al., (2002), kompetensi inti (*core competency*) didefinisikan sebagai pengetahuan dasar, sikap, keterampilan dan perilaku yang berperan untuk keunggulan suatu program penyuluhan. Wisconsin Cooperative Extension menyatakan bahwa suatu kompetensi adalah suatu kuantitas yang cukup dari pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab untuk memenuhi tugas atau tujuan tertentu. Missouri Cooperative Extension menyatakan bahwa setiap penyuluh profesional harus memproses kekuatan-kekuatan pribadi, kemampuan sebagai pendidik, kemampuan di dalam teknologi informasi dan sebagai ahli (*expert*) dibidangnya.

Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi adalah “*an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion – referenced effective and/or superior performance in a job or situation.*” Definisi tersebut menjelaskan bahwa, dalam menggunakan konsep kompetensi harus ada “kriteria pembanding” (*criterion reference*) untuk membuktikan bahwa sebuah elemen kompetensi memengaruhi baik atau buruknya kinerja seseorang. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi dan bertahan cukup lama dalam diri manusia.

Motivasi merupakan kondisi yang mendorong, menggerakkan, mengendalikan, membangkitkan usaha, menumbuhkan perasaan, pengambilan prakarsa, dan usaha individu untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Motivasi ini dapat diamati dari perilaku yang dihasilkannya, yaitu: cara atau pola pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan tumbuh, motivasi berprestasi, faktor intrinsik, dan faktor ekstrinsik individu yang akan berdampak pada kepuasan individu terhadap hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Informasi tentang kinerja penyuluh perlu juga untuk mempertahankan motivasi kerja penyuluh.

Penyuluh yang fokus pada prestasi kerja mereka akan berusaha untuk tidak sekedar mempertahankan prestasi tersebut, akan tetapi untuk lebih meningkatkan capaian-capaian yang telah diraih. Prestasi kerja penyuluh yang baik juga berguna bagi supervisor penyuluh, antara lain untuk mempromosikan para penyuluh itu kejenjang yang lebih tinggi, mendapatkan gaji yang lebih besar dan tanggungjawab/wewenang yang lebih luas.

Informasi yang diperoleh dari evaluasi kinerja penyuluh itu dapat juga menunjukkan kelemahan yang masih ada dalam diri penyuluh pada berbagai aspek. Dalam hubungan ini supervisor dapat memotivasi penyuluh untuk memperbaiki diri mereka, apakah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang spesifik penyuluhan, pelatihan teknik pertanian, studi mandiri atau melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu evaluasi kinerja penyuluh pertanian dapat menunjukkan kompetensi penyuluh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi budidaya, harga, akses pasar, dan permodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh. Dalam hubungan ini penyuluh harus memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan melalui metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat.

Kemandirian penyuluh pertanian mengembangkan perencanaan program penyuluhan yang dapat berguna dan bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani, yaitu: (1) kemandirian emosional penyuluh yang ditekankan pada kemampuan penyuluh mengembangkan diri dan tidak tergantung pada orang lain di lingkungannya, (2) kemandirian intelektual penyuluh pertanian ditekankan pada kemampuan pola pikir penyuluh untuk mendapatkan berbagai data dan informasi untuk pengembangan program penyuluhan, (3) kemandirian ekonomi, terarah pada kemampuan suatu entitas dalam menopang kesejahteraan penyuluh, dan (4) kemandirian sosial penyuluh diarahkan pada kemampuan penyuluh menyadari keyakinannya sendiri dalam membina hubungan sosial dengan lingkungan secara adaptif dan berkesinambungan.

Kinerja penyuluh pertanian yang baik, akan berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Perubahan perilaku petani

akan nampak pada peningkatan kompetensi pengelolaan usaha tani dan meningkatnya partisipasi petani mengikuti penyuluhan. Peningkatan kompetensi pengelolaan usaha tani, antara lain: penyediaan sarana produksi, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan, panen, pascapanen dan pemasaran hasil produksi.

Peningkatan partisipasi petani, antara lain: aktif mengikuti pertemuan kelompok tani, berperan aktif pada setiap diskusi kelompok tani, aktif melakukan transfer teknologi pada petani lainnya dan aktif membayar iuran kelompok tani. Penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Penyuluh yang berkinerja baik dapat memosisikan dirinya sebagai motivator, edukator, fasilitator dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Untuk itu penyuluh harus memiliki berbagai kemampuan, antara lain: kemampuan berkomunikasi, berpengetahuan luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani. Kinerja penyuluh ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan penyedia dana publik untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi penyuluh dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Manfaat yang diperoleh dengan diketahuinya kinerja penyuluh pertanian, antara lain: (1) tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, (2) tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing, (3) terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan petani, (4) terwujudnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan dan (5) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah.

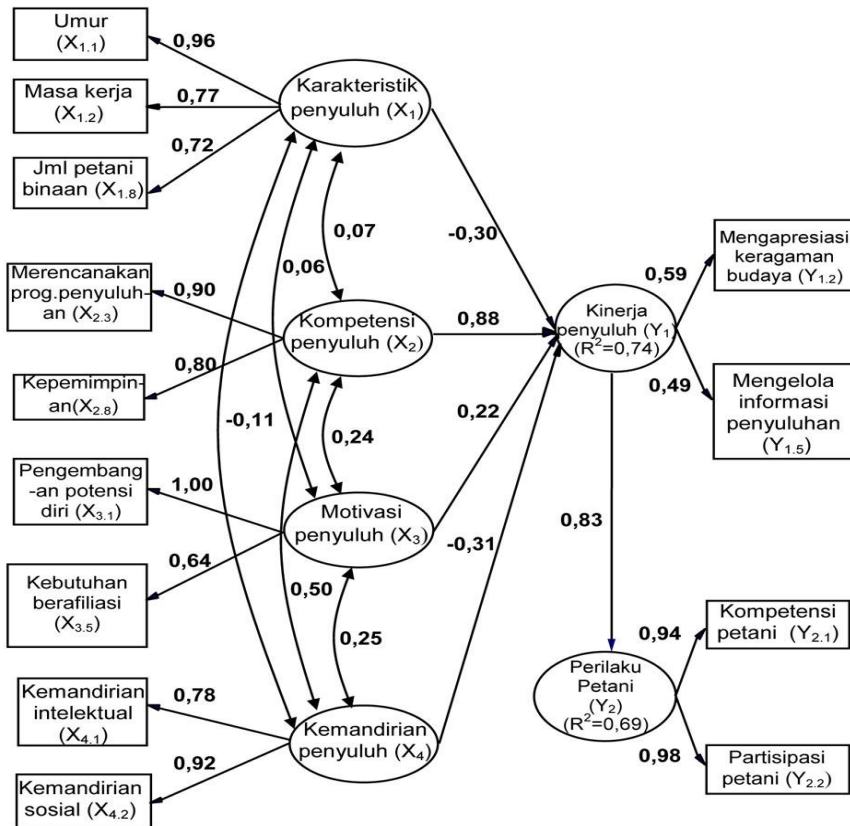
Kinerja penyuluh pertanian perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian. Aktivitas penyuluhan harus diawali dengan penyusunan program, memandu dan memfasilitasi petani melakukan indentifikasi dan analisis wilayah, merumuskan rencana aksi, melaksanakan program aksi dan mengakhirinya dengan mengevaluasi pelaksanaan program penyuluhan.

Berdasarkan hasil penelitian Bahua (2010), kinerja penyuluh pertanian yang terdiri dari kemampuan mengapresiasi keragaman budaya dan kemampuan mengelola informasi penyuluhan dapat mempengaruhi perubahan perilaku petani sebesar 83 persen. Perubahan perilaku petani nampak pada perubahan kompetensi petani sebesar 0,94 satuan (94%) dan sekaligus perubahan partisipasi petani sebesar 0,98 satuan (98%) dengan koefisien determinasi sebesar 69%. Kinerja penyuluh tersebut dipengaruhi oleh karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh pertanian

dengan koefisien pengaruh sebesar 74%. Uraian hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Faktor-faktor internal yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian adalah umur, masa kerja, jumlah petani binaan, kemampuan merencanakan program penyuluhan, kemampuan kepemimpinan penyuluh, pengembangan potensi diri, kebutuhan untuk berafiliasi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial.
- 2) Karakteristik, kompetensi, motivasi, dan kemandirian penyuluh berpengaruh tidak langsung pada perubahan perilaku petani jagung, sedangkan kinerja penyuluh pertanian melalui dimensi mengapresiasi keragaman budaya dan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian berpengaruh langsung pada perilaku petani.
- 3) Derajat hubungan antar peubah karakteristik dan kemandirian penyuluh, motivasi dan kompetensi penyuluh tergolong rendah dan tidak berpengaruh. Derajat hubungan antar peubah kompetensi dan kemandirian penyuluh tergolong tinggi, sedangkan derajat hubungan antar peubah kompetensi dan motivasi penyuluh, serta derajat hubungan antar peubah motivasi dengan kemandirian penyuluh tergolong rendah.
- 4) Kinerja penyuluh pertanian berdampak pada perubahan perilaku petani jagung melalui dimensi kompetensi petani dan partisipasi petani jagung.

Model struktural kinerja penyuluh pertanian dijelaskan pada Gambar 2 melalui hubungan antar peubah dengan analisis Structural Equation Model.



Gambar 2. Model Struktural Kinerja Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian pada Gambar 2 dapat dijelaskan dengan menguraikan pengaruh masing-masing peubah penelitian, sebagai berikut.

1. Pengaruh Karakteristik pada Kinerja Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah karakteristik secara langsung berpengaruh nyata pada kinerja penyuluh pertanian. Hal ini berarti karakteristik penyuluh ikut menentukan baik-buruknya kinerja penyuluh pertanian dengan koefisien pengaruh sebesar -0,30. Pengaruh karakteristik penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian nampak pada baik-buruknya kinerja penyuluh mengapresiasi keragaman budaya dan kinerja penyuluh mengelola informasi penyuluhan. Hal ini mengindikasikan, jika terjadi peningkatan satu satuan karakteristik penyuluh pertanian, akan menurunkan kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya sebesar 0,18 satuan dan sekaligus menurunkan kinerja penyuluh pertanian mengelola informasi penyuluhan sebesar 0,15 satuan.

Menurunnya kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya meliputi kurangnya materi penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal dan kurangnya media penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal. Menurunnya pengelolaan informasi penyuluhan meliputi kurangnya jumlah media penyuluhan, kurangnya penggunaan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi, serta kurangnya penggunaan metode belajar pada setiap penyuluhan. Pengaruh nyata karakteristik penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian disebabkan oleh dimensi umur, masa kerja dan jumlah petani binaan penyuluh pertanian.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh nyata karakteristik penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian dari dimensi umur, masa kerja dan jumlah petani binaan penyuluh pertanian. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Kementerian pertanian dan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluh pertanian dengan memperhatikan umur penyuluh, masa kerja dan jumlah petani binaan. Pada sistem rekrutmen perlu diperhatikan umur calon penyuluh, yang akan mengganti penyuluh yang memasuki masa pensiun. Penyuluh yang masa kerjanya sudah lama perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi pertanian. Sistem penempatan penyuluh perlu diperhatikan dengan menempatkan satu penyuluh pada satu desa, hal ini akan memudahkan penyuluh melayani petani binaannya.

2. Pengaruh Kompetensi pada Kinerja Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah kompetensi berpengaruh nyata pada kinerja penyuluh pertanian. Hal ini berarti kompetensi penyuluh ikut menentukan baik-buruknya kinerja penyuluh pertanian dengan koefisien pengaruh sebesar 0,88. Pengaruh kompetensi penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian tersebut nampak pada baik-buruknya penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya dan pengelolaan informasi penyuluhan. Hal ini mengindikasikan, jika terjadi peningkatan satu satuan kompetensi penyuluh, akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya sebesar 0,52 satuan dan sekaligus meningkatkan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian sebesar 0,44 satuan.

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya meliputi: bertambahnya materi penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal dan bertambahnya media penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal. Peningkatan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian meliputi: bertambahnya jumlah media penyuluhan, meningkatnya

penggunaan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi, serta meningkatnya penggunaan metode belajar pada setiap penyuluhan.

Dimensi peubah kompetensi penyuluh yang berhubungan erat dengan kinerja penyuluh pertanian adalah: (1) kemampuan merencanakan program penyuluhan, meliputi: kemampuan mengumpulkan data sumberdaya dan potensi wilayah kerja, kemampuan merumuskan tujuan program penyuluhan, kemampuan menetapkan masalah petani, kemampuan menetapkan cara mencapai tujuan, kemampuan melaksanakan penyuluhan dan kemampuan mengevaluasi kegiatan penyuluhan, dan (2) kemampuan kepemimpinan penyuluh, meliputi: kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan, kemampuan menerapkan keterampilan memimpin dan kemampuan menumbuhkembangkan kelompok tani.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh nyata kompetensi penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian dari dimensi kemampuan merencanakan program penyuluhan dan kemampuan kepemimpinan penyuluh pertanian. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian yaitu, dengan meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan penyuluh merencanakan program penyuluhan dan manajemen kepemimpinan penyuluh pertanian.

3. Pengaruh Motivasi pada Kinerja Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah motivasi berpengaruh nyata pada kinerja penyuluh pertanian. Hal ini berarti motivasi penyuluh ikut menentukan baik-buruknya kinerja penyuluh pertanian dengan koefisien pengaruh sebesar 0,22. Pengaruh motivasi pada kinerja penyuluh pertanian tersebut nampak pada baik-buruknya penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya dan pengelolaan informasi penyuluhan. Hal ini mengindikasikan, jika terjadi peningkatan satu satuan motivasi penyuluh, akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya sebesar 0,13 satuan dan sekaligus meningkatkan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian sebesar 0,11satuan.

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya, meliputi bertambahnya materi penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal dan bertambahnya media penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal. Peningkatan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian meliputi bertambahnya jumlah media penyuluhan, meningkatnya penggunaan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi, serta meningkatnya penggunaan metode belajar pada setiap penyuluhan.

Dimensi motivasi penyuluh yang berhubungan erat dengan kinerja penyuluh pertanian adalah: (1) pengembangan potensi diri, meliputi: harapan berkesempatan mengikuti pendidikan formal, pelatihan dan melakukan percobaan lapangan teknologi spesifik lokasi dan (2) kebutuhan untuk berafiliasi, meliputi: keinginan untuk diterima orang lain di lingkungan penyuluh tinggal dan bekerja, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk maju dan tidak gagal dan keinginan untuk ikut serta (berpartisipasi).

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh nyata motivasi pada kinerja penyuluh pertanian dari dimensi pengembangan potensi diri dan kebutuhan untuk berafiliasi. Dengan demikian hasil penelitian dapat membantu Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dengan meningkatkan motivasi penyuluh pertanian dari dimensi pengembangan potensi diri dan motivasi kebutuhan untuk berafiliasi melalui peningkatan jenjang pendidikan formal penyuluh, mengikutsertakan penyuluh pada berbagai pelatihan dan perbaikan sistem administrasi lembaga penyuluhan, baik dari segi penilaian kinerja penyuluh, komunikasi dan kerjasama antar penyuluh dalam membantu petani meningkatkan produktivitas usahatannya.

4. Pengaruh Kemandirian pada Kinerja Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah kemandirian berpengaruh nyata pada kinerja penyuluh pertanian. Hal ini berarti kemandirian penyuluh ikut menentukan baik-buruknya kinerja penyuluh pertanian dengan koefisien pengaruh sebesar $-0,31$. Pengaruh peubah kemandirian pada kinerja penyuluh pertanian tersebut nampak pada baik-buruknya penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya dan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian. Hal ini mengindikasikan, jika terjadi peningkatan satu satuan kemandirian penyuluh pertanian, akan menurunkan kinerja penyuluh pertanian dalam mengapresiasi keragaman budaya sebesar $0,19$ satuan dan sekaligus menurunkan kinerja penyuluh pertanian mengelola informasi penyuluhan sebesar $0,15$ satuan.

Menurunnya kinerja penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya, meliputi kurangnya materi penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal dan kurangnya media penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal. Penurunan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian meliputi kurangnya jumlah media penyuluhan, kurangnya penggunaan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi, serta kurangnya penggunaan metode belajar pada setiap penyuluhan.

Dimensi kemandirian penyuluh yang berhubungan erat dengan kinerja penyuluh pertanian adalah: (1) kemandirian intelektual, meliputi kemandirian merencanakan usahatani, kemandirian menentukan lahan

budidaya, kemandirian menentukan cara berproduksi, kemandirian menentukan keputusan pemecahan masalah petani dan kemandirian menentukan pasar untuk pemasaran hasil usahatani dan (2) kemandirian sosial, meliputi kemandirian penyuluh menjaga independensi, kemandirian penyuluh menjaga hubungan dengan sesama petani jagung, kemandirian penyuluh menjaga hubungan dengan kelompok tani di luar petani jagung, kemandirian penyuluh menjalin hubungan dengan kelompok pemimpin dan kemandirian penyuluh mengembangkan strategi adaptasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh nyata kemandirian penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian dari dimensi kemandirian intelektual dan kemandirian sosial, yang berarti penyuluh pertanian sudah mandiri atau tidak memerlukan bantuan dari segi kemandirian intelektual dan kemandirian sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian intelektual penyuluh merupakan bentuk keberhasilan penyuluh dalam mengatasi permasalahan petani sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya sendiri. Selain itu dari segi kemandirian sosial, penyuluh pertanian mampu melakukan interaksi dengan petani, tokoh masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tanpa harus tergantung dan menunggu aksi orang lain dalam melaksanakan program penyuluhan untuk membantu meningkatkan produktivitas usahatani.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah agar dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kemandirian penyuluh perlu diarahkan pada peningkatan dimensi kemandirian emosional dan kemandirian ekonomi penyuluh pertanian, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam membantu petani melaksanakan usahatannya.

5. Pengaruh Karakteristik, Kompetensi, Motivasi, dan Kemandirian pada Kinerja Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh berpengaruh nyata pada kinerja penyuluh pertanian (Y1) dengan koefisien determinasi sebesar 74%. Hal ini berarti keempat peubah bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian (Y1) sebesar 74 persen dan sisanya 26 persen merupakan pengaruh peubah lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Besarnya pengaruh peubah karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian merupakan kontribusi nyata dari beberapa sub peubah/dimensi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh nyata peubah karakteristik penyuluh pada karakteristik penyuluh pertanian ditentukan oleh tiga dimensi, yaitu: umur, masa kerja dan jumlah petani binaan penyuluh. Artinya bertambahnya umur, masa kerja dan jumlah petani binaan penyuluh pertanian, akan menyebabkan kinerja penyuluh pertanian menjadi menurun, sedangkan enam dimensi karakteristik penyuluh lainnya, yaitu: pendidikan formal, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, wilayah tugas, cakupan wilayah kerja penyuluh dan frekwensi interaksi penyuluh dengan petani, dalam penelitian ini memiliki estimasi koefisien bobot faktor kurang dari 0,40 yang tidak nyata pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti keenam dimensi tersebut tidak valid dalam mengukur kinerja penyuluh pertanian.
- 1) Pengaruh nyata peubah kompetensi penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian ditentukan oleh dua dimensi, yaitu: kemampuan merencanakan program penyuluhan dan kemampuan kepemimpinan penyuluh. Artinya meningkatnya kemampuan penyuluh merencanakan program penyuluhan dan meningkatnya kemampuan kepemimpinan penyuluh pertanian, akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, sedangkan sembilan dimensi kompetensi lainnya, yaitu: melakukan aksi sosial, mengapresiasi keragaman budaya, memanfaatkan sumberdaya lokal, mengelola informasi, hubungan interpersonal, menyelenggarakan penyuluhan, manajemen organisasi, profesionalisme dan bidang keahlian dalam penelitian ini memiliki estimasi koefisien bobot faktor kurang dari 0,40 yang tidak nyata pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti kesembilan dimensi kompetensi penyuluh tersebut tidak valid dalam mengukur kinerja penyuluh pertanian.
- 2) Pengaruh nyata peubah motivasi penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian ditentukan oleh dua dimensi, yaitu: pengembangan potensi diri dan kebutuhan untuk berafiliasi. Artinya meningkatnya pengembangan potensi diri dan meningkatnya kebutuhan untuk berafiliasi penyuluh pertanian, akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, sedangkan empat dimensi motivasi penyuluh lainnya, yaitu: pengakuan petani, penghasilan, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk kekuasaan dalam penelitian ini memiliki estimasi bobot faktor kurang dari 0,40 yang tidak nyata pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti keempat dimensi motivasi penyuluh tersebut tidak valid dalam mengukur kinerja penyuluh pertanian.
- 3) Pengaruh nyata peubah kemandirian penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian ditentukan oleh dua dimensi, yaitu kemandirian intelektual dan kemandirian sosial. Artinya meningkatnya kemandirian intelektual dan meningkatnya kemandirian sosial penyuluh pertanian, akan menyebabkan kinerja penyuluh pertanian menurun, sedangkan dua

dimensi kemandirian penyuluh, yaitu: kemandirian emosional dan kemandirian ekonomi dalam penelitian ini memiliki estimasi bobot faktor kurang dari 0,40 yang tidak nyata pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti kedua dimensi kemandirian penyuluh tersebut tidak valid dalam mengukur kinerja penyuluh pertanian.

Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian nampak pada semakin baiknya penyuluh pertanian mengapresiasi keragaman budaya dan pengelolaan informasi penyuluhan (Gambar 2). Meningkatnya apresiasi keragaman budaya oleh penyuluh pertanian meliputi bertambahnya materi penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal dan bertambahnya media penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal, sedangkan peningkatan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian meliputi bertambahnya jumlah media penyuluhan, meningkatnya penggunaan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi, serta meningkatnya penggunaan metode belajar pada setiap penyuluhan.

Pengaruh bersama peubah karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh pada kinerja penyuluh pertanian koefisien determinasinya sebesar 74%, yang berarti pengaruh peubah luar 26% cukup rendah dalam meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. Dengan demikian karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh merupakan faktor internal yang dominan dalam meningkatkan kinerja penyuluh pertanian untuk membantu petani meningkatkan produktivitas usahatani yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien determinasi kinerja penyuluh pertanian sebesar 74% masih dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu: (1) peningkatan pada peubah yang berpengaruh langsung dan nyata, serta bersifat positif pada kinerja penyuluh pertanian, seperti kemampuan merencanakan program penyuluhan, kemampuan kepemimpinan penyuluh, pengembangan potensi diri dan kebutuhan untuk berafiliasi; (2) pengelolaan yang lebih baik pada peubah yang berpengaruh langsung dan nyata tetapi bersifat negatif pada kinerja penyuluh pertanian seperti umur, masa kerja, jumlah petani binaan, kemandirian intelektual dan kemandirian sosial; (3) pengelolaan dan perbaikan pada peubah yang belum memberikan kontribusi nyata pada kinerja penyuluh pertanian, sehingga diharapkan dengan pengelolaan yang lebih baik pada peubah-peubah tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian.

B. Penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian

Kinerja organisasi ditentukan oleh penilaian kinerja individu dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan membandingkan kerja yang telah dilaksanakan seseorang (job related) dengan standar kinerja (performance standard) yang telah ditetapkan. Agar penilaian dapat dilaksanakan secara efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekerja.

Belows (1961) mendefinisikan penilaian kinerja adalah suatu pengukuran periodik atas hasil kerja seorang karyawan pada suatu organisasi, dilakukan oleh atasannya atau seseorang yang ditunjuk untuk mengamati atau menilai prestasi karyawan, contohnya kinerja di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Beach (1970) mendefinisikan penilaian kinerja adalah sebuah penilaian sistematis atas prestasi seorang karyawan dan potensinya untuk pengembangan organisasi. Misalnya: kinerja karyawan tersebut dalam mengembangkan program kerja dan potensi individu itu menyusun tindak lanjut program tersebut.

Menurut Blanchard dan Spencer (1982), penilaian kinerja ialah proses kegiatan organisasi mengevaluasi seorang karyawan. Esensinya, supervisor secara formal melakukan evaluasi terus menerus. Kebanyakan mereka mengacu pada kinerja sebelumnya dan hendak mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika kinerja karyawan tidak memenuhi syarat, maka manajer atau supervisor harus mengambil tindakan, demikian juga apabila kinerja karyawan baik, maka perilakunya perlu dipertahankan. Muchinsky (1993) mendefinisikan penilaian kinerja adalah suatu peninjauan yang sistematis prestasi kerja individu untuk menetapkan efektivitas kerja.

Bittel dan Newsroom (1996) menyatakan bahwa, penilaian kinerja adalah suatu evaluasi formal dan sistematis tentang seberapa baik seseorang melakukan tugasnya dan menjalankan perannya sesuai dengan tujuan organisasi. Barry (1997) menjelaskan bahwa, penilaian kinerja merupakan bentuk tanggungjawab manajemen untuk memastikan karyawan memahami misi dan tujuan organisasi sebagai usaha menanamkan kepercayaan diri dan menunjukkan harapan karyawan didasarkan pada proses manajemen kinerja yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan, yang meliputi: kreativitas, kepercayaan, moral dan motivasi yang dapat memperkuat hubungan komunikasi antara manajer dan karyawan. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) ini pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Amstrong (1998), penilaian kinerja merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mengungkapkan kekurangan dalam bekerja untuk diperbaiki dan kelebihan bekerja untuk dikembangkan, agar setiap

karyawan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu aspek-aspek yang dinilai harus sesuai dengan hal-hal yang seharusnya dikerjakan, sebagaimana terdapat pada deskripsi pekerjaan.

Simamora (1999) menyatakan bahwa, penilaian kinerja adalah proses penilaian hasil kerja yang digunakan manajemen untuk memberikan informasi kepada karyawan secara individual, tentang mutu hasil pekerjaannya dari sudut kepentingan perusahaan. Hwang-Sun Kang (2003) menggunakan kriteria *workload*, *efficiency*, *effectivines* dan *productivity* untuk penilaian kinerja. *Workload* merupakan beban kerja yang berhasil diselesaikan. *Efficiency* menunjukkan perbandingan antara input dan output. *Effectivines* menunjukkan perbandingan antara output dan outcome yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah output diperoleh. *Productivity* menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu.

Belows (1961) dan Beach (1970) memahami bahwa, penilaian kinerja perlu dilakukan periodik dan sistematis pada prestasi seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Penilaian dilaksanakan oleh atasan atau seseorang yang ditunjuk oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Belows (1961) lebih mengarah pada penilaian kinerja individu pada suatu organisasi secara periodik, sedangkan Beach (1970) lebih mengarah pada potensi yang diberikan oleh karyawan dalam pengembangan organisasi.

Blanchard dan Spencer (1982), Muchinsky (1993) serta Bittel dan Newsroom (1996) memiliki pemahaman yang sama tentang penilaian kinerja. Menurut mereka penilaian kinerja adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh organisasi secara sistematis dan formal tentang hasil kerja dari seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi.

Blanchard dan Spencer (1982) lebih menekankan pada evaluasi kinerja karyawan sebelumnya dan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya, hal ini berhubungan dengan penghargaan ataupun sanksi yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Contoh: pemberian penghargaan kenaikan jabatan atau pemberian sanksi penundaan keangkatan. Lain halnya dengan Muchinsky (1993) yang memandang penilaian kinerja dari segi efektivitas kerja dari seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya efektivitas melakukan perencanaan, menentukan prioritas program kerja dan mengimplementasikannya. Bittel dan Newsroom (1996) lebih mengarah pada evaluasi formal tentang seberapa baik seseorang melakukan tugas dan perannya sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Barry (1997) dan Amstrong (1998), penilaian kinerja ialah bentuk tanggungjawab manajemen untuk memastikan karyawan memahami misi dan tujuan organisasi yang difokuskan pada pengungkapan kelebihan dan kekurangan karyawan dalam bekerja. Barry (1997) lebih mengarah pada tanggungjawab manajemen dalam menanamkan kepercayaan diri karyawan untuk memahami misi dan tujuan organisasi. Amstrong (1998) lebih mengarah pada pengungkapan kelebihan dan kekurangan karyawan dalam bekerja. Kelebihan karyawan dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang dilakukan selama pelaksanaan tugasnya.

Simamora (1999) dan Hwang-Sun Kang (2003) memahami bahwa, penilaian kinerja merupakan informasi pihak manajemen kepada karyawan tentang kualitas hasil pekerjaannya, yang penilaiannya didasarkan pada *workload*, *efficiency*, *effectivines*, dan *productivity* dalam pelaksanaan tugas organisasi. Simamora (1999) lebih mengarah pada kepentingan perusahaan, karena karyawan hanya menerima informasi keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan tidak mengetahui sejauh mana kinerja mereka untuk meningkatkan karir diperusahaan. Hwang-Sun Kang (2003) lebih memahami pada efektivitas, efisiensi dan produktivitas karyawan dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan beban kerjanya. Karyawan secara langsung dapat mengetahui kemampuan yang telah mereka hasilkan untuk kemajuan organisasi dan pengembangan karir mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai metode sistematis berdasarkan peraturan dan standar pekerjaan dengan kriteria penilaian *workload*, *efficiency*, *effectivnes* dan *productivity* selama periode tertentu yang dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui prestasi kerja, kontribusi, potensi dan nilai dari pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja sebagai bentuk umpan balik organisasi pada hasil kerja karyawan yang dilaksanakan oleh pimpinan, manajer atau orang-orang yang diberi wewenang sebagai landasan pengembangan misi dan tujuan organisasi.

C. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Ivancevich et al., (1987) mengemukakan bahwa, bagi pihak manajemen kinerja karyawan sangat membantu dalam mengambil keputusan seperti: promosi jabatan, pengembangan karier, mutasi, PHK, penyesuaian kompensasi dan kebutuhan pelatihan. Cherrington (1995) menjelaskan bahwa, tujuan penilaian kinerja antara lain mengidentifikasi kebutuhan latihan (*training*) untuk kepentingan karyawan, agar tingkat kemampuan dan keahliannya pada suatu pekerjaan dapat ditingkatkan dan diintegrasikan pada perencanaan sumberdaya manusia.

Haidee (1995) menjelaskan bahwa, tujuan penilaian kinerja adalah memberikan umpan balik pada karyawan secara reguler untuk menggali prestasi kerja dan memperkuat perilaku karyawan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah pada masa yang akan datang berdasarkan prestasi dan wawasan karyawan tentang tujuan organisasi. Menurut George dan Jones (1996), manfaat penilaian kinerja adalah untuk penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan dan pengembangan karir dan memberikan kesempatan kerja yang adil, sehingga karyawan dapat memperbaiki kinerjanya. Hal ini akan berdampak pada perbaikan perencanaan dan pengembangan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Menurut Gomez (2001), secara administratif organisasi atau perusahaan dapat menjadikan tujuan penilaian kinerja sebagai acuan atau standar di dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan karyawan, termasuk untuk promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi, pemberhentian dan penghargaan atau penggajian. Pengembangannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan keterampilan kerja, termasuk pemberian konseling untuk mengubah perilaku karyawan dengan mengadakan latihan (*training*).

Nawawi (2003) menjelaskan bahwa, tujuan penilaian kinerja adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keahlian yang kurang atau tidak dikuasai karyawan sehingga berpengaruh pada efisiensi, efektivitas dan produktivitasnya dalam bekerja. Hasil tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, baik pada tingkat organisasi, tingkat unit kerja maupun dalam analisis individual.

Ivancevich et al., (1987) dan Cherrington (1995) memandang tujuan dan manfaat penilaian kinerja merupakan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kemampuan dan keahliannya pada suatu pekerjaan serta membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk pengembangan organisasi.

Ivancevich et al., (1987) lebih mengarah pada pihak manajemen dalam membantu merencanakan pengembangan organisasi. Misalnya pengembangan karir karyawan, mutasi, PHK, penyesuaian kompensasi (gaji) dan kebutuhan pelatihan karyawan. Cherrington (1995) lebih mengarah pada integrasi pengembangan kemampuan individu dan perencanaan yang dihubungkan dengan fungsi-fungsi sumberdaya manusia. Misalnya kemampuan dan fungsi SDM pada perencanaan program, implementasi program dan evaluasi program untuk mencapai tujuan organisasi.

Haidee (1995), George dan Jones (1996) menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah bentuk umpan balik pada karyawan secara reguler dalam memaparkan kelebihan dan kekurangan dari kinerja

karyawan. Karyawan dapat mengetahui secara jelas akan kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan pekerjaan untuk memecahkan masalah pada masa yang akan datang sesuai dengan tujuan organisasi. Haidee (1995) lebih mengarah pada umpan balik secara reguler untuk menggali prestasi kerja dan memperkuat perilaku karyawan. George dan Jones (1996) lebih memahami pada kemampuan organisasi merencanakan kebutuhan sumberdaya manusia sesuai kemampuan organisasi. Misalnya perencanaan penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan dan memperbaiki desain pekerjaan.

Gomez (2001) dan Nawawi (2003) memahami tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi keterampilan atau keahlian seorang karyawan, sehingga dapat dijadikan acuan atau standar oleh organisasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan SDM. Gomez (2001) lebih memahami pada acuan atau standar dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan karyawan. Nawawi (2003) lebih mengarah pada informasi tentang kondisi keahlian dari seorang karyawan dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat penilaian kinerja ialah sebagai acuan atau standar di dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan prestasi kerja dan umpan balik organisasi pada kemampuan dan keahlian karyawan. Hal ini dapat membantu pihak manajemen untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas kerja karyawan berdasarkan prestasi dan wawasannya pada tujuan organisasi.

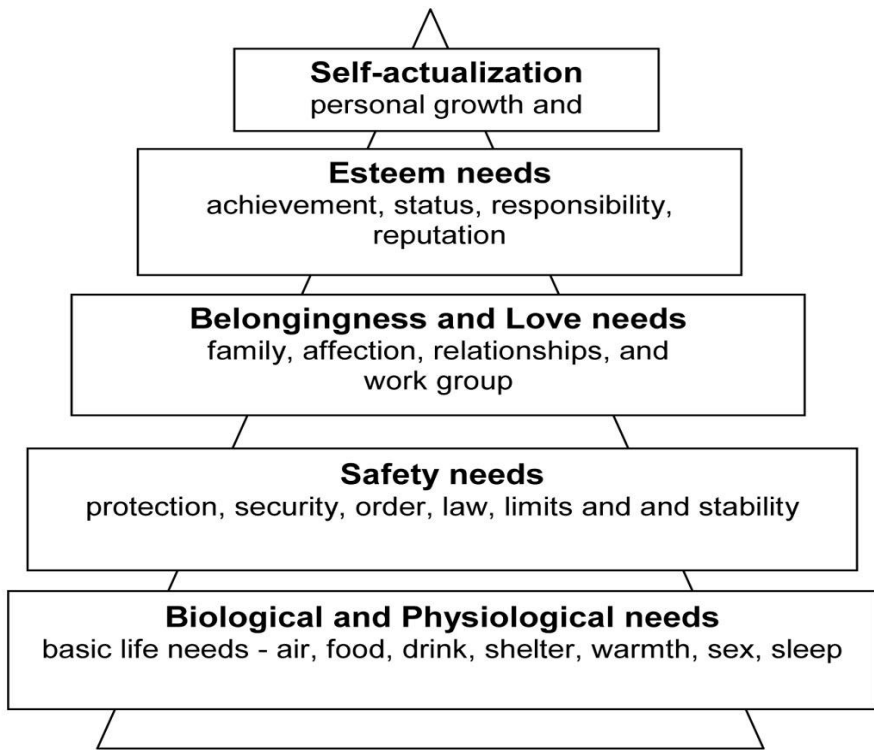
D. Motivasi Penyuluh Pertanian

Dahama dan Bhatnagar (1980) menjelaskan bahwa, motivasi merupakan sebuah argumen atau kombinasi antara kepentingan, perasaan, selera dan keinginan untuk meningkatkan tindakan yang mempunyai maksud dan menyadari akan keberadaannya. Koontz et al.,(1980) mendefinisikan motivasi sebagai suatu pernyataan batin yang terwujud dengan adanya daya kekuatan untuk bertindak atau bergerak secara langsung melalui saluran perilaku yang mengarah pada tujuan atau sasaran.

Soemanto (1987) memahami motivasi sebagai perubahan di dalam diri seseorang yang ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keadaan yang mendorong tingkah laku (*motivating states*), tingkah laku yang di dorong oleh keadaan tersebut (*motivated behavior*) dan tujuan dari pada tingkah laku tersebut (*goals or ends of such behavior*).

Hasibuan (1995) berpendapat bahwa, motivasi adalah suatu keahlian atau daya penggerak dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi untuk mencapai kepuasan dan tujuan organisasi. Crawford (2005) menjelaskan motivasi sebagai faktor yang bisa menyebabkan orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu. Memotivasi dapat berarti mempengaruhi seseorang agar bersedia bertindak, meliputi: (1) identifikasi atau penghargaan terhadap kebutuhan yang tidak memuaskan, (2) pembentukan suatu tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan dan (3) menentukan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.

Maslow (1956) mengembangkan motivasi melalui hirarki kebutuhan masing-masing individu. Setiap individu termotivasi dengan cara kebutuhan yang menjadi bawaan sejak lahir yang membuat individu tersebut terpuaskan dengan kebutuhannya, sehingga dapat bertahan hidup. Motivasi melalui hirarki kebutuhan Maslow di bagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (1) kebutuhan dasar yang terdapat pada hirarki paling bawah yang terdiri dari: (a) kebutuhan fisiologis, (b) kebutuhan akan rasa aman, (c) kebutuhan akan cinta dan harta (sosial), (2) kebutuhan tumbuh yang berada di atas kebutuhan dasar yang terdiri dari: (a) kebutuhan akan penghargaan (status) dan (b) kebutuhan akan aktualisasi diri. Hirarki kebutuhan Maslow di jelaskan melalui Gambar 3.



Gambar 3. Hirarki Kebutuhan Maslow

- 1) Kebutuhan fisiologis (lahiriyah), yaitu kebutuhan dasar individu, antara lain: makan, minum, rumah, sandang, sex, tidur dan lain-lain. Manifestasinya merupakan kebutuhan individu akan pangan, sandang dan papan. Bagi karyawan, kebutuhan akan gaji, uang lembur, perangsang, hadiah-hadiah dan fasilitas lainnya, seperti: rumah, kendaraan dan lain-lain menjadi motif dasar dari individu mau bekerja secara efektif dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi bagi organisasi.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman dan selamat (*safety needs*). Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukan, jabatan, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dia dapat bekerja dengan baik dan penuh produktivitas bila ada jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya.
- 3) Kebutuhan akan cinta dan harta atau kebutuhan sosial (*social needs*). Kebutuhan akan kasih sayang dan bersahabat (kerjasama) dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Kebutuhan akan diikutsertakan,

meningkatkan relasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dan tumbuhnya rasa kebersamaan termasuk adanya sense of belonging dalam organisasi.

- 4) Kebutuhan akan penghargaan atau kebutuhan prestasi (*esteem needs*). Kebutuhan akan kedudukan dan promosi di bidang kepegawaian. Kebutuhan akan simbol-simbol dalam statusnya serta prestis yang ditampilkannya.
- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*). Setiap orang ingin mengembangkan kapasitas kerjanya dengan baik. Hal ini merupakan kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan dan seringkali nampak pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai citra dan cita diri seseorang.

Dalam motivasi kerja pada tingkat ini diperlukan kemampuan manajemen yang dapat mensinkronisasikan antara citra diri dan citra organisasi untuk dapat melahirkan hasil produktivitas organisasi yang lebih tinggi.

Istilah “hirarki” dapat diartikan sebagai tingkatan atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa, menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat kedua, dalam hal ini keamanan sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu sandang, pangan dan papan terpenuhi; yang ketiga tidak akan diusahakan pemuasan sebelum seseorang merasa aman, demikian pula seterusnya.

Pemenuhan tentang berbagai kebutuhan manusia makin mendalam penyempurnaan dan “koreksi” dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi sangat diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

McClelland (1961) mengembangkan motivasi berprestasi (*achievement motivation*) yang berhubungan dengan tiga kebutuhan, yaitu: (1) kebutuhan akan prestasi (*need of achievement*) n-Ach, (2) kebutuhan akan kekuasaan (*need of power*) n-Power dan (3) kebutuhan berafiliasi (*need of affiliation*) n-Affil. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan akan prestasi (*need for achievement/n-Ach*). Pengertian kebutuhan untuk berprestasi menurut McClelland adalah suatu daya dalammental manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien daripada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya yang dapat mengarahkan dan

mempertahankan tingkah laku manusia untuk mencapai suatu standar prestasi.

- 2) Kebutuhan akan kekuasaan (*need for power/n-Pow*). Pengertian kebutuhan akan kekuasaan menurut McClelland adalah bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan memengaruhi orang lain yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan.
- 3) Kebutuhan akan berafiliasi (*need for affiliation/n-Affil*). Pengertian kebutuhan akan berafiliasi menurut McClelland adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah, akrab, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi.

McClelland menjelaskan tiga karakteristik dan sikap motivasi berprestasi, yaitu: (1) pencapaian hasil kerja lebih penting daripada materi, (2) mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar daripada menerima pujian atau pengakuan dan (3) umpan balik sangat penting, karena merupakan ukuran kesuksesan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Umpan balik tersebut dapat diandalkan, bersifat kuantitatif dan faktual.

Herzberg (2000) menjelaskan bahwa, motivasi terdiri dari dua faktor yang memengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu; (1) faktor pemuas "*motivation factor*" yang disebut juga satisfier atau intrinsic motivation, yaitu faktor-faktor yang sifatnya intrinsik atau bersumber dalam diri seseorang dan (2) faktor pemelihara "*hygienes*" yang disebut juga dissatisfier atau extrinsic motivation, yaitu faktor-faktor sifatnya yang bersumber dari luar diri dan turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya.

Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong karyawan atau pegawai termotivasi yaitu, faktor intrinsik (motivator) atau satisfiers, seperti: pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Faktor ekstrinsik (*hygiene*) pemelihara atau dissatisfiers, seperti: status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku.

Pegawai yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan dengan menggunakan kreativitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan di sini terutama tidak dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik

cenderung melihat apa yang diberikan oleh organisasi kepada mereka dan kinerjanya diarahkan untuk memperoleh hal-hal tersebut. Adapun yang merupakan faktor motivasi menurut Herzberg adalah pekerjaan itu sendiri, prestasi yang diraih, peluang untuk maju, pengakuan orang lain dan tanggungjawab. Faktor higienis terdiri dari: kompensasi, kondisi kerja, status, supervisi, hubungan antara manusia dan kebijakan perusahaan atau lembaga pemerintah.

Dahama dan Bhatnagar (1980), Koontz et al.,(1980) dan Soemanto (1987) menjelaskan bahwa motivasi merupakan kombinasi antara kepentingan, perasaan, selera dan keinginan yang terwujud dengan adanya kekuatan untuk bertindak atau bergerak secara langsung melalui saluran perilaku yang mengarah pada pekerjaan.

Dahama dan Bhatnagar (1980) dan Koontz et al.,(1980) lebih mengarah pada kombinasi kepentingan untuk mencapai tujuan yang timbul oleh adanya kekuatan untuk bertindak atau bergerak secara langsung berdasarkan perilaku. Soemanto (1987) memandang sebagai reaksi dari tingkah laku yang didorong oleh keadaan dan tujuan dari tingkah laku tersebut.

Hasibuan (1995) dan Crawford (2005) memahami motivasi sebagai suatu penggerak dalam mengarahkan karyawan agar bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi berdasarkan kemampuannya untuk mencapai kepuasan dan tujuan organisasi. Hasibuan (1995) lebih mengarah pada kemampuan karyawan untuk bekerjasama sama secara efektif dan efisien. Crawford (2005) lebih memandang pada perilaku karyawan untuk bertindak yang integratif dalam mencapai kepuasan dan tujuan organisasi.

Maslow (1956), McClelland (1961) dan Herzberg (2000) mengemukakan persamaan teori motivasi dari aspek kebutuhan individu yang terdiri dari: kebutuhan dasar, kebutuhan tumbuh, kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk berafiliasi dan kebutuhan individu akan faktor motivator dan faktor hygienes.

Maslow (1956) memahami motivasi sebagai faktor pemenuhan kebutuhan yang bercirikan pada kebutuhan dasar dan kebutuhan tumbuh, seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan tumbuhnya jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. McClelland (1961) lebih mengarah pada motivasi berprestasi (*achievement motivation*), yaitu: kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan berafiliasi.

Pada hakekatnya manusia mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Seseorang dianggap memiliki motivasi berprestasi jika mempunyai keinginan melakukan suatu karya yang lebih baik dari karya orang lain. Herzberg (2000) memandang motivasi dari dua faktor, yaitu: faktor motivator atau motivasi intrinsik (*satisfiers*) dan faktor

pemelihara atau motivasi ekstrinsik (*hygiene*). Kedua faktor motivasi tersebut tidak bisa saling menggantikan dan bukan merupakan suplemen satu terhadap yang lain.

Hasil penelitian Ketut Puspadi (2002) tentang rekonstruksi sistem penyuluhan pertanian menyimpulkan bahwa faktor motivasi kerja penyuluh pertanian dan kualitas kebijaksanaan organisasi penyuluhan berpengaruh paling kuat pada kegiatan penyuluhan pertanian yang dibutuhkan oleh petani, yaitu: kegiatan memecahkan permasalahan untuk kebutuhan-kebutuhan petani dalam hal peningkatan pendapatan, pengembangan alternatif-alternatif usaha pertanian, peningkatan produksi usahatani, pengembangan permodalan, pemasaran hasil pertanian, pengembangan jenis usaha pertanian yang telah ada, kemudahan mendapatkan sarana produksi, membantu berhubungan dengan pihak ke tiga untuk mendapatkan solusi permasalahan petani dan peningkatan kompetensi petani yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan penjelasan berbagai konsep teori motivasi di atas, maka dapat disimpulkan motivasi merupakan kondisi yang mendorong, menggerakkan, mengendalikan, membangkitkan usaha, menumbuhkan perasaan, pengambilan prakarsa dan usaha individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi ini dapat diamati dari perilaku yang dihasilkannya, yaitu: cara atau pola pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan tumbuh, motivasi berprestasi, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik individu yang akan berdampak pada kepuasan individu terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian Bahua (2014) tentang Efektivitas Pertumbuhan dan Produksi Padi Sawah (*Oriza sativa L*) melalui pemberian pupuk organik cair di Kabupaten Gorontalo Utara diketahui bahwa pertumbuhan padi sawah melalui pemberian dosis POC marolis berpengaruh nyata pada pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah anakan dan perubahan warna daun. Sedangkan pada produksi padi sawah pemberian dosis POC marolis berpengaruh nyata pada produksi anakan produktif, panjang malai dan berat 1000 butir gabah. Produksi gabah kering panen (GKP) padi sawah dengan perlakuan dosis POC marolis di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 12,6 ton/ha. Selain pertumbuhan dan produksi padi sawah, pada penelitian ini dianalisis juga peran penyuluh pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengembangkan pertanian organik.

Berdasarkan hasil survei pada 50 orang petani padi sawah di Kabupaten Gorontalo Utara diperoleh, bahwa kinerja penyuluh pertanian dalam mengimplementasikan program penyuluhan pertanian yang spesifik lokasi sebesar 47.5%. Hal ini diukur melalui peran penyuluh dalam merencanakan program penyuluhan, mengapresiasi keragaman budaya

petani, mengelola informasi penyuluhan, kepemimpinan penyuluh dan komunikasi interpersonal penyuluh dengan petani. Selanjutnya 32,4% penyuluh pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara selalu menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan pada setiap akhir program penyuluhan, dan 20,1% penyuluh pertanian tidak melaporkan hasil pekerjaannya pada setiap akhir program penyuluhan. Oleh karena itu peran dari semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan program pembangunan pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB 7

Perubahan Paradigma Penyuluhan Pertanian dari Pendekatan Penawaran ke Pendekatan Permintaan

Krisis ekonomi global yang terjadi sejak akhir dekade 1990-an yang lalu, dan masih terus muncul sampai saat ini, menyebabkan kemerosotan drastis pada industri manufaktur dan perdagangan di negara-negara maju dan yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Krisis multidimensi ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin di banyak negara, dalam skala yang mencengangkan.

Situasi yang menyedihkan ini menyadarkan para pembuat kebijakan, pelaku pembangunan, badan donor dan akademisi bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang, yang begitu saja meniru model pembangunan yang telah dilakukan di Negara-negara maju yang mengutamakan pembangunan industri dan manufaktur, dan yang mengabaikan pembangunan pertanian dan pedesaan, merupakan suatu kesalahan. Untuk mengoreksi kesalahan ini dan mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang masih terasa sampai saat ini, maka pembangunan pertanian perlu di inisiasi dan digalakkan kembali di Negara-negara yang sedang berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin termasuk Indonesia.

Mereka percaya bahwa pembangunan pertanian dapat menyediakan kesempatan kerja yang luas kepada para penganggur, yang pada giliran berikutnya akan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kini pertanian telah kembali menjadi agenda pembangunan dunia. Sebagai konsekuensi logis dari keputusan tersebut, maka revitalisasi atau pengembangan kembali penyuluhan menjadi sesuatu yang krusial.

Pengembangan penyuluhan itu perlu, tidak saja, karena penyuluhan diharapkan dapat melibatkan, mengorganisasikan dan menggerakkan banyak warga pedesaan yang hidup di daerah yang terpencar dan tersebar luas, melainkan juga agar mereka mau belajar kembali dan bekerja dengan sepenuh hati untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui cara ini penyuluhan diharapkan dapat mengembangkan dan memberdayakan warga pedesaan agar mampu membantu diri sendiri untuk memecahkan berbagai masalah pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Ditilik dari perspektif lain, yang dilakukan oleh penyuluhan ialah membantu warga pedesaan itu, secara individu ataupun secara kolektif, berusaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak agar dapat hidup lebih sejahtera, dan bergerak keluar dari perangkap kemiskinan. Namun demikian, dalam situasi yang telah berubah dan penuh dengan harapan maupun tantangan itu, penyuluhan juga dituntut untuk berubah. Berubah baik dalam konsep maupun dalam praktek.

Perubahan yang menurut Qamar (2011) akan dilakukan melalui reformasi kelembagaan dan operasional itu perlu diekspresikan, antara lain dalam paradigma panutan yang akan menata kembali penyuluhan, termasuk memberi definisi baru kepada penyuluhan, dan merevisi metoda maupun strategi untuk mencapai tujuan dan harapan baru itu. Kalau penyuluhan kini dimaknai tidak lagi hanya sekedar teknologi transfer seperti yang dipraktekkan pada masa silam, maka penyuluhan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan yang timbul pada aras lokal, nasional maupun global itu? Setelah itu muncul konsekuensi logis untuk mengembangkan cara kerja baru untuk mewujudkan tuntutan, harapan maupun keinginan baru di atas, yang gagal dicapai penyuluhan pada masa silam, yaitu membantu para petani hidup lebih sejahtera dan keluar dari kemiskinan.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa ketiga masalah generik di atas sesungguhnya timbul dari ketidakpuasan banyak pihak pada implementasi dan pencapaian penyuluhan selama tiga dekade yang lalu. Pada masa itu, penyuluhan yang diorganisasikan, digerakkan dan dibiayai oleh pemerintah melalui dana yang disediakan oleh badan-badan donor, difokuskan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian tertentu, terutama pangan. Sejarah mencatat bahwa penyuluhan, yang pada waktu itu diselenggarakan dengan mengikuti paradigma dorongan penawaran, berhasil mendidik dan menggerakkan para petani dibanyak negara untuk meningkatkan produksi pangan, terutama biji-bijian secara nyata.

Indonesia termasuk ke dalam golongan Negara yang berhasil membangun pertanian dan pedesaannya pada masa itu dan menggunakan penyuluhan untuk menggerakkan para petani padinya untuk mencapai swasembada beras pada 1984. Keberhasilan itu diapresiasi oleh Badan Pangan Dunia dengan memberikan sebuah medali mas kepada presiden Soeharto di kantor pusatnya di Roma pada 1985. Namun keberhasilan itu menurut para peneliti ternyata gagal membantu para petani meningkatkan penghasilan mereka, menyejahterakan keluarga mereka, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Sadar akan keberhasilan dan kegagalan penyuluhan pada masa silam, para pembuat kebijakan, donor, pelaku pembangunan dan akademisi

itu yang masih tetap memiliki keinginan untuk membangun kembali pertanian dan pedesaan, memperbaharui harapan mereka pada penyuluhan. Mereka masih percaya bahwa penyuluhan masih dapat diandalkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia pertanian dan pedesaan, sehingga layak untuk dikembangkan kembali dan digunakan dalam pembangunan pertanian maupun pedesaan. Kepercayaan dan harapan baru inilah yang membuat penyuluhan menarik perhatian banyak pihak diberbagai belahan dunia, dan menjadikannya subyek kajian akademik yang prolifk.

A. Definisi Baru Penyuluhan

Upaya untuk memahami kembali makna penyuluhan mendorong orang untuk menggunakan perspektif yang berbeda. Perspektif awal yang menunjukkan adanya hubungan sistemik yang linear diantara suatu sistem sumber yang menghasilkan informasi dengan sistem pemakai yang menggunakan informasi tersebut, terutama teknologi pertanian, sudah tidak lagi memadai. Sistem sumber tersebut ternyata tidak lagi tunggal melainkan majemuk. Begitu juga dengan informasi yang dipertukarkan tidak lagi satu macam, bukan saja pengetahuan atau teknologi pertanian semata-mata, melainkan bermacam-macam dan beragam jenisnya.

Hal ini, sedikit atau banyak menyebabkan pandangan orang tentang penyuluhan berubah dari waktu ke waktu. Pada mulanya, penyuluhan dianggap sebagai suatu bentuk pelayanan penyampaian pengetahuan dari lembaga penelitian kepada para petani yang tinggal di daerah pedesaan untuk memperbaiki peri-kehidupan dan kesejahteraan mereka (Davis, 2008).

Hubungan sistem sumber dan sistem pemakai melibatkan sejumlah komponen, yaitu teknologi transfer, pembangunan pedesaan, keterampilan manajemen, dan pendidikan non-formal. Dalam konteks semacam ini, kata Davis (2008) tidaklah mengherankan, jika secara tradisional fokus penyuluhan ialah pada peningkatan produksi, perbaikan hasil panen, menyelenggarakan pelatihan untuk petani, dan mentransfer teknologi.

Seiring dengan berlalunya waktu, pemahaman tentang penyuluhanpun bergeser, dari semata-mata transfer teknologi ke fasilitas, dan dari sekedar pelatihan ke pembelajaran. Untuk memperlancar proses perubahan ini, penyuluhan perlu memberi dukungan lain dalam bentuk bantuan kepada kelompok-kelompok tani untuk menghadapi isu-isu pemasaran dan menjalin kemitraan dengan berbagai badan penyedia jasa pelayanan maupun dengan badan-badan lain yang diperlukan.

Atas dasar itu, Davis (2008) menyarankan agar penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai seperangkat organisasi yang mendukung dan memfasilitasi orang-orang yang terlibat dalam proses produksi pertanian untuk mendapatkan informasi, keterampilan, dan teknologi, tidak saja untuk

memecahkan masalah yang mereka hadapi, melainkan juga untuk memperbaiki peri-kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Organisasi-organisasi tersebut di atas, kata Kelompok Neuchatel (Davis, 2008), bisa saja meliputi berbagai lembaga pemerintah, yang semula berperan sebagai pelaku utama penyuluhan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, berbagai organisasi produsen, organisasi petani, lembaga-lembaga swasta seperti pemasok sarana produksi pertanian, pembeli produk-produk pertanian, penyedia jasa pelatihan, dan kelompok-kelompok media, yang memiliki minat pada pembangunan pertanian dan pedesaan.

Definisi yang disarankan oleh Davis (2008) di atas menunjukkan nuansa penyuluhan yang plural. Secara kelembagaan, pelaku penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga-lembaga pemerintah yang pernah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan penyuluhan. Ada juga lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga-lembaga swasta komersial yang memasarkan berbagai sarana masukan produksi pertanian, maupun yang membeli produk-produk pertanian dengan kualitas tertentu dalam skala besar secara berkesinambungan dari para petani binaannya, dan lembaga-lembaga masyarakat madani lain yang dengan motif dan alasan sendiri, secara persisten ikut dalam proses mendidik dan memotivasi para petani dan keluarganya agar menjadi produsen produk-produk pertanian yang handal.

B. Paradigma Dorongan Penawaran pada Penyuluhan

Perkembangan penyuluhan tidak terlepas dari tren perkembangan pemikiran dan praktek pembangunan yang dianut oleh suatu masyarakat. Setelah kemerdekaan, kepercayaan yang kuat tentang peranan negara sebagai aktor utama pembangunan mewarnai kebijakan pembangunan ekonomi di banyak negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia pada waktu itu.

Sejalan dengan tren perkembangan pembangunan pada masa itu, pemerintah Indonesia, selama hampir lima dasawarsa semenjak bebas dari belenggu kolonial, menjalankan peran sebagai aktor utama pembangunan. Hal ini sesuai dengan paradigma dorongan penawaran yang dominan dan dianut pada waktu itu. Pemerintahlah yang memiliki daya dan kemampuan untuk merencanakan pembangunan ekonomi dan yang juga dipercaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.

Sebagai negara agraris, yang sebagian besar penduduknya berdiam dan bekerja di daerah pedesaan, maka wajar jika pada awalnya, pembangunan ekonomi itu dikonsentrasikan pada pembangunan pertanian. Keputusan ini diambil, karena pertanian pada masa itu merupakan sektor tumpuan (*leading sector*) yang pertumbuhannya mempengaruhi

pertumbuhan sektor-sektor lain seperti manufaktur, industri, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa lain.

Pembangunan pertanian diharapkan menyediakan banyak pekerjaan kepada penduduk desa yang menganggur agar memiliki cukup penghasilan dan dapat mengonsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan baik oleh pertanian itu sendiri maupun oleh industri, dan kemudian dapat mengatasi kemiskinan mereka. Selanjutnya, tujuan lain pembangunan pertanian yang mendesak untuk segera dicapai ialah menghasilkan cukup beras untuk memberi makan rakyat yang jumlahnya terus bertambah, menyediakan cadangan pangan nasional untuk persediaan dikala darurat dan sekaligus mengurangi impor beras.

Pembangunan pertanian dirancang bertahap untuk setiap periode lima tahun. Tujuan pembangunan pertanian yang mendesak dan perlu segera dicapai ialah menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat di pedesaan dan menghasilkan cukup beras untuk memberi mereka makan. Pada saat yang sama, impor beras yang memerlukan banyak devisa harus bisa dikurangi.

Sementara itu, pengembangan penyuluhan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan pertanian, dilakukan juga dengan mengikuti paradigma ini (Akinagbe dan Ajayi, 2010; Anderson dan Feder, 2004; Rivera dan Alex, 2004). Tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan pertanian secara otomatis menjadi tujuan yang juga harus dicapai oleh penyuluhan pertanian. Dalam hubungan ini, tidaklah mengherankan, jika selama hampir empat dasawarsa, fokus utama penyuluhan pertanian ialah pada upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi beras nasional.

Untuk merealisasikan target peningkatan produksi beras nasional itu, penyuluhan mendiseminasikan target peningkatan produksi beras yang telah direkalkulasi kepada setiap unit kerja di lingkungannya, dan pada giliran berikutnya, unit-unit tersebut mendistribusikan kembali target yang telah disesuaikan itu kepada kelompok-kelompok tani dan individu-individu petani anggotanya. Dengan cara ini, beban untuk mencapai target produksi beras nasional dibagikan kepada seluruh petani padi di negeri ini.

Pendistribusian target-target produksi beras itu kepada para petani produsen beras menunjukkan cara kerja penyuluhan yang mengikuti strategi dorongan penawaran (*supply driven*) yang bersifat dari atas ke bawah. Selanjutnya, untuk menggerakkan para penyuluh dan petani agar mencapai target peningkatan produksi beras nasional itu, penyuluhan pada 1976 mengadopsi pendekatan sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan) yang ditawarkan oleh Bank Dunia, donor utama pembangunan pertanian pada waktu itu. Pada mulanya para penyuluh pertanianlah yang diorientasikan dan dilatih terlebih dahulu agar siap dan dapat bekerja dengan para petani. Pada

giliran berikutnya, para penyuluh itu ditugaskan untuk memotivasi, mengorganisasikan, mendidik dan menggerakkan para petani padi sawah di daerah pedesaan untuk mengintensifkan usaha tani padi mereka.

Melalui program BIMAS dan varian-variannya seperti BIMAS Gotong Royong, INMAS, INSUS, OPSUS, dan SUPRA INSUS para petani dimotivasi dan dilatih untuk mengadopsi paket teknologi panca usaha tani dan menerapkannya pada usaha tani padi mereka. Pada akhirnya setelah dua dasawarsa bekerja-keras melaksanakan pembangunan pertanian, jerih payah seluruh jajaran pertanian dan masyarakat Indonesia membuahkan hasil. Pada 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pencapaian yang menjadi kebanggaan nasional ini, diakui oleh Badan Pangan Dunia.

Pada inagurasi keberhasilan mencapai swasembada beras di Roma itu, pemerintah Indonesia atas nama masyarakat pertanian Indonesia memberikan bantuan 100.150 ton gabah kering giling kepada rakyat Afrika yang sedang menderita kekurangan pangan melalui Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia. Setelah swasembada beras tercapai, program peningkatan produksi beras nasional, walau tidak seintensif seperti di masa lalu, masih terus berlanjut sampai sekarang.

Namun ada sisi lain yang menarik untuk diungkapkan dari cerita keberhasilan peningkatan produksi beras nasional itu. Evaluasi yang dilakukan setelah tercapainya swasembada beras menunjukkan bahwa produksi beras yang melimpah mengakibatkan harga beras terus turun dari panen ke panen. Sementara harga sarana produksi padi secara berangsur-angsur naik. Hal ini berakibat buruk pada penerimaan petani padi. Karena itu, kenaikan produksi beras tidak selalu diikuti oleh peningkatan penghasilan dan kesejahteraan keluarga para produsen beras itu. Hal inilah yang antara lain menyebabkan mengapa keluarga petani padi itu masih tetap miskin. Tampaknya fakta inilah yang digunakan oleh para pengkritik penyuluhan berparadigma dorongan penawaran, penyuluhan telah gagal menyejahterakan para petani padi sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Karena itulah penyuluhan perlu dibangun kembali dengan mengikuti paradigma alternatif.

C. Paradigma Dorongan Permintaan pada Penyuluhan

Ketidakpuasan terhadap peranan negara dalam pembangunan, tercermin melalui program penyesuaian struktural yang terjadi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Penyesuaian ini berakibat buruk pada perkembangan penyuluhan pertanian publik di negara-negara itu. Sistem latihan dan kunjungan yang diimplementasikan dalam penyuluhan publik yang

dikembangkan menurut paradigma dorongan penawaran, akhirnya ditinggalkan pada penghujung dekade 1990-an.

Kegagalan ini, sedikit atau banyak timbul, antara lain, karena ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk mempertahankan kesinambungan fiskal untuk membiayai penyuluhan dan pembangunan pertanian, ketidakmampuan model tersebut menghadapi banyak situasi dimana ia dikembangkan, dan ketidakkonsistenan model itu dengan perubahan penekanan pada peranan negara sebagai fasilitator dari pada penyedia layanan publik (Anderson dan Feder, 2004; Birner dan Anderson, 2007).

Penekanan paradigma sisi permintaan pada aktivitas penyuluhan ini perlu melihat juga kebutuhan informasi para petani. Selain informasi tentang teknologi baru, para petani membutuhkan juga nasihat tentang pemasaran, kualitas produk dan kendala-kendala lingkungan yang pengaruhnya menjadi semakin nyata pada proses produksi biologis tanaman atau ternak yang mereka kelola (Birner dan Anderson, 2007).

Tampilnya paradigma penyuluhan yang digerakkan oleh dorongan permintaan ini, juga terkait dengan perubahan paradigma reformasi sektor publik ke arah pemerintahan (*governance*) yang responsif, yang menuntut pemenuhan kebutuhan akan penyediaan layanan yang akuntabel kepada para penggunanya, dan pengembangan ketransparanan dan pemerdayaan sebagai kondisi penting bagi peningkatan efektivitas penyediaan layanan publik (Birner dan Anderson, 2007; Swanson dan Samy, 2002).

Fokus pada penyediaan layanan bernuansa permintaan ini, tidak hanya terbatas pada penyuluhan pertanian saja, akan tetapi juga pada sejumlah pelayanan lain untuk masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih (Birner dan Anderson, 2007).

Pada era pasca Latihan dan Kunjungan (LAKU), pemikiran dan praktek tentang penyuluhan bergeser ke arah modus yang pluralistik, baik sebagai penyedia maupun sebagai pembiaya layanan penyuluhan (Rivera dan Alex, 2004). Sehubungan dengan perkembangan ini, tren perubahan utama yang terjadi di dunia akhir-akhir ini meliputi desentralisasi, kontrak, privatisasi, penggantian biaya, dan pelibatan LSM dan organisasi-organisasi petani dalam perencanaan dan implementasi program penyuluhan pertanian. Hal inilah yang mendorong tampilnya sisi permintaan pada aktivitas penyuluhan (*demand driven*) (Akinagbe dan Ajayi, 2010; Anderson dan Feder, 2004; Birner dan Anderson, 2007).

Penyuluhan yang pada implementasinya masih mengandalkan dana publik, baik domestik maupun internasional, ditekan untuk berubah. Namun demikian, penyuluhan masih tetap diharapkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum miskin di pedesaan, meningkatkan penghasilan mereka

dan membantu mereka keluar dari perangkap kemiskinan melalui pembangunan pertanian. Karena itulah penyuluhan harus mengubah rujukannya dari paradigma dorongan penawaran ke paradigma dorongan permintaan.

Perubahan paradigma ini menuntut penyuluhan untuk mengubah orientasinya, strateginya, dan metode kerjanya. Penyuluhan harus berorientasi pada upaya untuk membantu khalayak sarannya memenuhi tuntutan mereka. Program-program pembelajaran penyuluhan haruslah dirancang secara partisipatif dengan melibatkan narasumber yang relevan dari lembaga-lembaga lain dan khalayak sasaran itu. Prioritas program harus ditentukan atas dasar situasi dan kondisi setempat dan keinginan warga setempat. Pendekatan yang dilakukan di akar rumput ini akan membuat program-program penyuluhan, terutama yang dirancang dan diimplementasikan sendiri oleh para petani relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perubahan paradigma ini, menuntut penyuluhan untuk memodifikasi fokusnya pada program nasional seperti ketahanan pangan. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana penyuluhan akan mempertemukan dua arus besar yang sama pentingnya itu ketika bekerja bersama para petani. Di satu pihak meyakinkan dan membujuk para petani agar tetap mau menanam padi untuk mempertahankan peningkatan produksi beras nasional dan di pihak lain, mengajak dan memotivasi para petani untuk mengembangkan bidang usaha agribisnis baru yang dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih nyata untuk meningkatkan penghasilan mereka dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Untuk mengembangkan agribisnis baru di pedesaan, penyuluh bersama dengan perwakilan konstituennya perlu melakukan dua macam studi, yaitu analisis situasi setempat dan analisis pasar terlebih dahulu. Analisis situasi setempat dapat dilakukan dengan mengikuti teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk menentukan, keinginan, kebutuhan, masalah dan potensi setempat untuk pengembangan agribisnis skala kecil atau menengah di suatu lokalita.

Melalui hubungan ini, analisis pasarpun harus dilakukan untuk mencari tahu komoditas pertanian apa saja yang bernilai tinggi, yang pasarnya masih terbuka dan saluran pemasarannya ada. Setelah itu, mencari tahu juga macam-macam klasifikasi kualitas komoditas tersebut, kemasannya dan perbedaan harganya. Selanjutnya, mempelajari modus transportasi dan biaya transportasi komoditas tersebut ke pasar terdekat dan pasar yang lebih jauh, termasuk mencari tahu harga jual di usaha tani setempat.

Informasi pasar dengan hasil analisis situasi setempat ini sangat berguna untuk mengembangkan rencana bisnis komoditas yang bernilai tinggi, termasuk rencana produksi, kebutuhan bahan baku, alat, tenaga kerja, biaya dan modal, prospek pengembangan produk untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, pengemasan, promosi dan pemasarannya, dan prospek penerimaan dan keuntungan, serta pengembalian modal. Rencana bisnis ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan kemitraan, baik dengan lembaga keuangan maupun pengusaha setempat yang akan memasok alat dan bahan yang dibutuhkan maupun yang akan menampung komoditas yang dihasilkan.

Berbekal rencana bisnis komoditas bernilai jual tinggi itu, petani bersama penyuluh pendamping dapat menjajaki pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank setempat untuk mendapatkan pinjaman lunak modal kerja. Selain itu, petani bersama penyuluh juga dapat menjajaki kerjasama dengan pengusaha/pedagang pemasok alat dan bahan baku yang dibutuhkan, serta dengan pedagang penampung produk yang dihasilkan untuk dijual kembali ke konsumen atau memasok langsung ke unit-unit pengolahan untuk dikonversi menjadi produk setengah jadi yang akan diolah kembali atau produk akhir yang akan dijual kepada konsumen. Disamping itu, kemungkinan untuk menjual langsung kepada konsumen juga perlu diantisipasi.

Pada akhir dekade 1990-an itu, Indonesia tidak luput dari tren perubahan global yang melanda banyak negara. Rezim orde baru berganti dan paradigma pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan ditinggalkan. Pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan ekonomi, termasuk pertanian yang sentralistikpun berubah. Indonesia memasuki fase desentralisasi. Sejalan dengan perkembangan itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2006 memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Undang-undang ini berupaya mendesentralisasikan penyelenggaraan penyuluhan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagian kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan penyuluhan, termasuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan didelegasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga dengan infrastruktur, fasilitas, anggaran maupun sumberdaya manusia penyuluhan yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah.

Kini penyuluh pegawai negeri sipil, walau masih melakukan peran yang penting telah memiliki sejawat dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga swasta komersial maupun non-komersial, organisasi petani, dan unsur-unsur masyarakat madani yang berkepentingan

dengan pengembangan masyarakat, pengembangan sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, para petani setempatpun, termasuk kaum wanita, kaum miskin yang menderita dan terpinggirkan digalakkan untuk melibatkan diri ke dalam kelompok-kelompok tani yang merupakan gabungan kelompok tani atau asosiasi-asosiasi petani. Dengan bimbingan penyuluh, organisasi-organisasi berbasis kaum tani ini diharapkan mampu menata diri mereka, mengembangkan program dan aktivitas pembelajaran yang mereka kelola sendiri, mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan rencana agribisnis skala kecil atau menengah di desa-desa mereka dan mengimplementasikan rencana bisnis tersebut menjadi usaha untuk memproduksi komoditas pertanian bernilai jual tinggi seperti sayuran, jamur, buah-buahan, umbi-umbian, tanaman obat, bunga, ternak atau ikan, dalam bentuk segar ataupun olahan, yang laku dijual di pasar setempat atau di pasar yang lebih jauh dengan harga yang lebih tinggi.

Penyuluhan yang berorientasi pasar dan mencari nilai tambah yang lebih besar ini, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk pedesaan yang lebih banyak, mendidik mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan membantu mengentaskan para warga pedesaan itu dari kemiskinan. Agar penyuluhan yang digerakkan oleh dorongan permintaan dan berorientasi ke pasar untuk mencari nilai tambah bagi komoditas yang dihasilkan oleh para petani itu berhasil, maka para penganjur paradigma ini mengingatkan para pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan untuk mengatasi sejumlah kendala yang mereka sebut sebagai kegagalan pasar.

Kegagalan pasar kata Biner dan Anderson (2007) timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan pasar untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat secara optimal. Ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini dapat disebabkan oleh sifat barang atau jasa yang harus disediakan atau oleh unsur eksternalitas yang positif dan negatif. Kegagalan pasar dapat mempengaruhi baik sisi permintaan maupun sisi penawaran dari penyediaan barang atau jasa (Umali dan Schwartz, 1994; Bennet, 1995; Anderson dan Feder, 1997 dalam Biner dan Anderson, 2007).

Kegagalan pasar dapat juga terjadi, karena ketidaksempurnaan informasi tentang penyuluhan. Penyuluhan dianggap kurang bermanfaat oleh khalayak sasaran atau konsumen yang tidak tahu tentang manfaat penyuluhan. Akibatnya petani tidak membutuhkan penyuluhan. Selain itu, sifat ini dapat juga muncul karena masalah tenggang waktu yang dibutuhkan untuk merasakan manfaat penyuluhan. Para petani miskin yang mengharapkan dapat segera menikmati manfaat penyuluhan akan menganggap rendah penyuluhan ketika manfaat tersebut baru mereka

rasakan kemudian. Masalah ini, kata Biner dan Anderson (2007), menjadi semakin buruk oleh anggapan para petani itu tentang ketidakpastian manfaat penyuluhan dan keengganan mereka untuk menanggung resiko. Sementara sifat publik suatu barang atau jasa dapat menyebabkan kegagalan pasar pada paradigma dorongan penawaran, maka sifat penyuluhan yang manfaatnya baru terasa kemudian dapat mengakibatkan kegagalan pasar pada paradigma dorongan permintaan (Biner dan Anderson, 2007).

Eksternalitas ialah unsur lain yang dapat menimbulkan kegagalan pasar. Dalam hubungan ini, penyuluhan dihubungkan dengan eksternalitas yang positif, kalau manfaat penyuluhan semakin terasa oleh masyarakat secara keseluruhan. Misalnya manfaat penyuluhan dalam pencapaian tujuan nasional seperti keamanan pangan. Pada hakikatnya penyuluhan dapat juga memiliki sifat eksternalitas yang positif, jika penyuluhan dapat mengurangi dampak negatif produksi pertanian pada lingkungan hidup. Misalnya dengan menggalakkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, mengendalikan penggunaan pestisida dan pemupukan yang berlebihan, dan mengembangkan pertanian konservasi di lahan miring. Untuk menyukkseskan pengembangan penyuluhan yang berorientasi pasar ini, Swanson (2006) menyarankan hal-hal berikut ini.

- 1) Tidak menggalakkan petani untuk menghasilkan komoditas pertanian atau produk bernilai tinggi tertentu, kalau pasarnya tidak ada. Lakukan analisis pasar potensial terlebih dahulu untuk berbagai tanaman atau produk bernilai tinggi yang akan dihasilkan di berbagai desa.
- 2) Sesuaikan jenis tanaman bernilai tinggi yang hendak dihasilkan dengan kondisi agroekologis setempat.
- 3) Carilah produk-produk yang memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan dan terjaga kualitasnya dalam situasi jalan dan transportasi yang buruk sekalipun.
- 4) Diversifikasi produksi sejumlah tanaman/produk bernilai tinggi itu untuk menghindari kejenuhan pasar dengan satu atau dua produk tanaman untuk mencegah turunnya harga.

Dorongan atau sisi penawaran dan permintaan ialah dua mazhab pemikiran ekonomi yang dikembangkan atas dasar kepercayaan umum pada pasar. Sejarah menunjukkan bahwa kedua mazhab ekonomi ini secara bergantian dianut oleh para pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan ekonomi di berbagai negara. Ketika suatu rezim baru naik ke panggung kekuasaan, maka rezim tersebut akan memilih mazhab ekonomi tertentu sebagai paradigma pembangunan ekonominya.

Rezim yang pendukung utamanya berasal dari kekuatan bisnis, biasanya akan memilih paradigma dorongan penawaran. Sedangkan rezim

yang didukung oleh kekuatan populer dari masa rakyat banyak, akan memilih paradigma dorongan permintaan.

Johnson (2013) menunjukkan bahwa kedua paradigma di atas menganggap pasar sebagai alokator sumber daya dan penghargaan yang rasional. Walaupun berbeda dalam pandangan tentang cara menggerakkan ekonomi, keduanya berusaha untuk mengatasi pengangguran dan menggunakan pemerintah secara sangat rasional untuk mendapatkan penghargaan yang rasional dan adil. Paradigma ekonomi berbasis penawaran dirintis oleh Milton Friedman dan Friedrich Hayek. Kedua ekonom ini berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menyuntikkan dana tunai ke dalam perekonomian yang sakit. Dalam situasi sulit, bisnis perlu menyesuaikan operasinya dan bekerja secara lebih efisien daripada meminta bantuan kepada pemerintah. Penganut mazhab penawaran percaya bahwa pasar akan terkoreksi sendiri secara alamiah dan siklusnya akan berlanjut. Pada saat ekonomi sedang makmur, pebisnis harus menabung surplus yang di dapat, dan menggunakan tabungan tersebut ketika ekonomi sedang sulit (Capozzi, 2013).

Di pihak lain, pemikiran ekonomi berbasis permintaan dikembangkan oleh ekonom Inggris, John Maynard Keynes. Keynes percaya bahwa pemerintah wajib memasok dana ketika ekonomi sedang sulit. Keynes berpendapat bahwa operasi bisnis akan lancar jika ada pasokan modal. Bisnis memerlukan pinjaman, investasi, dan pembiayaan agar tetap hidup. Tanpa akses pada kredit, aktivitas ekonomi dan konsumsi akan terhenti (Capozzi, 2013).

Selanjutnya, dorongan penawaran menganggap produsen dan investor kaya sebagai mesin penggerak utama pembangunan ekonomi. Keduanya membutuhkan insentif untuk mengembangkan investasi dan inovasi. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan pajak agar keduanya mau menginvestasikan kekayaan mereka dalam produksi dan inovasi. Karena itu, pajak haruslah rendah, anggaran harus seimbang, regulasi minimum dan perdagangan luar negeri bebas (Johnson, 2013).

Sebaliknya, Keynes justru percaya bahwa mesin penggerak utama ekonomi ialah konsumen. Karena itulah pemerintah harus terlibat sepenuhnya dalam ekonomi, jika konsumen atau permintaan ialah mesin pertumbuhan ekonomi, maka negara harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan daya beli orang banyak. Hal ini menuntut negara untuk turut campur dalam menyediakan pekerjaan umum dan meningkatkan segala bentuk hak kepemilikan. Dalam hubungan ini menghilangkan pengangguran ialah tujuan yang hendak dicapai oleh ekonom penganut mazhab ini. Sumber pekerjaan itu sendiri tidaklah penting, yang penting ialah konsumen terus

membeli produk dan jasa yang ditawarkan, sehingga ekonomi terus bergerak (Johnson, 2013).

Beralihnya penyuluhan dari paradigma dorongan atau sisi penawaran ke paradigma dorongan atau sisi permintaan, sedikit atau banyak, dipengaruhi oleh kepercayaan para penganut mazhab ini, bahwa semua orang harus bekerja agar punya penghasilan, dan agar dapat terus membeli barang dan jasa yang ditawarkan untuk menggerakkan perekonomian dan keluar dari kemiskinan. Penyuluhan yang dibiayai oleh dana publik terus ditekan agar mengubah pendekatan dan cara kerjanya. Penyuluhan harus lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan dan kebutuhan penggunanya. Penyuluhan harus dapat mengembangkan kesempatan kerja untuk penggunanya, membelajarkan mereka secara partisipatif untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil di pedesaan untuk mendapatkan nilai tambah, dengan jalan memproduksi komoditas bernilai jual tinggi di pasar setempat atau di pasar yang lebih jauh.

Melalui kerja keras dan peruntungan yang baik, maka penduduk pedesaan, yang menderita dan miskin, yang wanita dan yang terpinggirkan akan memiliki peluang untuk punya pekerjaan dan usaha, menghasilkan komoditas tertentu bernilai jual tinggi, sehingga punya penghasilan yang lebih baik, dapat hidup sejahtera dan tidak miskin lagi. Harapan ini hendak diwujudkan dengan arahan dari paradigma baru dorongan permintaan.

Pada sisi lain, negara mewajibkan penyuluhan untuk tetap fokus pada upaya memertahankan keamanan pangan. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang bernuansa dorongan penawaran ini tetap harus dilaksanakan. Keberhasilan penyuluhan dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan ini menurut Birner dan Anderson (2007), akan menghasilkan eksternalitas yang positif dan akan meningkatkan dukungan masyarakat kepada penyuluhan.

Kasus di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, peningkatan produksi beras difokuskan pada penggunaan benih berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan pupuk dan pestisida yang tepat waktu, tepat tempat dan tepat petani pada setiap musim tanam. Pada awal tahun 2014 PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan uji coba pertanian organik pada 15 Ha lahan sawah di 10 Kecamatan dengan menghasilkan rata-rata 8.3 ton/ha gabah kering panen.

BAB 8

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

A. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, hal ini seolah-olah menjadi “label baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan pembangunan dan proposal proyek. Dalam perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang, baik sebagai individu atau warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan secara sadar dan penuh pengorbanan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari kegiatan itu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan/profesinya sendiri.

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Namun bila kita cermati, partisipasi tidak terbatas hanya keterlibatan dalam mengambil keputusan. Akan tetapi pengertiannya lebih luas dari itu, yaitu meliputi: proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Tahap-tahap dalam partisipasi meliputi: (1) tahap penumbuhan ide untuk membangun perencanaan, (2) tahap pengambilan keputusan, (3) tahap pelaksanaan dan evaluasi, dan (4) tahap pembagian keuntungan ekonomis.

Tahap pertama: penumbuhan ide atau gagasan dan perencanaan program. Dalam tahap ini kita harus melihat, apakah pelaksanaan program tersebut didasarkan atas gagasan atau ide yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri atau diturunkan dari atas. Jika ide dan prakarsa untuk membangun datang dari masyarakat sendiri karena didorong oleh

tuntutan situasi dan kondisi yang menghimpitnya pada saat itu, maka peran serta aktif masyarakat akan lebih baik.

Dipihak lain, apakah dalam melakukan perencanaan, masyarakat juga dilibatkan di dalamnya. Jika masyarakatnya ikut dilibatkan dalam proses perencanaan untuk membangun daerahnya, maka dapat dipastikan bahwa seluruh anggota masyarakat merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki potensi atau kemampuan, sehingga mereka lebih mudah berperan serta aktif atau berpartisipasi dalam melaksanakan, melestarikan program pembangunan itu sendiri.

Tahap kedua: pengambilan keputusan. Landasan filosofi dalam tahap ini adalah bahwa setiap orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberikan pemikiran-pemikiran dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri, keluarga, daerah, bangsa dan negaranya.

Keikutsertaan anggota atau seseorang di dalam pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengamankan paket program yang dikomunikasikan. Masyarakat merasa memiliki serta bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilan program yang dilaksanakan. Dengan demikian dalam diri masyarakat, akan tumbuh rasa tanggung jawab secara sadar kemudian berprakarsa untuk berpartisipasi secara positif terhadap setiap paket pembangunan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan diri dan keluarganya.

Tahap ketiga: pelaksanaan dan evaluasi. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat agar berpartisipasi di dalam melaksanakan setiap paket program pembangunan yang telah dikomunikasikan ke dalam masyarakat yang bersangkutan, masyarakat harus dilibatkan dalam melaksanakan setiap pelaksanaan program pembangunan. Landasan filosofi dalam tahap ini adalah prinsip *learning by doing* dalam metode belajar orang dewasa.

Tujuan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara baik tentang cara-cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka dapat secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan, serta melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan lain dari tahap ini adalah untuk menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar dalam hal ini komunikator atau penyuluh yang selama ini selalu terjadi dan akan terjamin bahwa program pembangunan itu sendiri tidak akan lenyap serta merta setelah kepergian para petugas desa yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal mengevaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya, pengalaman, manfaat, hambatan faktor pelancar yang mereka hadapi dalam operasionalisasi program dan secara

bersama-sama mencari alternatif terbaik sebagai bahan pertimbangan diwaktu yang akan datang.

Tahap keempat: pembagian keuntungan ekonomis. Tahap ini ditekankan pada pemanfaatan program pembangunan yang diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat dalam desa atau wilayah yang bersangkutan. Pertimbangan pokok dalam menerapkan suatu program jika dilihat aspek keuntungan ekonomis adalah program tersebut akan memberikan kesuksesan secara ekonomis (*better business and better living*) kepada seluruh atau sebagian besar masyarakat. Untuk melihat dan merasakan aspek ekonomis ini adalah masyarakat sendiri. Apakah manfaat ekonomis dirasakan oleh semua anggota keluarga, hanya untuk sebagian besar masyarakat, ataukah hanya untuk segelintir orang-orang tertentu saja.

Penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama, adanya pengertian tersebut, karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan : (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan tindakan untuk mengambil bagian, yaitu kegiatan atau pernyataan mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Gaventa dan Valderama (dalam Aristo, 2004), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: (1) partisipasi politik (*political participation*), (2) partisipasi sosial (*social participation*) dan (3) partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- 2) Partisipasi sosial (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai *beneficiary*

atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- 3) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap „penerima derma. atau „kaum tersisih. menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.” Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik oleh warga ketimbang menjadikan arena kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

Proses partisipasi dalam penyuluhan pertanian adalah, semakin mantapnya proses perubahan perilaku petani sesuaidengan yang diprogramkan bersama antara penyuluh dan petani yang akhirnya dapat menghasilkan suatu bentuk jaringan sosial yang baru (social network) bagi terwujudnya peningkatan usahatani, peningkatan bisnis petani dan peningkatan taraf hidup petani dan keluarganya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam penyuluhan pertanian akan menghasilkan suatu masyarakat yang dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi lingkungan disekitarnya.

Pembangunan pertanian akan berhasil bila ada partisipasi petani dalam setiap kegiatan yang diadakan. Partisipasi melalui pengikutsertaan petani dapat menjadi cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi petani di dalam perencanaan, penerapan, dan mengevaluasi program penyuluhan memang diperlukan, karena mereka memiliki informasi yang dapat meningkatkan mutu program tersebut, karena partisipasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, serta dapat merubah perilaku dan sikap petan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh

yang bersangkutan mengenai: (1) kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki, (2) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (3) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, dan (4) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Analisis tentang modal sosial (*social capital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergitas dalam hubungan antara pemerintah

dan masyarakat dalam bentuk jejaring komunitas (*community network*). Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki kualitas hidupnya. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menunjukkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar obyek pembangunan atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek pembangunan atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Terdapat 4 (empat) tahapan kegiatan partisipasi dalam pembangunan yaitu sebagai berikut.

- 1) Partisipasi pada tahap perencanaan. Keterlibatan seseorang/individu dalam perencanaan pembangunan sekaligus membawa dalam proses pembentukan keputusan, mencakup empat tingkatan yang pertama ialah mendefinisikan situasi yang menghendaki adanya keputusan. Kedua, memilih alternatif yang cocok untuk dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi, dan yang ketiga, menentukan cara terbaik agar keputusan yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Pada tahapan ketiga merupakan jabaran rencana, operasionalisasi rencana. berikutnya adalah mengevaluasi akibat apa saja yang timbul sebagai akibat dari pilihan keputusan itu.

- 2) Partisipasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, pengukuran bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan di dalam kegiatan-kegiatan fisik.
- 3) Partisipasi pada tahap pemanfaatan. Tahap pemanfaatan ialah partisipasi masyarakat di dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil-hasil kegiatan pembangunan.
- 4) Partisipasi pada tahap evaluasi dan monitoring. Keterlibatan masyarakat pada tahap evaluasi dan monitoring menunjukkan adanya tanggung jawab masyarakat terhadap berhasil tidaknya suatu program pembangunan. Melalui tahapan evaluasi dan monitoring ini masyarakat dapat merumuskan kebijakan yang dapat diambil terhadap keberlangsungan suatu program pembangunan.

Ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena: (a) takut/terpaksa; (b) ikut-ikutan; dan (c) kesadaran. Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan. Sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan. Partisipasi dengan ikut-ikutan hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama masyarakat desa. Partisipasi dengan kesadaran timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri. Partisipasi bentuk ini sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat desa dengan adanya partisipasi yang didasarkan atas kesadaran, maka masyarakat diajak untuk memenuhi dan merasa memiliki objek pembangunan yang diselenggarakan.

Terdapat beberapa unsur dalam partisipasi masyarakat antara lain: kepengurusan, frekuensi kehadiran dalam rapat, frekuensi mengajukan usul/saran dan diterima tidaknya usul/saran yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat tahap perencanaan. Pengukuran partisipasi tahap pelaksanaan menggunakan unsur bentuk bantuan (tenaga, uang dan materi yang disumbangkan). Sedangkan partisipasi tahap pemanfaatan diukur dari sejauh mana anggota masyarakat memetik hasil dari program kegiatan yang dilakukan.

Berkaitan dengan berbagai tipe partisipasi tersebut, partisipasi dapat klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan:
 - (a) Partisipasi bebas, terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi ini terbagi dalam dua sub kategori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan

tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau oleh orang lain. Sedangkan partisipasi terbujuk yaitu bila seorang individu mulai berpartisipasi telah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

- (b) Partisipasi terpaksa, partisipasi ini dapat terjadi dalam berbagai cara yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan partisipasi terpaksa karena kondisi sosial ekonomi.
- 2) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan:
- (a) Partisipasi langsung, terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi
 - (b) Partisipasi tidak langsung, terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya
- 3) Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan:
- (a) Partisipasi tak terbatas, bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas itu.
 - (b) Partisipasi terbatas, terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan masyarakatnya baik itu berupa pernyataan maupun kegiatan. Adapun bentuk kegiatan partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penyuluhan partisipatif. Penyelenggaraan penyuluhan masih berorientasi keproyekan, dengan demikian kemandirian petani belum terbentuk, keberlanjutan usaha petani masih terancam.

DAFEP (*Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project*) merupakan suatu program penyuluhan dengan mengutamakan peran aktif petani (partisipatif), dengan strategi: (1) penyuluhan dengan pendekatan Bottom-Up Planning, (2) teknologi spesifik lokalita, (3) petani sebagai mitra aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pengkaji teknologi, (4) untuk memberdayakan petani, (5) agar terjadi petani memilih sendiri alternatif teknologi/usaha terbaik, (6) pembelajaran melalui pengalaman dan temuan lapangan dengan pendekatan POD, (7) materi penyuluhan berupa prinsip, metode dan informasi, (8) penyuluh bertindak sebagai mitra petani dan memandu petani, (9) pendanaan datang dari pemerintah dan atau swadaya petani.

Sebagai suatu usaha pemberdayaan masyarakat, penyuluhan pertanian dapat diwujudkan melalui usaha partisipasi masyarakat melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam mengelola usahatani. Pentingnya penyuluhan pertanian diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan petani untuk mengembangkan dirinya dalam menjalankan usahatani dengan baik agar lebih mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.

Kegiatan penyuluhan pertanian perlu dikembangkan sebagai dasar menggerakkan kesadaran dan partisipasi petani dalam proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Upaya ini diwujudkan melalui upaya proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka menjadi, tahu mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses pasar, teknologi pertanian, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai solusi dalam meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.

C. Petani dan Penyuluh Pertanian dalam konteks Partisipasi Masyarakat

Petani adalah mereka yang untuk sementara waktu atau tetap menguasai sesuatu cabang usahatani atau beberapa cabang usahatani dan mengerjakan sendiri, baik tenaga sendiri maupun tenaga bayaran. Menguasai sebidang tanah dapat diartikan pula menyewa, bagi hasil atau beberapa memiliki tanah sendiri. Di samping menggunakan tenaga tangan sendiri ia dapat menggunakan tenaga kerja yang sifatnya tidak tetap.

Petani sebagai seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. Tanah dan dirinya adalah bagian dari satu hal, suatu kerangka hubungan yang telah berdiri lama. Suatu masyarakat petani bisa terdiri sebagian atau bisa juga seluruhnya dari para penguasa atau bahkan menggarap paksa tanah bila mana mereka menguasai tanah sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menjalankan cara hidup biasa dan tradisional yang di dalamnya pertanian, mereka masuk secara intim, akan tetapi bukan sebagai penanam modal usaha demi keuntungan.

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut. Peranan petani sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil keputusan dalam mengorganisasi faktor-faktor produksi yang diketahui.

Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan sendiri, yang matapencapaian pokoknya adalah mengusahakan tanah pertanian. Khusus petani di Indonesia, pada umumnya bukan termasuk farmer dengan berhektar-hektar tanah pertanian, tetapi kebanyakan merupakan peasant dengan sebidang kecil sawah atau ladang, bahkan kadang-kadang hanya sekedar buruh tani saja.

Ada beberapa alasan mengapa petani dianjurkan untuk berpartisipasi. Pertama adalah mereka memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil. Kedua adalah mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dalam kegiatan jika mereka ikut di dalamnya. Alasan ketiga adalah masyarakat yang demokratis secara umum menerima bahwa rakyat yang terlibat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan yang ingin mereka capai. Alasan keempat adalah banyak permasalahan pembangunan pertanian sehingga partisipasi kelompok dalam keputusan kelompok sangat dibutuhkan.

Partisipasi memungkinkan perubahan-perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir manusia. Perubahan dalam pemikiran dan tindakan akan lebih sedikit terjadi dan perubahan-perubahan ini tidak akan berjalan lama jika perubahan tersebut dikarenakan menuruti agen penyuluhan dengan patuh dari pada apabila mereka ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Berdasarkan berbagai konsep di atas, maka disimpulkan bahwa petani adalah seseorang yang mempunyai lahan sendiri maupun tidak dan sementara waktu atau tetap menguasai satu atau beberapa cabang usaha di bidang pertanian dalam arti luas baik itu dengan tenaga sendiri atau tenaga bayaran dalam pengelolaannya. Penyuluh Pertanian ialah penyuluh yang langsung berhubungan dengan para petani, ia harus dikenal oleh para petani. Oleh karena itu ia harus sering bertatap muka dengan para petani di pedesaan dalam menyampaikan segala amanat yang berkaitan dengan usahatani. Penyuluh pertanian adalah penyuluh pertanian yang berhubungan langsung dengan petani dan keluarganya di pedesaan dan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana penyuluhan di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP).

Para penyuluh pertanian bersama-sama dengan para petani yang dibimbingnya harus dapat mengadakan pembaharuan dalam usahatani di pedesaan, dari sistem pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Sifat usahatani yang sekedar mencukupi kebutuhan hidup berubah menjadi usahatani komersial, petani yang pasif menjadi petani yang dinamis dengan gerakannya yang progresif, pertanian yang terbelakang menjadi pertanian yang (modern)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian merupakan seseorang yang atas nama lembaga

pemerintah ataupun swasta bertugas untuk mendorong petani agar mau mengubah perilakunya sehingga dapat mengadakan perubahan yang lebih menguntungkan dalam usahatannya.

D. Peranan Penyuluh Pertanian dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka yang bersangkutan menjalankan peranan.

Terdapat 7 (tujuh) peran spesifik yang dilakukan oleh setiap penyuluh dalam proses introduksi suatu inovasi kepada kliennya. Ketujuh peran itu adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan kebutuhan untuk berubah.
2. Membina suatu hubungan untuk perubahan,
3. Mendiagnosa masalah,
4. Menimbulkan keinginan klien untuk berubah.
5. Mengubah keinginan untuk menjadi perilaku.
6. Menstabilkan dan memelihara perubahan.
7. Mencapai hubungan terminal.

Seorang penyuluh pertanian dalam kegiatan tugasnya yang diemban mempunyai tiga peranan yang erat, yaitu:

- 1) Berperan sebagai pendidik, memberi pengetahuan atau ciri-ciri baru dalam budidaya tanaman, agar petani lebih terarah dalam usahatannya itu
- 2) Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi para petani agar mau merubah cara berpikir, cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan mau menerapkan cara-cara bertani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tingkat hidupnya akan lebih sejahtera
- 3) Berperan sebagai penasihat, yang dapat melayani, memberi petunjuk-petunjuk dan membantu petani, baik dalam bentuk peragaan atau memberi contoh-contoh kerja dalam usahatani dalam memecahkan segala masalah yang dihadapi para petani. Setiap penyuluh pertanian harus mampu melaksanakan peran ganda sebagai upaya membantu petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas usahatannya, peran ganda penyuluh tersebut, antara lain:
 - (a) Guru, yang berperan untuk mengubah perilaku, yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sasarnya.
 - (b) Penganalisa, yang selalu melakukan pengamatan keadaan (sumber daya alam, perilaku masyarakat, kemampuan dana dan kelembagaan yang ada) dan masalah-masalah serta kebutuhan masyarakat sasaran,

melakukan analisis tentang alternatif pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan.

- (c) Penasehat, untuk memilih alternatif perubahan yang paling tepat, yang secara teknis dapat dilaksanakan secara ekonomis menguntungkan dan dapat diterima oleh nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (d) Organisator, yang harus mampu menjalin hubungan baik dengan segenap lapisan masyarakat (terutama tokoh-tokohnya), mampu menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat, mampu berinisiatif bagi terciptanya perubahan-perubahan serta dapat memobilisasi sumber daya dan kegiatan-kegiatan maupun mengembangkan kelembagaan-kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang direncanakan.

Para penyuluh mempunyai banyak peran antara penyuluh sebagai pembimbing petani, organisator dan dinamisator, pelatih teknisi dan jembatan penghubung antara keluarga petani dan instansi penelitian di bidang pertanian.

1) Penyuluh sebagai pembimbing petani

Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru petani dalam pendidikan non formal. Seorang penyuluh perlu memiliki gagasan yang tinggi untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan pertanian yang bersal dari petani maupun keluarganya. Seorang penyuluh harus mengenal dengan baik sistem usahatani setempat dan mempunyai pengetahuan tentang sistem usaha tani, bersimpati terhadap kehidupan dan kehidupan petani serta mengambil keputusan yang dilakukan oleh petani baik secara teori maupun praktek.

Penyuluh harus mampu memberikan praktek demonstrasi tentang sesuatu cara atau metode budidaya suatu tanaman, membantu petani menempatkan atau menggunakan sarana produksi pertanian dan peralatan yang sesuai dengan tepat; penyuluh harus mampu memberikan bimbingan kepada petani tentang sumber dana kredit yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha tani mereka dan mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan petani yang berasal dari instansi-instansi yang terkait.

2) Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator petani

Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan para penyuluh lapangan tidak mungkin mampu untuk melakukan kunjungan kepada masing-masing petani, sehingga petani harus diajak untuk membentuk kelompok-kelompok tani dan mengembangkannya menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang mempunyai peran dalam

mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Dalam pembentukan dan pengembangan kelompok tani ini para penyuluh berperan sebagai organisator dan dinamisor petani.

3) Penyuluh sebagai teknisi

Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik, karena pada suatu saat ia akan diminta oleh petani untuk memberikan saran dan demonstrasi kegiatan usahatani yang bersifat teknis. Tanpa adanya pengetahuan dan ketrampilan teknis yang baik maka akan sulit baginya dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi yang diminta petani.

4) Penyuluh sebagai jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan petani

Penyuluh bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian kepada petani. Sebaliknya petani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada penyuluh yang membinanya sebagai jembatan penghubung, selanjutnya penyuluh menyampaikan hasil penerapan teknologi yang dilakukan oleh petani kepada lembaga penelitian yang terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut.

Para penyuluh mempunyai banyak peran antara lain:

1) Sebagai inisiator yaitu para penyuluh membina dan memelihara hubungan dengan petani dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Penyuluh juga membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan merekomendasikan untuk kemajuan usahatani petani. Kebutuhan petani yang beragam menuntut penyuluh supaya lebih aktif menggali ide baru dengan memanfaatkan sarana yang ada untuk meraih peluang sehingga dapat membantu petani melalui peningkatan pendapatannya kemudian kesejahteraan keluarga petani.

2) Sebagai motivator, yaitu penyuluh membangkitkan motivasi dalam rangsangan yang memprakarsai pengenalan isu-isu yang berkembang dan keinginan masyarakat, agar masyarakat dapat bergerak serta mempengaruhi melalui advis dan petunjuk. Seorang penyuluh harus dapat membina dan meningkatkan motivasi masyarakat sasaran agar mau mengubah cara berpikir dan cara kerjanya sehingga mau dan mampu menerapkan cara kerja baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai motivator, yang diperlukan penyuluh adalah:

(a) Mendorong petani untuk menerima teknologi baru yang sesuai untuk daerahnya

(b) Mengembangkan swadaya dan swadana petani

- (c) Menumbuhkan kesadaran, etos kerja, disiplin dan mengerakkan partisipasi masyarakat
 - (d) Mampu berinisiatif bagi terciptanya perubahan serta dapat memobilisasi sumber daya
 - Mengarahkan dan membina kegiatan
 - (a) Mengembangkan kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan.
- 3) Sebagai mediator atau jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan petani yaitu para penyuluh memberi informasi dan menghubungkan petani dengan sumber informasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Penyuluh bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada petani. Sebaliknya petani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada penyuluh yang membina sebagai jembatan penghubung, selanjutnya penyuluh menyampaikan hasil penerapan teknologi yang dilakukan oleh petani kepada lembaga penelitian yang terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut.
- 4) Sebagai seorang supervisor, para penyuluh melakukan pengawasan dalam kegiatan pertanian. Tujuan dilakukannya supervisi terhadap kegiatan penyuluhan adalah untuk mengetahui apakah program penyuluhan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, disamping itu juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau kelemahan di dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan. Hal ini sangat penting karena dengan mengetahui kelemahan yang ditemui selama kegiatan penyuluhan di lapangan maka dapat disusun bimbingan yang tepat kepada pelaksana penyuluhan agar kelemahan dan kekurangan dapat dikurangi sekecil mungkin.
- (5) Sebagai fasilitator yaitu para penyuluh harus mampu memberikan pelayanan kepada petani serta memfasilitasi setiap kegiatan petani. Sebagai seorang fasilitator, maka yang perlu dilakukan adalah:
- (a) Menyiapkan, menyajikan dan menyediakan segala informasi yang diperlukan oleh petani
 - (b) Menyediakan, dan menyiapkan peralatan untuk demonstrasi bagi petani
 - (c) Bersedia memecahkan masalah yang dihadapi petani
 - (d) Membantu petani melakukan perbaikan/ perubahan komoditas usahatani dengan menyediakan data yang sesuai dengan daerahnya
 - (e) Memberikan fasilitas bagi petani untuk mengadakan pertemuan pada proses penyuluhan dan proses komunikasi para penyuluh

menjalankan berbagai peranan menurut keadaan dan waktu, antara lain sebagai:

1. Pemrakarsa/inisiator, yang selalu mengarahkan gagasan baru dan pandai menjelaskan persoalan,
2. Pemberi jalan/fasilitator, yang memberi atau pandai mencari kesempatan untuk menerangkan/ mendiskusikan masalah-masalah,
3. Pemberi hati /encourager, yang selalu menengahi pertengkaran/konflik, mempertemukan pihak yang berlawanan,
4. Penilai, yang akan selalu menilai hasil kegiatan,
5. Penganalisis, yang akan menganalisis segala kemungkinan,
6. Penyimpul, yang mempersatukan saran dan pembicaraan dari segala pihak,
7. Pembagi bahan/expenditur, yang memeriksa dan membagi bahan untuk pertemuan dan kegiatan,
8. Pencari keterangan, yang selalu ingin lebih banyak fakta atau keterangan,
9. Pemberi fakta, yang suka memberi keterangan dan fakta mengenai lapangannya,
10. Pemberi kedudukan/status yang memberi dorongan agar orang-orang menjadi anggota kelompok tani,
11. Penengah, yang selalu menengahi perbedaan-perbedaan pendapat.

Peran utama seorang agen pembaharuan dalam hal ini penyuluh pertanian yaitu: (1) sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan, (2) sebagai pemberi pemecahan masalah, dan (3) sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi serta memberi petunjuk mengenai bagaimana: (1) mengenali dan merumuskan kebutuhan, (2) mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, (3) mendapatkan sumber-sumber yang relevan, (4) memilih atau menciptakan pemecahan masalah, (5) menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah, (6) sebagai penghubung (linker) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Peran utama penyuluh pertanian sebagai agen pembaharuan ini merupakan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu usaha memberdayakan masyarakat tani dan keluarganya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa peran penyuluh adalah sebagai inisiator, sebagai motivator, sebagai mediator, sebagai supervisor dan sebagai fasilitator untuk mewujudkan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

5) Partisipasi Kelembagaan Kelompok Tani dalam Pembangunan Pertanian

Keberadaan kelembagaan petani akan berdampak baik pada motivasi petani dalam mengembangkan program pembangunan pertanian yang dilaksanakan secara partisipatif antara petani dan penyuluh sebagai lembaga normatif pemerintah dalam mengubah perilaku petani ke arah yang lebih baik dan produktif.

Kelembagaan adalah sesuatu yang berada di atas petani, sedangkan organisasi berada di level petani, sebagaimana yang dianut kalangan ahli “ekonomi Kelembagaan.” Institution adalah *the rule of the game*, sedangkan organization adalah *“their entrepreneurs are the players.”*

Pengembangan kelembagaan petani merupakan salah satu aspek yang berpengaruh untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama petani dalam membangun pertanian yang berkelanjutan. Kelembagaan petani ini merupakan wadah yang aspiratif menyuarakan kebutuhan dan aspirasi petani kepada pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya sebagai upaya menumbuhkembangkan potensi kemampuan dan pengetahuan petani. Berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing petani salah satunya adalah pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pemantapan dan peningkatan kemampuan kelompok-kelompok petani kecil. Pada dasarnya pengertian kelompok tani tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelompok itu sendiri.

Kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang satu dengan individu lainnya, mempunyai hubungan saling tergantung sesuai dengan status dan perannya, mempunyai norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok itu. Kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu.

Struktur sebuah kelompok adalah susunan dari pola antar hubungan internal yang agak stabil, yang terdiri atas: (1) suatu rangkaian status-status atau kedudukan-kedudukan para anggotanya yang hirarkis, (2) peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status-status itu, (3) unsur-unsur kebudayaan (nilai-nilai, norma-norma, model) yang mempertahankan, membenarkan dan mengagungkan struktur.

Terdapat beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok, yaitu: setiap anggota kelompok harus sadar sebagai bagian dari kelompok, ada

hubungan timbal balik antara sesama anggota dan terdapat suatu faktor yang di miliki bersama oleh para anggota sehingga hubungan diantara mereka semakin kuat. Ciri kelompok tersebut sebagai isyarat bahwa kelompok tani mempunyai peranan yang baik dan strategis dalam membangun pertanian yang berdaya saing, berhasil guna dan berkualitas.

Di sisi lain ciri-ciri suatu kelompok adalah: (1) ada interaksi antar anggota yang berlangsung secara kontinyu untuk waktu yang relatif lama, (2) setiap anggota menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok, dan sebaliknya kelompok mengakuinya sebagai anggota, (3) adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai, (4) adanya struktur dalam kelompok, dalam arti para anggota mengetahui adanya hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh didalam kelompok itu.

Dalam rangka pemberdayaan (penguatan) petani sebagai salah satu pelaku agribisnis hortikultura, maka perlu menumbuh kembangkan kelompok tani yang mandiri dan berwawasan agribisnis. Penguatan kelembagaan di tingkat petani meliputi kelompok tani, asosiasi, himpunan, koperasi, merupakan hal yang perlu segera dikembangkan secara dinamis guna meningkatkan profesionalisme dan posisi tawar petani.

1) Penumbuhan Kelompok tani

- (a) Menumbuhkan kelompok tani baik dari kelompok yang sudah ada ataupun dari petani dalam satu wilayah.
- (b) Membimbing kelompok berdasarkan kepentingan usaha tani kelompok.
- (c) Mengorganisasikan petani dalam kelompok.
- (d) Menjalin kerjasama antar individu petani di dalam satu kelompok.

2) Peningkatan Kemampuan Kelompok tani

- (a) Meningkatkan kemampuan kelompok tani melalui peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, meningkatkan sistem managerial dan kepemimpinan kelompok serta peningkatan partisipasi kelompok tani.
- (b) Mengembangkan fungsi kelompok tani menjadi kelompok usaha/ koperasi.
- (c) Mengembangkan organisasi kelompok ke bentuk yang lebih besar, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Asosiasi.

3) Mengembangkan Kemitraan Usaha

- (a) Mengembangkan kemitraan usaha agribisnis antara kelompok on-farm dengan kelompok off-farm.
- (b) Meningkatkan nilai tambah ekonomis produk melalui kerjasama usaha antara pelaku agribisnis.
- (c) Memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan adanya pelaku kemitraan (petani, kelompok tani, pengusaha, dan pemerintah; Adanya kebutuhan dan kepentingan bersama dari pelaku-pelaku agribisnis; Adanya kerjasama dan kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan.

Pembangunan lembaga/organisasi tidak sekadar memindahkan kerangka organisasi tetapi juga harus memberikan perasaan tertentu, ciri-ciri masyarakat, perasaan, keterampilan, sikap dan moral merupakan darah dan daging suatu lembaga pertanian. Konsep ini menegaskan bahwa dalam suatu lembaga perlu adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara sesama anggota dengan mengedepankan norma dan aturan yang berlaku sebagai upaya mencapai tujuan lembaga tersebut dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Organisasi atau kelembagaan petani diakui sangat penting untuk pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya organisasi petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan organisasi atau kelembagaan pada masyarakat petani. Intervensi yang terlalu besar dari pemerintah atau politisi seringkali menyebabkan organisasi itu bekerja bukan untuk petani tetapi melayani kepentingan pemerintah atau para pengelolanya.

Pembangunan pertanian merupakan prioritas pembangunan dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat, meskipun demikian permasalahan di bidang ini pun makin bertambah. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan adalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan beberapa elemen-elemen seperti peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas ekonomi pedesaan, pelaksanaan reformasi agraria, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan petani serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan kota.

Terdapat lima syarat pokok yang diperlukan untuk menggerakkan dan membangun pertanian, yaitu: (1) adanya pasar untuk hasil usahatani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, (4) adanya perangsang produksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Di samping lima syarat mutlak, ada dua syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (dapat diadakan) benar-benar akan sangat

memperlancar pembangunan pertanian, karena pembangunan pertanian perlu memiliki berbagai sarana untuk pengembangan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Termasuk sarana pelancar tersebut adalah pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian serta perencanaan nasional pembangunan pertanian. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Perangsang pembangunan pertanian
 - (a) Adanya rencana pembangunan yang memberi prioritas pada pembangunan pertanian.
 - (b) Adanya kebijakan-kebijakan khusus seperti kebijakan harga minimum (floor price), subsidi harga pupuk, kegiatan penyuluhan yang intensif, perlombaan dengan hadiah-hadiah yang menarik pada petani teladan, pendidikan pembangunan pada petani-petani di desa baik mengenai teknik baru dalam pertanian maupun mengenai keterampilan lainnya yang membantu menciptakan iklim yang menggiatkan usaha pembangunan
- 2) Faktor-faktor fisik dan sosial
 - (a) Tersedianya secara lokal kebutuhan akan sarana pertanian seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.
 - (b) Adanya lembaga perbankan yang siap melayani dan meminjamkan kredit dengan persyaratan yang tidak berat.
 - (c) Pengembangan usaha koperasi melalui peningkatan mutu pengurus koperasi dan para anggotanya.

BAB 9

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan efisien jika penyuluh pertanian berperan aktif dalam memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang spesifik lokasi. Pembangunan pertanian akan lebih bersinergi dan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Penyuluhan pertanian yang penyelenggaraannya didasarkan pada pola pendidikan non formal perlu memperhatikan aspek-aspek masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga para penyuluh perlu mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya alam yang spesifik lokasi dan kemampuan masyarakat. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang ditempuh dengan mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu strategi pembelajaran demokrasi dan humanis dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian yang dikembangkan melalui perencanaan program penyuluhan pertanian yang spesifik lokasi didasarkan pada pengetahuan, kesempatan dan kemampuan masyarakat serta sesuai dengan masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

Penyuluhan pertanian dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang terwujud melalui aksi sosial yang efektif dan efisien merupakan suatu usaha pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat.

Penyuluhan pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat merupakan momentum bagi penyuluh untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga petani dan masyarakat pada umumnya dapat memperoleh informasi tentang perkembangan teknologi pertanian pada khususnya dan pembangunan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Informasi teknologi pertanian tersebut seyogyanya dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat tani, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera sebagai makna dari pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aithai Vathsala. 2005. *Empowerment and Global Action of Women: Theory into Practice*. http://home.arcor.de/aithal/pdf/Aithal_Vathsala.pdf. Diakses Tanggal, 30 Desember 2014.
- Akinnagbe O.M. and A.R. Ajayi. 2010. *Challenges of Farmer-Led Extension Approaches in Nigeria*. *World Journal of Agricultural Sciences* 6(4): 353-359.
- M, Amstron. 1998. *A Hand Book of Personal Management Practice*, 4th Ed. London: Kogan Page.
- Amirudin S. 2010. Model Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan Mendukung Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA IPB.
- Anderson J. R. and G. Feder. 2004. Agricultural Extension: Good Intentions and Hard Realities. *The World Bank Research Observer*. 19 (1): 41-60.
- Arief Budiman. 1995. *Toeri Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Aristo D.A. 2004. Rejuvenasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan Dalam : Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Asngari PS. 2001. Peranan Agen Pembaharuan/ Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agrobisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. 15 September 2001.
- Averroes Community. 2009. Pemberdayaan Masyarakat. www.averroes.or.id/.../profil-averroes-community.pdf. Diakses Tanggal 12 Januari 2015.

- Bahua MI. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- _____. 2014. *Efektivitas Pertumbuhan dan Produksi Padi Sawah (Oriza sativa L) melalui Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) di Kabupaten Gorontalo Utara*. Laporan Hasil Penelitian. Kerjasama Pusat Kajian Pertanian Tropis Universitas Negeri Gorontalo dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bappenas. 2004. PPA Partisipatory Poverty Assesment. Jakarta : Bappenas – KIKIS.
- Barry JM. 1997. "Performance Management: A Case Study." Journal of Environmental Health. Denver: Nov 1997. Vol. 60, Edisi 4; pg. 35, 5 pgs <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=22603684&sid=14&Fmt=4&clientId=45625&RQT=309&VName=PQD>. Di akses Tanggal, 18 Juli 2014.
- Beach SD. 1970. The Management of People at Work. New York: Mac Milian.
- Belows R. 1961. Psychology of Personnel in Business Industry. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Bernardin JH, and Russel J EA. 1993. Human Resource Management. International Ed. Singapore: McGraw Hill, Inc.
- Birner R and J. R. Anderson. 2007. How to Make Agricultural Extension Demand-Driven?: the Case of India.s Agricultural Extension Policy. Washington, D. C: International Food Policy Research Institute.
- Bittel R dan Newsroom J. 1996, Pedoman Bagi Penyelia. (Penerjemah: Bambang Hartono) Cetakan II. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Blanchard PK, and Spencer. 1982. Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

- Boyatzis RE. 1982. *The Compotent Manager, A Model for Effective Performance*. New York: John Wiley and Sons.
- Bryan DT and Glenn DI. 2004. "Agent Performance dan Customer Satisfaction." *Jurnal of Extension*. Number 6 Volume 42 Desember 2004. <http://www.joe.org/joe/2004december/a4.php>. P. 5: 4-12
Diakses 30 April 2014.
- Capozzi, Catherine. 2013. *Demand Side of Business Vs. Supply Side of Business*. [www. Ehow.com/print/info_7781190_demand-vs-supply-side-business.html](http://www.Ehow.com/print/info_7781190_demand-vs-supply-side-business.html).
- Cardy, Robert L, Dobbins, Gregory H, Carson, Kenneth P. 1995. *TQM and HRM: "Improving Performance Appraisal Research, Theory, and Practice."* *Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*. Montreal: Juny 1995. Vol. 12, Edisi 2; pg. 106, 10 pgs.
<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=6722636&sid=6&Fmt=3&clientId=45625&RQT=309&VName=PQD>
.Di akses 18 Juli 2014.
- Carry Lee J. 1976. *Community Development : As A Process*, University of Missouri Press : Columbia.
- Castles S. 2001. *Studying Social Transformation*. *International Political Science Review*. Vol 22, No 1. Pp 13-32.
- Chamala Shankariah, Shingi PM. 1997. "Establishing and Strengthening Farmer Organizations." *Dalam Improving Agricultural Extension: A Reference Manual*. (Penyunting, Burton E. Swanson, Robert P. Bentz, dan Andrew J. Sofranko). Roma: FAO.
- Cherrington DJ. 1995. *Organizational Behavior: The Management of Individual and Organizational Performance*. London; Allyn and Bacon.
- Crawford M. 2005. *Kepemimpinan dan Kerjasama Tim dalam Manajemen Kependidikan (Leadership and Teams in Educational Management)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dahama PO, Bhatnagar OP. 1980. *Education and Communication forDevelopment*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing, Co.

- Davis, Kristin E. 2008. Extension in Sub-Saharan Africa: Overview and Assessment of Past and Current Models, and Future Prospects. *Journal of International Agricultural and Extension Education* 15(3): 15-28.
- Dayal R. Christine van Wijk dan Nilanjana Mukherjee. 2000. Methodology for Participatory Assessments with Communities, Institutions and Policy Makers. <http://www.waspola.org/default/policy/web>. Di akses, 2 November 2014.
- Deborah JM, Keith N, Jim L, Ken B. 2002. Core competencies for the cooperative system. <http://www.idrc.ca/en/ev-30266-201-1-do.html> Di akses, 2 November 2014.
- Departemen Pertanian RI. 2004. Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Empowermentillustrated.com. "Empowerment Illustrated: Theory of Empowerment Archives." [theory of empowerment.html](http://www.empowermentillustrated.com/theory-of-empowerment.html)
- Gagne MR. 1967. *The Condition of Learning*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- George MJ, Jones RG. 1996. *Organizational Behavior*, Massachusset: Addison-Wesley publishing company, Inc.
- Gibson I. 1996. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson TL. 2001. *Cooperative Extension Program Planning in Wisconsin*. University of Wisconsin-Extension Cooperative Extension. Madison: Wisconsin.
- Gilley WJ, Egglund SA. 1989. *Principles of Human Resources Development*. Toronto. Canada: Addison Wesley Publishing Company, Inc.
- Godfrey P. 2003. *Toward a Theory of Economic Self Reliance (ESR)*. Marriot School of Management. Brigham Young University. <http://marriotschool.byu.edu/selfreliance/files/ACF185.ppt#270.18.Keyquestion>. Di akses 14 September 2014.

- Gomez CF. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Gruneberg MM. 1979. *Understanding Job Satisfaction*. London: The MacMillan Press.
- Haidee A. 1995. "The Elements of Performance Management." *Journal Training and Development*. Alexandria: Dec 1995. Vol. 49, Edisi 12; pg. 9, 2 pgs <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=8702801&sid=6&Fmt=3&clientId=45625&RQT=309&VName=PQD>. Di akses 18 Juli 2014.
- Hasibuan MSP. 1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Hariadi SS. 2006. "Penyuluhan dengan Pendekatan Wilayah Guna Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. Volume 2 Nomor 2. Desember 2006. Hlm 122. 119 – 127. http://stppyogyakarta.com/wp.../IIP_0202_06_Sunarru_Samsi_Hariadi.pdf Di akses 10 Januari 2015.
- Haryadi, Fuad AB, Wahab SA. 2001. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin. Artikel Hasil Penelitian. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7AGKyuS11FsJ:ppsub.u.b.ac.id/perpustakaan/abstraksi/tesis/>. Diakses 18 November 2014.
- Hatta M dan Mohamad IB. 2010. *Perencanaan Partisipatif dan Paradigma Pembangunan Masyarakat*. Bogor. Institute of Regional and Local Development.
- Havighurts RJ. 1974. *Development Tasks and Education*. 3rd Ed. New York: David McKay Company, Inc.
- Herry Darwanto. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil*. Jakarta. Bappenas.
- Herzberg F. 2000. *Frederick Herzberg's Motivation And Hygiene Factors*. <http://businessballs.com/herzberg.htm> Diakses 12 September 2014.

- Hickerson JF, Middleton J. 1975. *Helping People Learn: A Module for Training Trainer*. Hawai: East-West Center.
- Houle OC. 1975. *The Nature of Adult Education*. Penyuluhan Pertanian. Edisi Ke-2. Bahan Bacaan dan Diskusi. Di edit oleh Margono Slamet. Bogor: IPB.
- Hubeis AVS, Prabowo T, Wahyudi R. 1992. *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Hwang-Sun Kang. 2003. "Efficiency" *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Ismawan B. 2003. "Kemandirian: Suatu Refleksi." *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Nomor 3 Voleme 2. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_15/artikel_3 . Hlm 5: 4-9. Di akses 15 Oktober 2014.
- Ivancevich MJ, Szilagyi AD, Wallace JM. 1987, *Organizational Behavior and Performance*, California: Goodyearpublishing company, Inc.
- Jacius JM 1968. *Personal Management*. Tokyo: Charles E.Tutle Company.
- Jahi A, Newcomb LH. 1981. Orientation: "Adjust For Agent Characteristic." *Journal of Extension*. July/August. <http://www.joe.org/joe/1981july/81-4-a5.pdf>. Hlm 25: 23-27. Di akses 14 Oktober 2014.
- Johnson, Walter. 2013. *Demand Side Vs Supply Side Policies*. www.Ehow.com/print/info_7783494_demandside-vs-supplyside-policies.html
- Kantor Deputy Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2008. *Artikel Hasil Penelitian. Teknologi Tepat Guna Jagung (Zea mays L)*. Jakarta: <http://www.ristek.go.id>. Di akses 12 Oktober 2014.
- Kartasapoetra AG. 1997. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bina Aksara.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. www.bkn.go.id/formasi.php?start=9380. Di akses 12 Oktober 2014.
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999. Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. <http://www.deptan.go.id/pengumuman/berita/suratedaran.htm> Di akses 14 Oktober 2014.
- Kelsey JF. dan Hearne, 1955. *Cooperative Extension Work* Ithaca: Comstock Publishing Associates.
- Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Pementan/Ot. 140/8/2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian Dan Pengembangan, Dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional(P2bn)http://diperta.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Permentan_Tata_Hubungan_Kerja_P2BN_2011.pdf.
- Koontz H, O'Donnell C, Weihrich H. 1980. *Management*, 7th Ed. Kogakusha: McGraw-Hill. Kusenendi. 2008. *Model-Model Persamaan Struktural. Satu dan Multigroup Sampel dengan LISREL*. Bandung: Alfabeta.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Lako A, Sumaryati A. 2002. *Optimalisasi Kinerja Korporasi Melalui Audit Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Majalah Usahawan.
- Lippitt R, Watson J, Westley B. 1958. *The Dinamic of Planned Change*. Harcourt, New York: Brace and World, Inc.
- Lionberger FH. 1960. *Adoption of New Ideas and Practices*. Ames, Iowa: The Iowa State University Press.
- Lusthaus C, Adrien M, Anderson G, Carden FM. 2002. *Organizational Assessment: A framework for improving performance*. IDRC.

<http://www.idrc.ca/en/ev-30266-201-1-do.html>. Di akses 20 April 2014.

Makeham PJ, Malcolm RL. 1991. Manajemen Usahatani Daerah Tropis. Jakarta: LP3ES.

Mangkunegara PAAA. 2001. Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maslow A. 1956. Maslow's Hierarchy of Needs motivational model. <http://businessballs.com/maslow.htm> Di akses 12 September 2014.

Mathis LR, Jackson HJ. 2001. Human Resource Management. New York: South-Western College Publishing.

McClelland CD. 1961. David C McClelland's Motivational Needs Theory. <http://businessballs.com/davidmcclelland.htm>. Di akses 12 September 2014.

Michael. 2002. Training Need Analysis. <http://www.amxi.com/legal.htm>. Di akses 27 April 2014.

Mohamad Junus Jarmie. 1994. "Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian Indonesia." Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Muhammad Bansir. 2008. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur." Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Monks JF, Knoers, APM, Haditono RS. 2001. Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mosher AT. 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. (terjemahan, Krisnandhi). Jakarta: Yasaguna.

Mubyarto. 1991. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.

Muchinsky. 1993. Psychology Applied to Work. 1st Ed, Chicago: The Dorsey Press.

- Musdalifah. 2007. "Perkembangan Sosial Remaja dalam Kemandirian: (Studi Kasus Hambatan Psikologis Dependensi terhadap Orang tua)." *Jurnal Iqra*. Volume 4 Nomor 2. Desember 2007. Hlm 50: 45-56. <http://jurnaliqro.files.wordpress.com/2008/08/05-ifah-46-56.pdf> Di akses 18 Juli 2014.
- Nawawi. H. 2003. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Neill J. 2008. *Core Abilities: Bringing the Mission to the Classroom*. Wisconsin Technical College System.
- Nitisemito AS. 2000. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Gramedia.
- North Carolina Cooperative Extension. 2006. *Extension Agent Competencies*. <http://www.ces.ncsu.edu/pods/agents/knowledge.com.s.html>. Di akses 18 Juli 2014.
- Padmowihardjo S. 2004. *Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Sistem dan Usaha Agribisnis*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertanian.
- _____. 2004. *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Agribisnis*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000. *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Pertiwi PR. Dan Amirudin S. 2010. *Persepsi Petani tentang Saluran Komunikasi Usahatani Padi*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Volume 08. No.2 Juli 2010. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA IPB.
- Puspadi, Ketut. 2002. "Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian". Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Qamar, M. Kalim. 2011. *Introducing Demand-Driven Extension Approach In a Traditional Region: a Case Study from Pakistan*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

- Rivera, W. M. and G. Alex. 2004. The Continuing Role of Government in Pluralistic Extension Systems. *Journal of International Agricultural and Extension Education*. 11(3):41-51.
- Robbins PS. 1996. *Perilaku Organisasi*. Edisi bahasa Indonesia Jilid 1. Jakarta: Prenhallindo.
- Rogers EM, Shoemaker FF. 1995. *Communication of Innovation: A cross Cultural Approach*. Revised Ed. New York: The Free Press.
- Ruky SA. 2003. *SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadjud S. 2009. Memberdayakan Usahatani. *Harian Kompas*, 10 September 2009. Jakarta. Hlm 3. [http:// www. ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/ 7181-memberdayakan-usahatani.pdf](http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/7181-memberdayakan-usahatani.pdf). Di akses 19 Juli 2014.
- Sa.id, G dan Intan, A.H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia.
- Salkind N. 1985. *Theories of Human Development*. 2nd Ed. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Sarwono SW. 2000. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schermerhorn JR, Hunt JG, Osborn RN. 1997. *Managing Organizational Behavior*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Setiana L. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setyobudi HA. 2009. Kaum Intelektual Harus Memiliki Sifat Kemandirian yang Tinggi. *Harian Umum Pelita*, 17 Oktober 2009 (Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa). Hlm 14. <http://www.harianumumpelita.com> Di akses 15 Nopember 2014.
- Siagian SP. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simamora H. 1999. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Edisi kedua, Yogyakarta: YKPN.

- Skinner BF. 1953. *Science and Human Behavior*. New York: The Mac-Millan Company.
- SKB Mendagri dan Mentan. Nomor 539/Kpts/LP.120/7/1991 dan Nomor 65 Tahun 1991. Tentang Peran Penyuluhan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian. Jakarta. Departemen Pertanian.
- _____. Nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301/Kpts/LP.120 /4/1996. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah. Jakarta. Departemen Pertanian.
- Slamet M. 1992. "Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas." Dalam: *Penyuluhan Pembangunan Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Diedit oleh: Aida V, Prabowo T, Wahyudi R. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- _____. 2001. *Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- _____. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat." Dalam: *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Diedit oleh: Ida Yustina dan Adjat Sudrajat. Bogor: IPB Press.
- _____. 2011. *Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial*. Bogor Ganti dengan titik dua Institut Pertanian Bogor.
- Soemanto W. 1987. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Spencer ML, Spencer MS. 1993. *Competence at Work*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Stone B. 1999. Extension Organization of the Future: Linking Emotional Intelligence and Core Competencies. *Jurnal of Extension*. Number 6 Volume 37. <http://www.joe.org/joe/1999december/iw4.html>. Hlm 5: 4-9. Di akses 16 September 2014.
- Steinberg L. 1993. *Adolescence*. 3rd Ed. New York: Mc.Graw Hill, Inc.
- Subejo. 2002. Penyuluhan Pertanian Indonesia. Isu Privatisasi dan Implikasinya. *Jurnal Agroekonomi*. Volume 9 No.2 . Desember 2002.
- Sudaryanto T, Simatupang P, Kariyasa K. 2005. "Konsep Sistem Usaha Pertanian Serta Peranan BPTP dalam Rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 3

Nomor 3. Desember 2005. Hlm 350: 349-366.
<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART03-4c.pdf>. Di akses 18 Juli 2014.

Sudomo, Jarmie. 1985. Pendidikan Luar Sekolah ke Arah Sistem Belajar Masyarakat. Jakarta: P2LPTK-Depdikbud.

Sukiyono K. 2004. "Analisis Fungsi Produksi dan Efisiensi Teknik: Aplikasi Fungsi Produksi Fronteir pada Usahatani Cabai di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. Volume 6 Nomor 2. Juni 2004. Hal 105: 104-110.
<http://bdpunib.org/jipi/artikeljipi/2004/104.PDF> Di akses 18 Juli 2014.

Sumardjo. 1999. "Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani (Kasus di Propinsi Jawa Barat)." Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Susilo Bambang Yudoyono. 2009. Kemandirian Ekonomi perlu Kerjasama Luar Negeri.
<http://www.detikfinance.com/read/2009/06/14/163101/1147631/4/sby-kemandirian-ekonomi-perlu-kerjasama-luar-negeri>. Di akses 12 Oktober 2014.

Swasono SE. 2003. "Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat." *Jurnal Ekonomi Rakyat*.

Swanson, Burton E. and M. M. Samy. 2002. *Decentralization of Agricultural Extension Systems: Key Elements for Success*. Washington, D. C: International Food Policy Research Institute.

Swanson, Burton E. 2006. The Changing Role of Agricultural Extension in a Global Economy. *Journal of International Agricultural and Extension Education*. 13(3):5-17.

Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Szilagy AD, Wallace MJ. 1990. *Organizational Behavior and Performance*. New York: Harper & Collinspublishers.

Teddy Rachmat Muliady. 2009. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi

- di Jawa Barat.” Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Tjitropranoto P. 2005. “Penyuluhan Pertanian: Masa Kini dan Masa Depan.” Dalam: Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Diedit oleh: Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Totok Mardikanto. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Undang-Undang RI. No. 16 Tahun 2006. Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta: Departemen Kehutanan. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Usman M. 2009. Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian dalam Era Pasar Bebas.http://stiead.ac.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=41 Di akses 12 Oktober 2014.
- Utami AB. 1992. “Hubungan Pengalaman Belajar, Kemandirian, dan Inteligensi dengan Kemampuan Menyelesaikan Masalah pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UNTAG '45 Surabaya.” Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada.
- Valera, Martinez, Plopino. 1987. An Introduction to Extension Delivery System. Manila: Island Publishing House.
- Van den Ban AW, Hawkins HS 1999. Penyuluhan Pertanian. (terjemahan) Second Edition. Yogyakarta: Kanisius.
- Walker EL. 1973. Conditioning dan Proses Belajar Instrumental. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Wiraatmadja S. 1977. Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian. Cetakan ke-3. Jakarta: Yasaguna.
- Widiyatnya IN. 1999. Pendekatan Kompetensi sebagai Acuan dalam Perencanaan Karir Individu untuk “Multiple Skill Employee.” Jurnal Usahawan. Nomor 08 Volume 3. Hlm 6: 4-10.

- Yuchtman, Seashore.1967. Performance. http://www.idrc.ca/en/ev-30226-201-1-DO_TOPIC.html. Di akses 18 Maret 2014.
- Yustika AE. 2007. “Memproklamasikan Kemandirian Ekonomi.” Jurnal Ekonomi Rakyat http://kau.or.id.20.masterwebnet.comdo_pdf=1&id=96. Di akses 12 Oktober 2014.
- Yusuf AE. 2008. Pengaruh Motivasi terhadap Peningkatan Kinerja.<http://teknologikinerja.wordpress.com/2008/05/06/pengaruh-motivasi-terhadap-peningkatan-kinerja/>. Di akses 19 Mei 2014.